RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

TAHUN 2006 – 2025

PEMERINTAH KOTA MEDAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA MEDAN
TAHUN 2006 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

Menimbang:

a. Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

b. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu melaksanakan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, akuntabilitas dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

c. Bahwa dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai Undang - Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dalam satu Peraturan Daerah..

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b, dan huruf c, Pemerintah Kota Medan dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dalam satu peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286)

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang-ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA MEDAN TAHUN 2006 – 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Medan
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
d. Pembangunan kota adalah proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat kota yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan regional serta global.
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan selanjutnya disebut RPJP Kota Medan adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakeholders, yang berisi tentang Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA MEDAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan daerah yang menggambarkan Visi, Misi, dan Arah pembangunan kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 -2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM KOTA MEDAN
BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA
BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA JANGKA PANJANG
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 20 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan kota yang memerlukan langkah – langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006 – 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

WALIKOTA MEDAN
PENJABAT

DRS. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si

Diundangkan di MEDAN
Pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

DRS.H. DZULMI EDLIN S, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR 8

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I - 1
I.1. Latar Belakang I - 1
I.2. Pengertian RPJP Daerah I - 2
I.3. Maksud dan Tujuan I - 2
I.4. Landasan Hukum I - 2
I.5. Hubungan RPJP dengan Dokumen Lainnya I - 3
I.5. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) I - 3

BAB II KONDISI UMUM KOTA MEDAN II - 1
II.1. Kondisi Umum dan Analisis II - 1
II.2. Modal Dasar II - 31
II.3. Prediksi Kondisi Umum II - 36

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA III - 1
III.1 Umum III - 1
III.2 Visi Dan Misi III - 1
III.3 Tujuan Pembangunan Kota III - 5

BAB IV ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA JANGKA PANJANG IV - 1
IV.1. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Tangguh Dan Dinamis IV - 1
IV.2. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berilmu Pengetahuan, Menguasai Teknologi, Beriman Dan Bertaqwa Serta Mandiri IV - 8
IV.3. Mewujudkan Prasarana Dan Sarana Kota Yang Modern, Handal Dan Berwawasan Lingkungan IV - 16
IV.4. Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Dan Religius Melalui Pembangunan Kota Yang Berkeadilan IV - 33
IV.5 Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah IV - 39

BAB V PENUTUP V - 1

LAMPIRAN

BAB I
P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Selain kebutuhan administratif, berbagai alasan dan latar belakang yang berdimensi politis, philosofis, teknis, sosial, geografis, demografis bahkan physikologis, menjadi dasar dibentuknya Kota Medan sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah otonom, Kota Medan dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Sebagai daerah otonom dengan status Kota Metropolitan, pembangunan kota bertujuan menjadikan kota lebih baik di berbagai sektor, khususnya sektor jasa perdagangan, keuangan, dan industri, untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan warga kota secara merata, yang ditandai oleh peningkatan daya beli, investasi, pengeluaran Pemerintah Kota dan net - eksport secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi dan peran penting Pemerintah Kota adalah sebagai enterpreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi munculnya kreativitas, inovasi berbagai elemen pembangunan kota untuk membangun Kota Medan, sebagai Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius, dalam jangka menengah dan atau Kota Medan yang Maju, Sejahtera, berkeadilan dan religius dalam jangka panjang.

Mengingat kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kota yang sangat stratejik, maka penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kota, diarahkan untuk mengembangkan lapangan kerja, serta mencapai stabilitas ekonomi daerah. Oleh karenanya, pembangunan kota membutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan antisipatif.

Kebutuhan perencanaan kota ini dalam jangka panjang, disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan tahun 2006 - 2025, yang didasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebutuhan penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006 - 2025 adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan stratejik Kota Medan, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang disusun bersifat makro dan stratejik, dengan materi pokok yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang kota, serta merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025, dan rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara tahun 2005 - 2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025, diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan kota sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Untuk itu, pengalaman pembangunan kota, khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir (2001 - 2005), merupakan pembelajaran pembangunan kota yang sangat berharga untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, secara komprehenshif, integratif, simultan, dan proyektif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006 - 2025 disusun secara aspiratif, sehingga selaras dengan potensi, masalah dan tantangan pembangunan kota 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, di samping melalui proses teknokratik, RPJP Kota Medan juga disepakati melalui forum konsultasi publik yang diantaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Kota Medan, yang diikuti seluruh stakeholder pembangunan kota, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan.

1.2. Pengertian RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

I.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai model yang lebih bersifat perencanaan stratejik, maka penyusunan dan penetapan RPJP Kota Medan tahun 2006 - 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006 - 2010, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2006 - 2010, di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang, dan maksud penyusunannya, maka tujuan umumnya adalah:
1. Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan kota.
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kota, maupun antar Pusat dan Propinsi dengan Kota Medan dan antar Pemerintah Kota - Swasta - Masyarakat.
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan kota.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJP Kota Medan tahun 2006 - 2025, memiliki kedudukan stratejik sebagai acuan bagi seluruh komponen pembangunan kota, (Pemerintah – DPRD - Masyarakat - Swasta - Press) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kota yang ditetapkan secara bersama. Untuk itu, seluruh proses pembangunan kota dapat sinergis, terkoordinasi secara vertikal, maupun horizontal berdasarkan pola pikir, sikap dan perilaku bersama dari seluruh stakeholder pembangunan kota.

I.4 Landasan Hukum

Untuk menjadikan RPJP Kota Medan tahun 2006 - 2025 memenuhi azas kepastian hukum formal maupun material, penyusunan dan penetapannya didasarkan kepada:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

I.5. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP Kota Medan Tahun 2006 - 2025, disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025.

Di samping itu, RPJP Kota Medan Tahun 2006 - 2025, juga disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tujuan pembangunan kota dalam jangka panjang, berdasarkan rencana tata ruang kota yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk perencanaan kota yang bersifat stratejik, RPJP Kota Medan Tahun 2006 - 2025 berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota dalam jangka panjang, sampai tahun 2025.

I.6. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rasionalitas, konsepsi dan mekanisme penyusunan RPJP Kota Medan Tahun 2006 - 2025. Sebagai pengantar, bab I juga memuat maksud dan tujuan, dasar hukum, saling keterkaitan dokumen perencanaan, dan sistematika penyusunan RPJP.

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Medan

Berisi uraian input, analisis, dan output berbagai keadaan pembangunan kota seperti geomorfologi, lingkungan hidup, demografi, aspek ekonomi, sumber daya, sosial politik, prasarana dan sarana yang dimiliki dan yang diproyeksikan untuk 20 tahun ke depan, termasuk potensi dan faktor stratejik yang dimiliki.

Bab III : Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Medan;

Berisi kesepakatan stakeholder menyangkut visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Medan untuk 20 tahun ke depan.

Bab IV : Arah dan Tahapan Pembangunan Kota Jangka Panjang

Berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, dalam rangka: (1) Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis; (2) Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri; (3) Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modren, handal, dan asri; serta (4) Mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius, melalui pembangunan kota yang berkeadilan. Bab ini juga membahasan tahapan dan prioritas yang akan dilakukan pada masing-masing RPJM-D.

BAB V: Penutup

Berisi komitmen yang dibangun diantara seluruh stakeholder untuk mengimplementasikan RPJP Kota Medan Tahun 2006 - 2025, secara berdaya guna dan berhasil guna.

Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJP Kota Medan Tahun 2006 – 2025

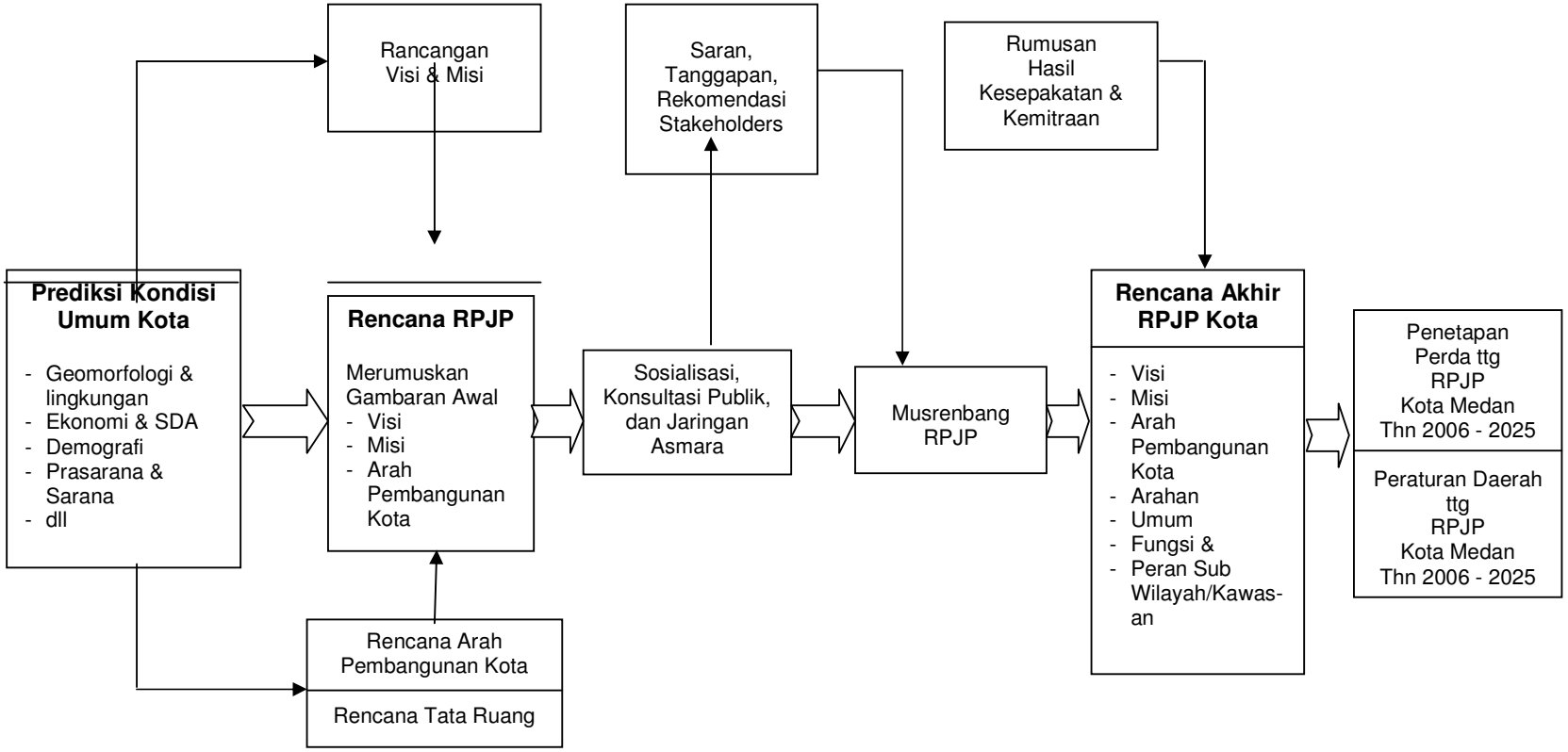

BAB II
KONDISI UMUM KOTA MEDAN

Proses pembangunan kota, khususnya setelah melalui fase krisis, (2000 - 2005) bila dicermati memiliki capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Berdasarkan indikator makro pembangunan kota yang dapat diamati, baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan rakyat diketahui bahwa berbagai keluaran, hasil, manfaat dan dampak pembangunan kota pada periode tersebut, cenderung cukup berarti bahkan dapat dianggap cukup efisien dan efektif, meningkatkan kesejahteraan warga kota secara lebih merata.

Pembangunan ekonomi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dan kokoh, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota yang lebih tangguh dan dinamis pada masa yang akan datang. Di samping itu, kemajuan dan perubahan Kota Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir menjadi lebih baik, juga tidak terlepas dari kontribusi besar bidang pembangunan sosial budaya dan fisik/prasarana kota.

Namun demikian, di samping berbagai kemajuan yang dicapai, pembangunan kota juga tetap dihadapkan kepada masalah dan tantangan yang belum seluruhnya dapat diatasi, sehingga dipastikan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kota secara lebih sistematis, terintegrasi dan terpadu dalam 20 tahun ke depan.

II.1. Kondisi Umum Dan Analisis

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2000 - 2005), Kota Medan berubah sangat pesat ke arah kemajuan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara sosial ekonomi, Kota Medan semakin terbuka, yang ditandai oleh peningkatan arus barang, jasa, dan orang yang keluar masuk ke Kota Medan dengan berbagai tujuan. Secara demografis dan budaya, Kota Medan saat ini memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, (2 juta jiwa lebih), dengan kemajemukan budaya, suku dan agama. Secara fisik, Kota Medan tumbuh dan berkembang dengan berbagai fasilitas prasarana dan sarana perkotaan yang semakin lengkap. Demikian juga secara politis, Kota Medan berkembang dengan masyarakat yang semakin terbuka dan demokratis.

Namun demikian, disadari pembangunan Kota Medan dalam 20 tahun ke depan juga akan menghadapi masalah dan tantangan yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang lebih baik dan kuat, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Medan yang maju, sejahtera, religius, dan berwawasan lingkungan hidup, dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.

Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025, disusun berdasarkan kondisi masalah, tantangan dan potensi Kota Medan yang dimiliki serta arah dan proyeksi perkembangannya dalam 20 tahun ke depan.

II.1.1. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

a. Sebagai salah satu pusat perekonomian daerah dan regional yang penting serta utama di pulau Sumatera sekaligus salah satu Kota Metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun regional/internasional di kawasan barat Indonesia. Kota Medan memiliki luas lebih kurang 265,10 km², relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain dan kota-kota lain di sekitarnya, yaitu hanya meliputi 3,60% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Labuhan memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 3.667 Ha, sedang kecamatan Medan Sunggal merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 298 Ha. Secara astronomis terletak pada posisi koordinat 2°27' - 2°47' Lintang Utara dan 98°35' - 98°44' Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah dengan topografi yang cenderung miring ke utara dan menjadi tempat pertemuan dua sungai penting yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah administrasi pemerintahan di tingkat kota, Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, 151 Kelurahan, dan 2000 Lingkungan, (**lihat gambar 2.1**).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Medan

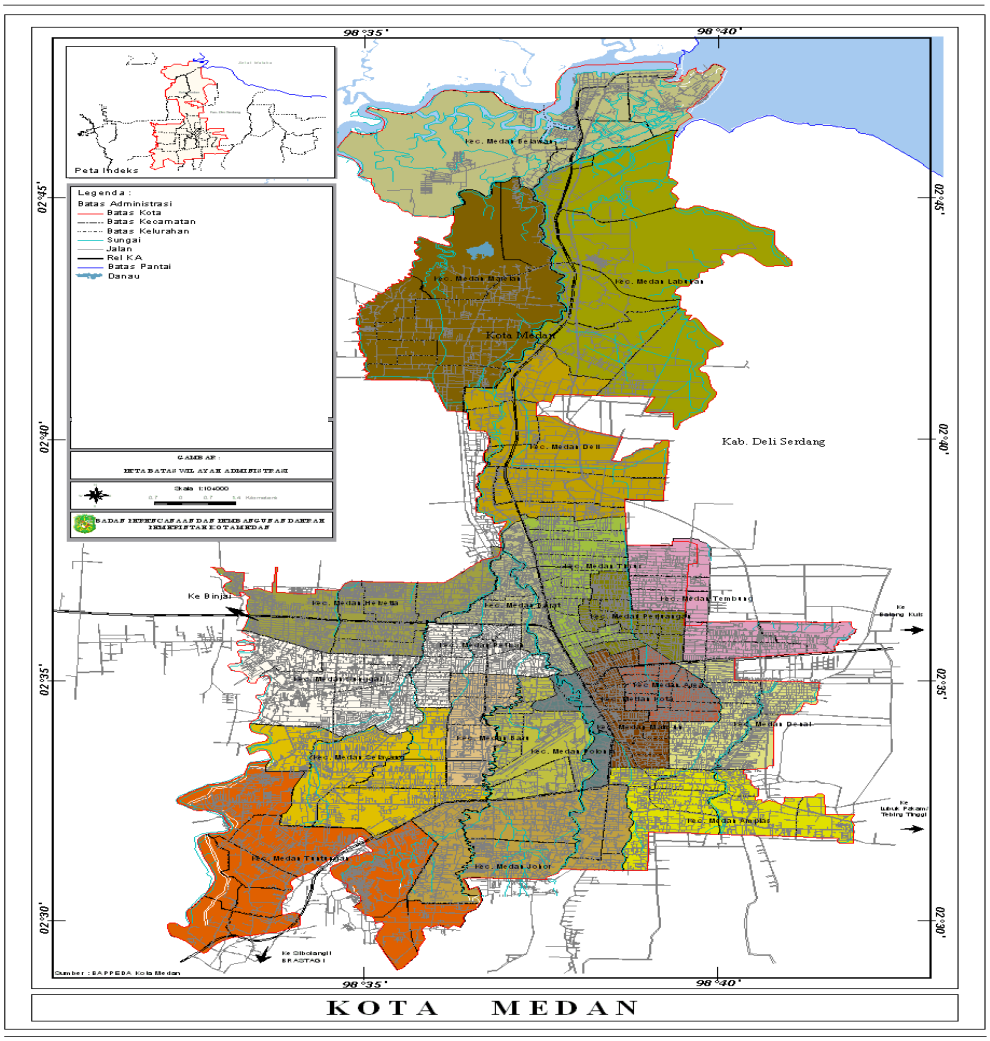

b. Letak geografis Kota Medan sangat strategis, sehingga melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Internasional Polonia, Kota Medan berkembang menjadi pintu gerbang bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan domestik maupun regional. Adanya dukungan prasarana dan sarana transportasi laut dan udara juga memungkinkan Kota Medan untuk berhubungan secara langsung dengan wilayah-wilayah lain di Sumatera Utara, Pulau Sumatera, dan Wilayah Nasional Indonesia, bahkan ke negara-negara tetangga. Kondisi tersebut menjadikan Kota Medan secara ekonomis mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya, terutama dengan berbagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka. Di samping itu, adanya Selat Malaka juga menjadikan Kota Medan memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan lebih baik.

   Sebagai wilayah yang dekat dengan kota-kota regional yang lebih maju, terutama yang berada di negara – negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, pada masa yang akan datang Kota Medan akan menghadapi kompetisi yang semakin meningkat khususnya di bidang ekonomi. Namun demikian, di sisi lain dengan letak strategis yang dimilikinya, Kota Medan juga sangat potensial untuk mengembangkan kerjasama regional yang lebih luas dengan kota-kota regional yang ada dalam wadah kerjasama ekonomi seperti IMT-GT, AFTA, APEC dan lain-lain. Hal ini sangat potensial mendorong perkembangan Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, transportasi laut, darat dan udara, perindustrian, keuangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya.

c. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat penting artinya dalam pengelolaan pembangunan kota. Pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dilakukan melalui kerjasama semua pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta), melalui program-program seperti Medan Bestari, Medan Kota Hijau, Medan Kota Langit Biru, Medan Kota Taman, Kota Hijau dan Program Kali Bersih seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia dengan perencanaan, pemafaatan, dan pengendalian tata ruang yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan di Kota Medan berbasis pada kebersihan lingkungan secara fisik, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran udara dan air. Permasalahan lingkungan tersebut, diupayakan penyelesaiannya melalui perbaikan pengelolaan sampah, penanaman/penggantian tanaman pada ruang-ruang terbuka seperti taman kota dan tempat rekreasi, pemantauan tingkat pencemaran udara dengan adanya Laboratorium Udara Kota Medan, dan untuk pencemaran air dengan memanfaatkan 3 (tiga) buah laboratorium rujukan.

   Sebagai gambaran umum, maka capaian kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup sampai saat ini dapat disajikan sebagai berikut:
   - Persentase penangganan sampah yaitu volume sampah yang ditangani mencapai 70,8% dari total volume produksi sampah di Kota Medan
   - Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dimana sudah seluruh perusahaan melaksanakan wajib AMDAL dengan jumlah perusahan yang diawasi sebanyak 19 perusahaan
   - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) yaitu jumlah daya tampung TPS yang ada mencapai 0,28% dari perkiraan jumlah penduduk Kota Medan saat ini sebesar 2.083.156 jiwa
   - Penegakan hukum lingkungan seluruhnya telah ditangani, dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 19 kasus.

   Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) sistem

door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui sarana container. Secara operasional pengelolaan pelayanan persampahan didukung oleh prasarana sarana persampahan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Prasarana Dan Sarana Persampahan Di Kota Medan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Becak Sampah	385
2	Container Sampah	90
3	Compactor Truck	30
4	Armroll Truck	14
5	Tipper Truck	90
6	Truck Tinja	7
7	Bulldozer	5
8	Excavator	1
9	Wheel Loader	3
10	Pick-Up	11

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Medan Tahun 2007

Melalui dukungan prasarana dan sarana persampahan yang tersedia saat ini diketahui bahwa dari 4.730 m^3 jumlah timbulan sampah setiap hari yang diproduksi dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat maka sebanyak 4.588 m^3 dapat diangkut sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sebagai salah satu prasarana dan sarana persampahan yang vital, Kota Medan saat ini didukung oleh 2 (dua) TPA yaitu TPA Namo Bintang (luas 176.392 m^3) dan TPA Terjun (luas 137.563 m^3). Kedua TPA ini masing-masing menampung 50 persen sampah terangkut setiap harinya.

Mengingat kapasitas dari kedua TPA tersebut semakin terbatas, sedang sistem pengolahan sampah sampai saat ini masih konvensional maka salah satu kebutuhan utama pengembangan aspek teknis operasional persampahan dalam jangka menengah dan panjang adalah penambahan ketersediaan TPA yang bersifat regional, di samping juga penataan dan penambahan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

d. Sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kenderaan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai 781.038 unit pada tahun 2005, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik pembakaran secara terbuka maupun dengan menggunakan kompor atau alat masak. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan pengujian dan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor di Kota Medan, dan peralatan pendeteksi pencemaran udara.

e. Kota Medan merupakan kota yang secara geografis rawan banjir. Penyebabnya adalah posisi Kota Medan yang secara geografis berada pada ketinggian 2,5 – 50 m di atas permukaan laut, serta dilalui oleh banyak sungai yang mengalir (sungai belawan, deli, kera, dan sungai percut serta sungai tuan), dan juga kondisi sungai yang sebahagian besar rusak. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya singkronisasi dan keterpaduan rencana tata ruang antar daerah. Banyak lokasi yang semestinya oleh

suatu daerah diharapkan diperuntukkan untuk daerah resapan air, tetapi digunakan untuk pemanfaatan lain oleh daerah lain terutama di daerah hulu DAS sungai. Di samping itu, banjir juga disebabkan karena badan-badan air semakin menyempit, akibat tumbuhnya bangunan liar di atas bantaran sungai, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari sungai.

Pada dasarnya untuk menampung dan mengalirkan curah hujan yang terjadi ke sistem sungai, telah ada saluran drainase sekunder maupun tersier yang menghubungkannya dengan saluran primer, namun akibat penyempitan dimensi saluran karena sedimentasi lumpur dan sampah, saluran drainase dalam kondisi saat ini tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air hujan yang ada secara keseluruhan, sehingga menyebabkan munculnya titik-titik banjir di berbagai kawasan di Kota Medan. Dengan demikian, banjir di Kota Medan merupakan masalah lingkungan yang tidak mudah untuk dipecahkan, walaupun upaya penanggulangannya sudah dan terus dilakukan setiap tahun sehingga memerlukan koordinasi dan penanganan terpadu, s konprehensif secara regional.

f. Pemukiman liar dan kumuh merupakan masalah lingkungan yang belum sepenuhnya bisa dihindari, karena semakin mahal dan terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemukiman, sedangkan kemampuan masyarakat untuk memiliki lahan yang lebih layak masih terbatas. Pemukiman liar yang terdapat di Kota Medan umumnya berlokasi di bantaran sungai dan rel kereta api. Berdasarkan data yang ada pada saat ini terdapat sedikitnya 50 kawasan yang dianggap kumuh di Kota Medan (**lihat Gambar 2.2**) .

   Penduduk yang tinggal, umumnya pendatang dari luar Kota Medan, yang berusaha mencari penghidupan di Kota Medan. Sedangkan pemukiman kumuh yang tidak liar banyak dijumpai pada masyarakat yang berpenghasilan lebih baik, karena mereka mampu tinggal di kawasan pemukiman normal, hanya saja daya beli mereka tidak cukup baik, sehingga tidak mampu tinggal di kawasan yang lebih baik. Kawasan kumuh yang tidak liar ini sebahagian besar tersebar di kawasan Medan Utara terutama yang dihuni oleh perumahan nelayan.

   Sebagai gambaran umum maka kondisi capaian kinerja penyelenggaran urusan perumahan dan permukiman sampai saat ini dapat disajikan sebagai berikut:
   - Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh mencapai 3,32% dari total luas wilayah Kota Medan (26.510 Ha)
   - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, mencapai 68,40% dari total jumlah rumah tangga yang diperkirakan mencapai 470.481 KK.
   - Rasio rumah layak huni, mencapai 86,7%

Gambar 2.2 Peta Persebaran Kawasan Kumuh Kota Medan

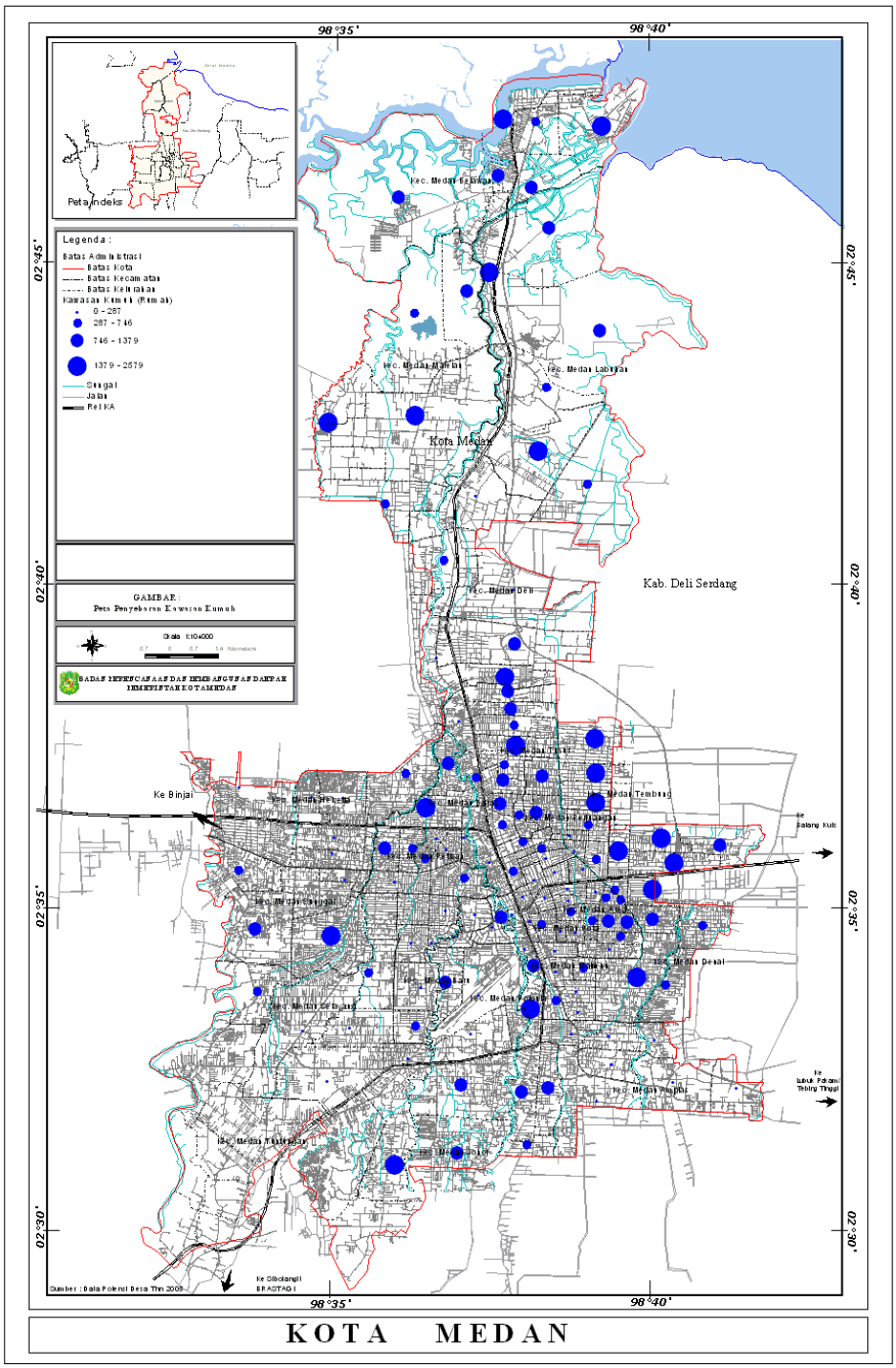

II.1.2. Demografi

a. Penduduk Kota Medan terus berubah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan juga migrasi. Pertumbuhan penduduk Kota Medan selalu menunjukkan nilai yang positif, hal ini disebabkan lebih besarnya angka kelahiran (*fertilitas*) dibandingkan dengan angka kematian (*mortalitas*), selain adanya perpindahan penduduk ke Kota Medan. Selama periode 1993-1999, penduduk pertengahan tahun Kota Medan mengalami peningkatan sebesar 1,46% yaitu dari 1.824.900 jiwa di tahun 1993 menjadi 2.020.100 di tahun 1999.

b. Penduduk Kota Medan periode tahun 2000 - 2004 cenderung mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mengalami peningkatan dari 71,83 jiwa/ha pada tahun 2000 menjadi 75,67 jiwa/ha pada tahun 2004 dan pada tahun 2025 diperkirakan menjadi 95,35 jiwa/ha (**lihat Tabel 2.1 dan Gambar 2.3**). Berdasarkan struktur penduduk tahun 2004, proporsi penduduk kelompok umur 20 - 39 sebesar 37,31%, diikuti 40 - 59 tahun sebesar 17,89%, kelompok usia 0 - 19 tahun mencapai 8% dan 60 tahun ke atas 6,80%. Penduduk menurut jenis kelamin, di tahun 2005 didominasi oleh perempuan yang berjumlah 1.024.145 jiwa atau 50,3% dari total jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.021.040 jiwa atau 49,7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Medan Deli, sedang wilayah dengan jumlah penduduk terkecil Kecamatan Medan Baru. Komposisi penduduk Kota Medan saat ini cenderung menuju ”penduduk tua”. Di samping itu, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi tahun 2004 telah mencapai 10,25% dari total jumlah penduduk.

Tabel 2.2
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Medan Tahun 2000, 2004 dan 2005

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/ Ha)		
			2000	2004	2005	2000	2004	2005
1	Medan Tutungan	2.068	68.890	68.438	68.738	33,31	33,09	33,24
2	Medan Selayang	901	101.889	81.035	82.598	113,08	89,94	91,67
3	Medan Johor	1.281	85.043	108.911	111.354	66,39	85,02	86,93
4	Medan Amplas	1.458	129.298	104.455	107.851	88,68	71,64	73,97
5	Medan Denai	1.119	127.484	133.742	135.527	113,93	119,52	121,11
6	Medan Tembung	409	115.843	135.188	137.146	283,23	330,53	335,32
7	Medan Kota	799	87.002	82.901	82.940	108,89	103,76	103,80
8	Medan Area	905	45.472	108.317	108.345	50,25	119,69	119,72
9	Medan Baru	584	41.517	42.221	42.789	71,09	72,30	73,27
10	Medan Polonia	552	41.610	49.048	50.426	75,38	88,86	91,35
11	Medan Maimun	527	73.961	47.137	47.057	140,34	89,44	89,29
12	Medan Sunggal	298	106.652	106.759	107.949	357,89	358,25	362,24
13	Medan Helvetia	1.544	125.593	136.216	138.297	81,34	88,22	89,57
14	Medan Barat	682	63.334	77.839	77.791	92,87	114,13	114,06
15	Medan Petisah	1.316	78.087	66.073	66.926	59,34	50,21	50,86
16	Medan Timur	533	107.059	110.492	111.282	200,86	207,30	208,78

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/ Ha)		
			2000	2004	2005	2000	2004	2005
17	Medan Perjuangan	776	93.810	99.580	101.694	120,89	128,32	131,05
18	Medan Deli	2.084	126.487	141.787	143.907	60,69	68,04	69,05
19	Medan Labuhan	3.667	93.012	100.184	102.656	25,36	27,32	27,99
20	Medan Marelan	2.382	93.849	112.463	116.716	39,40	47,21	49,00
21	Medan Belawan	2.625	92.121	93.356	94.196	35,09	35,56	35,88
Jumlah		**26.510**	**1.904.273**	**2.006.142**	**2.036.185**	**71,83**	**75,67**	**76,81**

Sumber : Medan Dalam Angka Tahun 2006

Gambar 2.3
Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2000-2004 s/d 2005

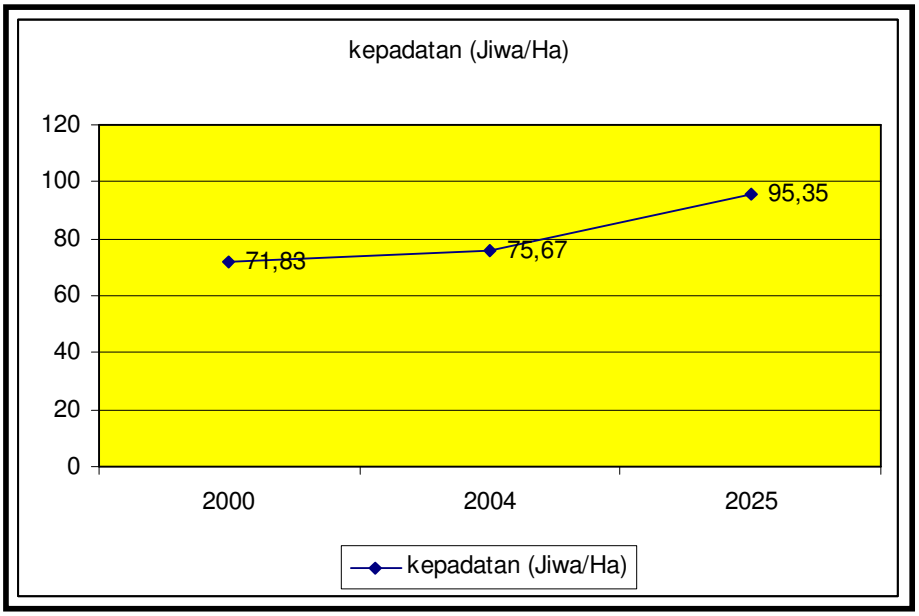

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Tahun 2005

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jiwa	Persen	Jiwa	Persen	
0-4	101.775	51,52	95.778	48,48	197.553
5-9	101.269	51,61	94.953	48,39	196.222
10-14	103.651	51,17	98.904	48,83	202.555
15-19	117.631	49,32	120.873	50,68	238.504
20-24	111.668	46,92	126.338	53,08	238.006
25-29	99.908	47,82	109.029	52,18	208.937
30-34	87.795	49,53	89.473	50,47	177.268
35-39	72.206	49,66	73.186	50,34	145.392
40-44	62.618	50,86	60.490	49,14	123.108
45-49	47.771	51,52	44.961	48,48	92.732
50-54	32.519	50,97	31.285	49,03	63.804
55-59	25.591	49,94	25.652	50,06	51.243
60-64	20.563	49,81	20.716	50,19	41.279
65 +	27.075	45,44	32.507	54,56	59.582
Jumlah	**1.012.040**	**49,7**	**1.024.145**	**50,3**	**2.036.185**

Sumber: Medan Dalam AngkaTahun 2006

c. Berdasarkan jenis dan lapangan pekerjaan dari angkatan kerja diketahui bahwa, saat ini sebahagian besar penduduk bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan (35,34%), diikuti lapangan pekerjaan jasa-jasa (20,38%), lapangan pekerjaan listrik, gas dan air minum, (16,92%), lapangan pekerjaan angkutan/komunikasi, (13,59%) dan lain-lain lapangan usaha sebesar (13,77%) (**lihat Gambar 2.4**).

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan sampai saat ini dapat disajikan sebagai berikut:

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 58,62% (853.562 jiwa) dari jumlah penduduk usia kerja (1.456.210 jiwa)
- Persentase pekerja yang ditempatkan yaitu jumlah pekerja yang ditempatkan mencapai 51,07% (12.985 jiwa) dari jumlah pekerja yang mendaftar (25.372 jiwa).

Gambar 2.4
Persentase Jenis Lapangan Pekerjaan di Kota Medan

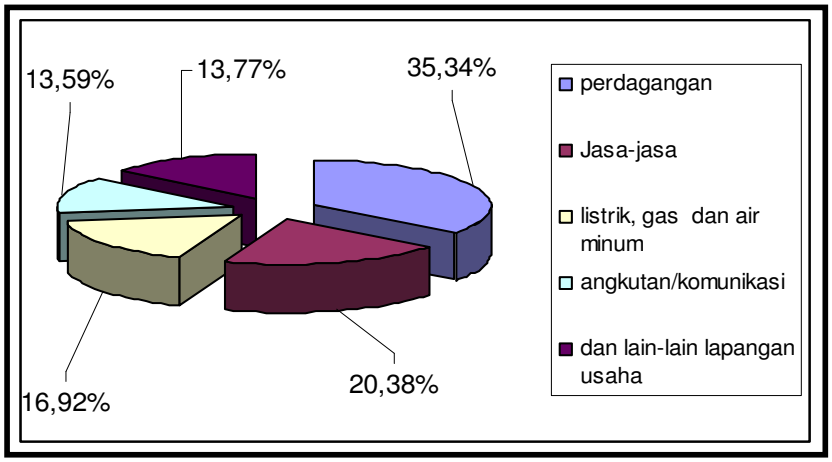

d. Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Dilihat dari jumlah etnis (suku bangsa), penduduk Kota Medan berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 memiliki jumlah etnis terbesar yang berasal dari Jawa (Betawi, Banten. Sunda, Jawa) sabanyak 33,03%, etnis Batak (Tapanuli/Toba) mencapai 19,21% dan Cina sebasar 10,65%. Dilihat dari agama yang dianut penduduk Kota Medan, Islam merupakan agama mayoritas penduduk, mencapai 63,83%, kemudian Kristen dan Katolik sebesar 21,02%, serta disusul Budha sebesar 10,40% (**lihat Gambar 2.5**). Jumlah penduduk Kota Medan yang mencapai 2 juta jiwa lebih, ditambah dengan commuter sebanyak 500.000 jiwa lebih pada tahun 2004, dan diproyeksikan mencapai 2,5 juta penduduk pada tahun 2025, merupakan beban pembangunan kota bila tidak ditangani secara terpadu dan efektif.

Gambar 2.5 Komposisi Agama Yang Dianut di Kota Medan

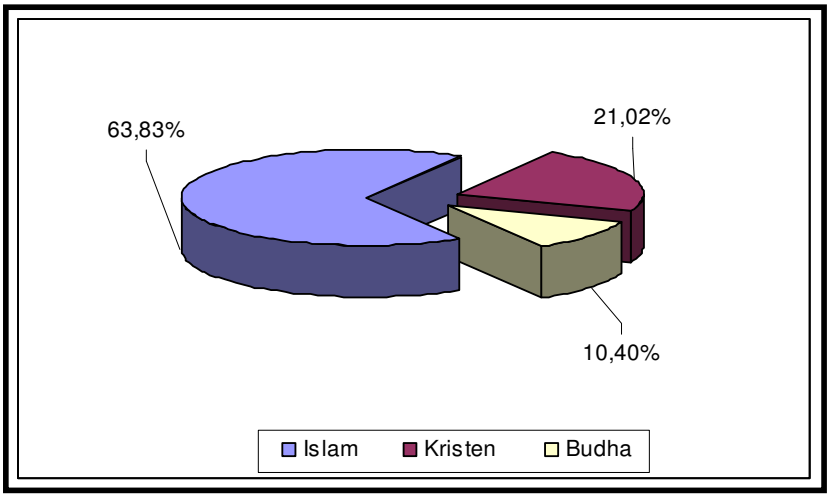

e. Tantangan kependudukan dalam 20 tahun mendatang adalah penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga mengarah kepada pertumbuhan penduduk seimbang, sekaligus peningkatan kesejahteraan penduduk dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2025 diharapkan kesejahteraan penduduk dapat meningkat secara bertahap, dengan income perkapita yang diproyeksikan menjadi sebesar Rp 48,99 juta.

f. Di samping itu, tantangan dalam bidang kependudukan juga menyangkut persaingan tenaga kerja akibat berlakunya perdagangan bebas dunia. Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja profesional dari daerah lain, bahkan dari negara lain mutlak diperlukan. Pengembangan pendidikan kejuruan dan profesionalisme serta balai latihan yang dapat menciptakan tenaga kerja siap pakai dan mampu beradaptasi dengan teknologi serta bahasa asing merupakan pra syarat yang harus dipacu dan dipenuhi secara cepat. Tingkat Melek huruf 99,3% pada tahun 2025 harus disertai dengan wajib belajar 12 tahun pada tahun 2025, sehingga jumlah tenaga sarjana maupun diploma dengan kemampuan akademis, praktis dan bahasa asing dapat terpenuhi. Kesiapan tenaga kerja ini tidak saja untuk mengisi pangsa pasar lapangan kerja di Kota Medan, tetapi juga untuk mengisi peluang lapangan kerja regional/international yang berimplikasi terhadap penambahan devisa.

g. Tantangan kependudukan lainnya adalah urbanisasi dan migrasi dalam bentuk perpindahan penduduk maupun arus commuter yang cenderung membesar. Kecenderungan ini memerlukan pemecahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, melalui pemerataan pembangunan

Sumatera Utara, pengembangan perekonomian pedesaan dan peningkatan peran kota-kota menengah dan kecil (*secondary city*), yang dapat dilakukan dengan konsep kemitraan pembangunan.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan kependudukan dan catatan sipil dapat disajikan sebagai berikut:

- Persentase kepemilikan KTP yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 80,69% dari jumlah penduduk wajib KTP saat ini sebesar 1.409.927 jiwa.
- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yaitu jumlah penduduk memiliki akta kelahiran mencapai 15,84% dari jumlah penduduk Kota Medan.

II.1.3. Tata Ruang, Prasarana, Dan Sarana

Perwujudan visi Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius, dan Berwawasan Lingkungan tercipta dalam suatu wadah keruangan yang asri, tempat terjadinya interaksi ekonomi dan sosial, yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang handal dan modern, serta memadai sehingga terbentuk lingkungan hidup kota yang nyaman dan layak huni. Secara umum kondisi saat ini, yang terbentuk sebagai potensi, tantangan maupun permasalahan kekinian mencakup :

a. Pergerakan penduduk selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengarah ke lingkar luar, dimana pertumbuhan >10% terjadi di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Johor, Medan Deli dan Medan Denai, sedangkan kawasan inti kota mengalami penurunan penduduk rata-rata 15%, sehingga melahirkan perubahan penggunaan pola lahan, pola lalu lintas, kebutuhan prasarana dan sarana. Hal ini belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kecepatan pembangunan wilayah lingkar luar, akibat belum selesainya pembangunan jalan lingkar luar, keterbatasan dana pembangunan kota, bentuk kota yang mengecil di tengah yang membuat fisik kota dan integrasi ruang serta pergerakan terbagi 2 (dua), di samping kerjasama lintas batas dan regional yang belum sepenuhnya mantap.

   Sedangkan pola penggunaan lahan berdasarkan ketentuan tata ruang yang dipergunakan saat ini terdiri dari 10 (sepuluh) jenis yaitu perumahan dan kegiatan terkait, lahan industri, lahan jasa, lahan perusahaan, sawah, kebun campuran, hutan rawa, tegalan, dan lahan kosong diperuntukan. Dimensi penting dari pola penggunaan lahan tersebut adalah konsistensi kebijakan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW.

b. Berdasarkan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Provinsi yang saat ini berlaku, terdapat setidaknya delapan peran utama skala nasional dan regional yang diemban Kota Medan seperti pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa regional, pusat pelayanan jasa pariwisata, pusat transportasi darat, laut dan udara regional, pendidikan tinggi, serta industri. Oleh karena itu, Kota Medan di samping berkedudukan sebagai pusat kegiatan nasional juga harus menyelenggarakan peran lainnya sebagai pusat kegiatan wilayah dan lokal. Implementasi dari fungsi dan peran tersebut adalah penyediaan ruang yang sangat beragam, dalam sistem yang terintegrasi, di tengah luas dan bentuk kota yang kurang ideal. Untuk itu perlu dipertimbangkan **upaya reposisi peran dengan pemilihan 3 (tiga) atau 4 (empat) peran utama saja** dan membagi peran lainnya ke wilayah hinderland dan kota-kota menengah di Sumatera Utara. Pembagian dan spesialisasi fungsi dan peran ini diharapkan dapat mengurangi laju urbanisasi dan peningkatan daya saing kota serta *positioning* dalam perekonomian regional, nasional, dan global.

c. Kemacetan di pusat Kota menjadi permasalahan yang sedang dihadapi, hal ini dipengaruhi pula oleh belum terbentuknya pusat-pusat pelayanan di tiap Kecamatan atau sub wilayah Kota dan belum terintegrasinya pusat Kota dengan Kota-kota satelit di

sekitar Kota Medan, sehingga intensitas penggunaan lahan pusat Kota menjadi sangat padat. Sumberdaya pusat Kota terserap cenderung melebihi daya dukung lahan yang dimiliki dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup, sehingga diperlukan pengembangan yang meluas dan kerjasama pembangunan regional Mebidang yang diperluas.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan tata ruang dapat disajikan sebagai berikut:

- Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB 124%.
- Rasio rumah ber IMB 45,99% dari total rumah yang diperkirakan saat ini berjumlah 465.218 unit.
- Tersedianya Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB dan RTRW .

d. Di bidang kelistrikan, yang merupakan kewenangan nasional melalui PT. PLN, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain masih besarnya kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan tenaga listrik, karena kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan tenaga listrik menurun seiring terpaan krisis ekonomi sebelumnya, sehingga berakibat pada terganggunya kesinambungan penyediaan tenaga listrik, lemahnya efektivitas dan efisiensi dengan tingkat losses kisaran 11 - 15%; masih besarnya ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak; serta masih dominannya peralatan dan material yang diimpor. Pemenuhan daya yang memadai secara merata, ditengah pertumbuhan kebutuhan yang sangat tinggi akibat pertambahan penduduk, perkembangan teknologi elektronik, modernisasi hidup dan perkembangan kegiatan Kota, menjadi permasalahan besar yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi terpadunya oleh Kota Medan.

Tabel. 2.4. Jumlah Sambungan, Daya Tersambung, Dan Enerji Jual Tenaga Listrik Di Kota Medan

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan (unit)	Daya Tersambung (KVA)	Energi Jual (MWH)
1	Sosial	4.912	46.266	66.074
2	Rumah Tangga	418.504	423.133	706.351
3	Bisnis	31.315	284.361	464.988
4	Industri	1.551	330.473	997.197
5	Publik	6.089	48.327	143.887
6	Multiguna			3.197
		462.371	1.132.560	2.381.694

Sumber: Statistik PT.PLN Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa sambungan terpasang sampai saat ini berjumlah 462.371 unit, dengan total daya tersambung sebesar 1.132.560 KVA dan energi jual sebesar 2.381.694 MWH. Berdasarkan daya terpasangnya diketahui juga bahwa pada masa yang akan datang sangat diperlukan peningkatan pembangkit listrik dan perluasan jaringan distribusi guna menyediakan kebutuhan energi listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas pelayanan yang lebih baik, dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

e. Di bidang lainnya, yang menjadi kewenangan Pemerintah atasan, terjadi penurunan kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan perkeretaapian regional, yang kondisinya memperihatinkan akibat krisis ekonomi. Kondisi ini mempengaruhi kelancaran arus barang dari dan ke wilayah pelayanan Kota Medan di Sumatera Utara dan Aceh. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kapasitas jalan kota menyebabkan adanya pertambahan kendaraan mencapai 45% persen selama

5 tahun terakhir, menimbulkan ketidakseimbangan persentase pertambahan jumlah kendaraan dengan persentase pertambahan jaringan jalan, yaitu 5 : 1.

Sebagai urat nadi perekonomian daerah, panjang jalan yang tercatat saat ini sepanjang 3.078,94 km, dimana 2.082,16 km diantaranya dalam kondisi baik, 389,80 km dalam kondisi sedang, dan 112,76 km dalam keadaan rusak, 1,35 km kondisi rusak berat, dan yang tidak terinci sepanjang 490,87 km. Mengingat status jalan yang ada terdiri dari jalan negara, propinsi dan kota maka tanggung jawab penambahan dan peningkatan kualitas jalan tidak saja ada pada Pemerintah Kota tetapi juga pada Pemerintah tingkat atasan.

Transportasi darat di Kota Medan juga didukung oleh jaringan perkeretaapian, bahkan sekaligus merupakan salah satu sarana angkutan yang penting di propinsi sumatera utara. Hal ini terlihat dari pemanfaatan sarana angkutan tersebut dalam pengiriman barang-barang dari stasiun Medan ke berbagai daerah secara regional, termasuk sebagai angkutan orang dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah. Fungsi perkeretaapian dalam mendukung roda perekonomian daerah selama tahun 2007 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Jenis Dan Jumlah Angkutan Kereta Api Melalui Stasiun Besar Medan

No	Jenis Angkutan	Jumlah
1	Tambang Minyak	158.415 ton
2	Pupuk	25.515 ton
3	Barang Lainnya	568.825 ton
4	Orang	1.901.331 jiwa

Sumber : PT. Kereta Api Tahun 2007

Pada dasarnya ada 5 (lima) rute yang dilayani angkutan kereta api yang ada, tetapi saat ini hanya 3 (tiga) rute yang masih dipergunakan yaitu rute ke Belawan, Binjai dan Tebing Tinggi. Oleh karena itu, selain kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan serta penambahan sarana dan fasilitas operasional, maka kebijakan yang diperlukan pada masa yang akan datang adalah membuka kembali rute angkutan kereta api yang tidak beroperasi yaitu rute ke Pancur Batu dan ke Deli Tua, termasuk ke Bandara Kuala Namu. Pengoperasian sistem angkutan kereta api ini sangat penting sebab alat transportasi tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi pengintegrasian ekonomi Kota Medan secara regional dengan daerah-daerah lainnya guna mendukung sistem produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa ke luar masuk dari dan ke Kota Medan.

Di samping transportasi darat, maka moda transportasi lain yang paling diminati masyarakat adalah transportasi laut dan udara. Transportasi laut lazimnya dipandang lebih murah sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat, sedang transportasi udara dikenal lebih cepat menjangkau tujuan tertentu. Seperti halnya angkutan laut, maka angkutan udara yang ada saat ini yaitu bandara polonia, melayani juga jalur angkutan baik domestik maupun internasional dengan berbagai kota tujuan. Namun demikian dengan adanya rencana pemindahan bandara polonia ke kuala namu, Kota Medan perlu segera mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkannya, terutama dari sisi perencanaan, seperti :

- Kebutuhan ketersediaan jalur akses ke bandara yang baru yang efisien dan tetap ekonomis
- Pergeseran mobilitas penduduk secara sosial ekonomi, dan
- Pemanfaatan yang tepat terhadap kawasan bandara polonia setelah perpindahannya.

f. Peran dan pelaku pembangunan prasarana dan sarana kota sampai saat ini masih bertumpu pada Pemerintah Kota dan Pemerintah atasan, sedang keterlibatan masyarakat dan mobilisasi dana masyarakat serta badan usaha masih belum optimal. **Rendahnya prasarana dan sarana lingkungan perumahan**, ditunjukkan oleh kondisi lingkungan dimana 20.683 gang rusak/sedang. Penurunan kemampuan prasarana lingkungan permukiman tersebut tentunya, tidak terlepas dari rendahnya perawatan dan pengembangan prasarana setelah dibangun. Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh **peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan prasarana yang telah dibangun, yang dinilai masih rendah**. Prasarana permukiman juga masih kurang secara kuantitas, seperti masih kurangnya penyediaan sarana air bersih, hanya tersedia di 158 lingkungan. **Kondisi jaringan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan penanganan dan perawatannya**. Kondisi saat ini sebenarnya relatif baik terutama pada inti kota. Sedangkan pada daerah lingkar luar kota, peningkatan jaringan jalan dan drainase telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran. Dari data yang ada, diketahui kondisi jalan yang ada saat ini terdiri dari : Kondisi baik sebesar 21,58 persen ; kondisi sedang 44,94 persen ; yang rusak dan rusak berat 33,48 persen (**lihat Gambar 2.6**). Hal tersebut menunjukkan, bahwa 44,94 persen jaringan jalan masih memerlukan peningkatan kualitas, berupa rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan 33,48 persen membutuhkan peningkatan kualitas, berupa pembangunan fisik. Kondisi tersebut juga terjadi dalam bangunan pendukung jaringan jalan seperti trotoar dan bahu jalan.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan tata ruang, sarana dan prasarana dapat disajikan sebagai berikut:

- Rasio ruang terbuka hijau yaitu luas ruang terbuka hijau mencapai 124% (8,128 Ha) dari luas wilayah ber HPL/HGB (6,628).
- Persentase luas lahan bersetifikat 24,42% dari total luas daerah Kota Medan.
- Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik yaitu panjang jalan kota dalam kondisi baik mencapai 66,29% (1.951 km) dari panjang seluruh jalan kota (2.951,38 Km)
- Persentase rumah tangga bersanitasi yaitu jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 0,28% dari jumlah total rumah tangga yang ada di Kota Medan yang diperkirakan berjumlah 470.481 Rumah Tangga
- Persentase kawasan kumuh yaitu luas kawasan kumuh mencapai 0,64% dari jumlah luas wilayah Kota Medan
- Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih yaitu jumlah rumah tangga pengguna air bersih mencapai 68,40% dari jumlah seluruh rumah tangga.
- Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh yaitu luas lingkungan permukiman kumuh mencapai 3,32% dari luas wilayah Kota Medan.
- Rasio rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni mencapai 86,7% dari jumlah seluruh rumah di wilayah Kota Medan.
- Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang mencapai 0,01% dari jumlah penumpang angkutan darat.

Gambar 2.6 Kondisi Jalan di Kota Medan Tahun 2007

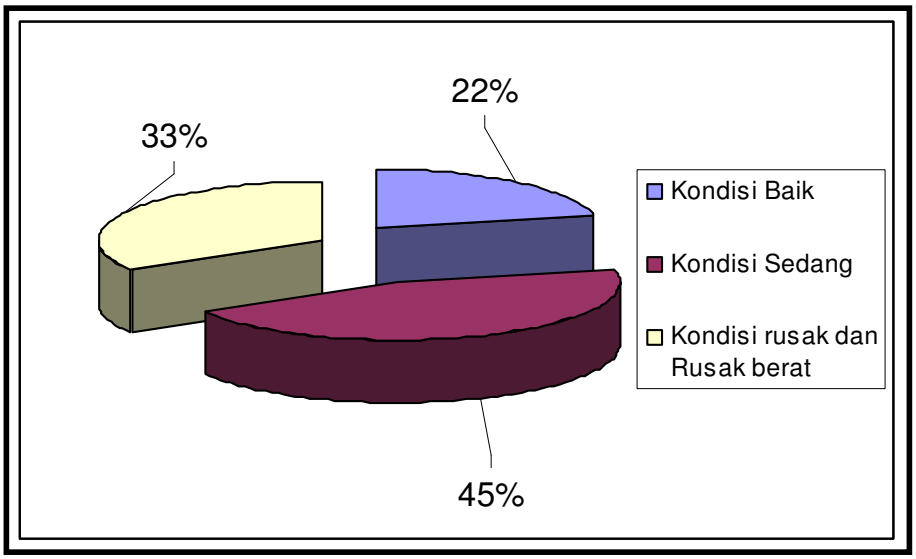

Di samping akibat relative masih panjangnya jaringan jalan yang rusak, kemacetan lalu lintas saat ini juga diakibatkan pertambahan jumlah kenderaan bermotor yang tidak seimbang dengan pertambahan volume jalan. Pertambahan kendaraan bermotor tersebut terutama pada kendaraan angkutan umum penumpang, sehingga pada saat ini jumlahnya telah mencapai 693 armada, dengan 240 trayek dan rata-rata rit perhari 4 – 10 rit. Load factor rata – rata pada waktu tidak sibuk sebesar 35%, dengan jam operasi selama 16 jam.

g. Sebagai Kota yang dipersiapkan untuk maju dan sejahtera, belum sepenuhnya memiliki prasarana dan sarana yang handal seperti pemadam kebakaran, sarana perdagangan, rekreasi, penanggulangan banjir, dsb. Frekuensi dan skala kebakaran di Kota Medan cenderung meningkat seiring pertambahan bangunan dan jenis kegiatan kota. Pada kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2005 kejadian kebakaran menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2003 terjadi 21 kejadian kebakaran skala besar dan 108 kebakaran skala kecil, sedang tahun 2005 meningkat menjadi 38 kejadian skala besar dan 110 kebakaran skala kecil (**lihat Tabel II.3**). Antisipasi perlu dilakukan dengan penambahan armada, jaringan hidran air yang terstruktur, armada pemadam untuk bangunan berlantai banyak, vertikal, dan sebagainya.

Tabel 2.6.
Banyaknya Kebakaran Yang Terjadi Dirinci Menurut Korban Jiwa Dan Material
Number of Fire by Victim of Fire and Material
Tahun 1999 – 2006

Tahun / Bulan *Year/Month*	Banyaknya Kebakaran *Fire*	Banyaknya Kebakaran *Victim of Fire*		Perkiraan Kerugian Material (Rp.000.-) *Suffer a Material Loss* (Rp)
		Meninggal *Death*	Luka-luka *Injury*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999	82	7	22	46.548.450
2000	105	2	2	12.751.800
2001	125	9	2	8.584.850
2002	154	3	94	23.497.850
2003	129	3	4	12.052.050
2004	142	10	1	19.835.700
2005	171	157	34	518.864.500
2006				
Januari/*January*	12	0	0	1.255.000
Februari/*February*	13	0	0	1.962.000
Maret/*March*	24	0	2	5.041.000
April/*April*	11	0	0	2.115.000
Mei/*May*	10	0	2	2.386.500
Juni/*June*	11	0	0	2.047.000
Juli/*July*	13	0	0	6.785.000
Agustus/*August*	19	0	2	2.888.500
September/*September*	14	8	0	3.255.000
Oktober/*October*	12	0	0	2.335.000
Nopember/*November*	33	0	1	28.044.500
Desember/*December*	5	0	1	2.071.000
Jumlah/*Total*	**177**	**8**	**8**	**60.185.500**

Sumber: Medan dalam angka tahun 2006

h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan kota dan perawatan jaringan lintas sektoral masih lemah, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun belum efisien dan efektif. Jalan yang baru diperbaiki harus digali untuk perbaikan jaringan air bersih, listrik atau telepon; sedangkan kawasan lindung yang harusnya dibatasi pembangunannya malah telah dilayani oleh prasarana air bersih, listrik dan telepon.

i. Pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana seringkali tidak dapat dilakukan secara baik, karena belum sepenuhnya didukung oleh penegakan hukum seperti disiplin lalu lintas, pemanfaatan badan dan bahu jalan untuk kegiatan yang dilarang, pembuangan sampah ke saluran drainase kota, uji emisi gas buang, penertiban permukiman di kawasan lindung, kendala pembebasan lahan akibat faktor politik dan hukum pertanahan, pengenaan sanksi pidana dan denda Perda yang masih lemah dalam aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

j. Perkembangan teknologi yang sangat pesat melahirkan banyak implikasi yang belum dapat atau sulit diantisipasi, karena tidak diprediksi sebelumnya seperti pola pemilikan kendaraan yang sangat meningkat, kebutuhan telekomunikasi dan penggunaan ruang udara yang sangat pesat, tuntutan daya saing penyediaan prasarana dan sarana modern

untuk mengimbangi kota-kota lain, meningkatnya sampah elektronik dan bahan non organik yang memerlukan teknologi penanganan khusus, dan dampak lainnya.

Di tengah-tengah kemajuan teknologi di berbagai bidang, salah satu yang cukup menonjol seiring dengan perkembangan Kota Medan sebagai kota metropolitan adalah lompatan pemanfaatan jaringan telepon sebagai sarana utama komunikasi dalam interaksi sosial ekonomi. Saat ini jaringan telepon khususnya yang difasilitasi oleh PT. Telkom telah meliputi hampir seluruh wilayah Kota Medan, baik melalui jaringan telekomunikasi kabel maupun telepon selular.

k. Permasalahan fisik keruangan yang tergambar dalam kondisi saat ini melahirkan berbagai tantangan yang harus dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program jangka panjangnya sampai tahun 2025. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana antara lain pendanaan, penyediaan energi, dan kewenangan yang masih terbatas pada beberapa aspek. Secara umum tantangan tersebut antara lain :

   a. Berdasarkan kedudukan geografis, demografis dan potensi yang dimiliki, Kota Medan akan terus berkembang secara fisik/prasarana, dan sosial ekonomi, bahkan diprediksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, regional, dan internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan dari aspek tata ruang adalah penataan pemanfaatan kawasan yang terintegrasi secara sosial ekonomi, sehingga efisien, efektif, ekonomis dan ramah lingkungan. Tata ruang yang tidak antisipatif, akan mendorong munculnya masalah-masalah tata ruang yang akut dan sulit diatasi, di samping munculnya masalah-masalah lain seperti migrasi, transportasi kota, perumahan dan properti, ruang publik dan masalah-masalah yang berdimensi sosial lainnya.

   b. Tantangan keterbatasan pendanaan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pendanaan pembangunan kota; meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui sinkronisasi, koordinasi dan perbaikan manajemen pemerintahan kota; serta meningkatkan kemitraan pembangunan dan mobilisasi dana-dana bantuan. Upaya peningkatan peran serta masyarakat, swasta maupun lembaga donor lainnya mutlak memerlukan penciptaan pemerintahan kota yang bersih dan *Good Governance* yang dilengkapi oleh pusat-data dan informasi yang komprehensif, dipercaya dan up to date.

   c. Tantangan kewenangan adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan baik pada instansi Pemerintah atasan maupun Pemerintah daerah wilayah sekitar antara lain dalam hal pengelolaan sumber air bersih, tempat dan teknologi pembuangan sampah, daerah aliran sungai, jaringan jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas tingkat regional, pengelolaan dan bagi hasil penggunausahaan pelabuhan laut Belawan, dan aset lainnya.

   d. Tantangan penataan ruang kota di tengah semakin tingginya kompetisi lahan yang melahirkan keterbatasan ruang pembangunan, permukiman kumuh, alih fungsi lahan yang kurang sesuai dengan norma/kaidah, kemacetan, polusi, dan permasalahan sosial perkotaan lainnya seperti penyediaan ruang-ruang publik, fasilitas sosial dan umum serta perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

   e. Relokasi Bandara Polonia menjadi tantangan yang cukup signifikan mempengaruhi perkembangan fisik kota. Akan tetapi bila hal tersebut telah terealisasi, tantangan menuju 20 tahun ke depan adalah bagaimana menarik investasi pembangunan *Central Bussiess District* (CBD) Polonia dan Belawan serta pengembangan kota-kota baru maupun pusat wilayah di sekitar pusat kota. Pembangunan pusat-pusat aktivitas

perkotaan dan permukiman tersebut, memerlukan upaya yang saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal seperti pembangunan jaringan jalan, angkutan umum massal dan sebagainya, sehingga menjadi tantangan ke depan yang perlu mendapat prioritas.

f. Tantangan lain yang harus diantisipasi dalam waktu dekat secara berkesinambungan adalah menyusun rencana tata ruang wilayah kota secara komprehensif, lengkap (dari makro hingga teknis) dan mampu memproyeksikan dan mengakomodir pola perubahan tata kehidupan dan teknologi yang harus diimplementasikan dalam tata ruang. Pola yang mungkin dapat digunakan adalah pengaturan zoning yang jelas disertai ketentuan flexible zoning yang transparan untuk dilaksanakan secara konsisten.

g. Pemerataan pembangunan prasarana dan sarana kota dan lingkungan dalam mendukung pengembangan sub pusat - sub pusat kota yang tersebar di kawasan Mebidang sebagaimana diarahkan dalam RTRW, memerlukan suatu upaya kerjasama regionalisasi yang menyeluruh dan sungguh-sungguh disertai swastanisasi sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan prasarana dan sarana.

h. Seiring meningkatnya pertambahan penduduk dan keragaman kegiatan kota, penanggulangan pencemaran lingkungan dan banjir merupakan tantangan pada masa datang yang memerlukan strategi yang terkait dengan berbagai aspek lainnya.

i. Kemampuan pembangunan kota juga sangat tergantung pada kondisi perekonomian nasional bahkan global, sehingga Kota Medan dengan dukungan wilayah sekitarnya harus membangun prasarana dan sarana serta penetapan peran yang jelas dalam persaingan global demi menciptakan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan. Krisis ekonomi yang mempengaruhi kemampuan penyediaan sarana dan prasarana, apabila kondisi tersebut tidak mengalami perbaikan dalam kurun waktu yang dekat, sangat potensial memunculkan disparitas antara penyediaan dengan kebutuhan dan disparitas antar kawasan/bagian wilayah kota yang semakin meningkat.

j. Tantangan pembangunan prasarana dan sarana dalam mendukung peningkatan perekonomian kota adalah menciptakan daya saing terhadap kota-kota di negara-negara tetangga. Pengembangan pelabuhan laut yang mampu melakukan bongkar muat peti kemas dan barang dengan kecepatan tinggi (10 jam/kapal), pelayanan pengangkutan bandara udara yang mampu melayani pesawat berbadan lebar dan memiliki jalur penerbangan internasional langsung, akan mampu mendukung keunggulan Kota Medan. Aspek pendukung yang terait adalah birokrasi perizinan bongkar muat barang ekspor maupun impor serta ketersediaan gudang penyimpanan di pelabuhan.

II.1.4. Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

a. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kota lebih leluasa memformulasikan kebijakan pembangunan kota. Namun, di sisi lain krisis yang melanda Indonesia yaitu mulai pertengahan tahun 1997, masih mempengaruhi segenap aspek kehidupan sosial ekonomi warga kota sampai saat ini. Krisis moneter yang memicu krisis ekonomi mulai terasa melanda dunia sejak awal tahun 1997 dan secara cepat melanda kawasan Asia, termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Krisis ini ditandai dengan merosotnya nilai rupiah secara tajam dibandingkan mata uang asing terutama dollar AS, sehingga berdampak kepada melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menjadi minus yang berpengaruh pada penurunan aktivitas sektor riil, meningkatnya pengangguran, membengkaknya kegiatan sektor informal dan menurunnya tingkat

keamanan serta ketertiban umum. Krisis ekonomi pada akhirnya berdampak pada terjadinya krisis sosial, yang ditandai dengan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan penegakan hukum.

b. Sejak diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan diperkenalkannya konsep Kota Sehat, kedudukan dan peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi sangat diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi dinilai berkorelasi positif dengan kapasitas sumberdaya alam. Namun, pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak efesien dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, akan mengakibatkan pengurangan sumber daya alam secara tidak terkendali dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Di bidang lingkungan, prakiraan dampak lingkungan yang ditimbulkan baik akibat proses alamiah maupun akibat aktivitas manusia akan mempengaruhi beberapa komponen lingkungan diantaranya air, udara, tanah, flora dan fauna. Oleh karenanya, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam 20 tahun mendatang adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola serta memelihara sumber daya alam khususnya kawasan pesisir (lingkar luar) secara berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan agar masyarakat tetap memperoleh kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, adil dan berkelanjutan.

c. Perekonomian Kota Medan yang diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993 sepanjang tahun 2000 - 2004 secara umum menunjukkan kenaikan yang konstan. Pada tahun 2004, PDRB Kota Medan (Atas Dasar Harga) ADH Berlaku mencapai Rp. 26.379.403.230.000,- mengalami peningkatan sebesar 17,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini cenderung semakin baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Ini berarti semua sektor berkembang sesuai dengan proses pembangunan di segala bidang. Adapun sektor ekonomi yang mengalami peningkatan adalah sektor pertanian naik 1,98%, sektor penggalian naik 9,31%, sektor industri naik 5,31%, sektor listrik, gas dan air naik 6,52%, sektor bangunan naik 12,96%, sektor perdagangan naik 5,65%, sektor angkutan naik 5,63%, sektor lembaga keuangan naik 3,38% dan sektor jasa naik 4,98%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan menurut PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.7**

Tabel 2.7.
PDRB Kota Medan Menurut Kelompok Sektor Tahun 2000-2004

PDRB	NO.	LAPANGAN USAHA	2000		2001		2002		2003		2004	
			Juta rupiah	%	Juta rupiah	%	Juta rupiah	%	Juta rupiah	%	Juta rupiah	%
ADH BERLAKU	**A.**	**Sektor Primer**	**575979.04**	**4.13**	**725189.43**	**4.23**	**814097.87**	**4.14**	**894623.57**	**3.97**	**1005833.74**	**3.81**
	1	Pertanian	573744.23	4.11	721783.76	4.21	810011.06	4.12	888269.18	3.94	998206.21	3.78
	2	Pertambangan dan Penggalian	2234.81	0.02	3405.67	0.02	4086.81	0.02	6354.39	0.03	7627.53	0.03
	B.	**Sektor Sekunder**	**4006916.10**	**28.71**	**5105491.98**	**29.78**	**5646629.22**	**28.72**	**6282596.85**	**27.87**	**7275159.32**	**27.58**
	3	Industri Pengolahan	2864148.34	20.52	3635095.45	21.20	3957938.12	20.13	4265965.28	18.92	4858052.89	18.42
	4	Listrik, Gas, dan Air Minum	414223.16	2.97	571815.49	3.34	674546.28	3.43	884195.38	3.92	1034912.60	3.92
	5	Bangunan dan Konstruksi	728544.60	5.22	898581.04	5.24	1014144.82	5.16	1132436.19	5.02	1382193.83	5.24
	C.	**Sektor Tersier**	**9375711.40**	**67.17**	**11314982.47**	**65.99**	**13199815.41**	**67.14**	**15364800.64**	**68.16**	**18098410.17**	**68.61**
	6	Perdagangan Hotel dan Restoran	5007711.66	35.88	6059152.73	35.34	6788650.51	34.53	7841083.41	34.78	9343861.13	35.42
	7	Pengangkutan dan Komunikasi	2018101.46	14.46	2433409.73	14.19	2916262.08	14.83	3419278.75	15.17	3968000.33	15.04
	8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	1330336.89	9.53	1560229.48	9.10	1830300.26	9.31	2163198.06	9.60	2508005.69	9.51
	9	Jasa-jasa	1019561.39	7.30	1262190.53	7.36	1664602.56	8.47	1941240.42	8.61	2278543.02	8.64
		PDRB	**13958606.54**	**100.00**	**17145663.88**	**100.00**	**19660542.50**	**100.00**	**22542021.06**	**100.00**	**26379403.23**	**100.00**
ADH KONSTAN 1993	**A.**	**Sektor Primer**	**320696.17**	**6.08**	**335734.03**	**6.05**	**358858.05**	**6.19**	**374957.92**	**6.15**	**382438.60**	**5.95**
	1	Pertanian	320107.65	6.07	335093.54	6.04	358156.08	6.18	374246.27	6.14	381660.73	5.94
	2	Pertambangan dan Penggalian	588.52	0.01	640.49	0.01	701.97	0.01	711.65	0.01	777.87	0.01
	B.	**Sektor Sekunder**	**1277818.44**	**24.23**	**1363335.90**	**24.57**	**1396270.71**	**24.08**	**1468915.88**	**24.11**	**1572594.57**	**24.48**
	3	Industri Pengolahan	789853.54	14.98	829044.78	14.94	833173.03	14.37	867180.62	14.23	913206.65	14.21
	4	Listrik, Gas, dan Air Minum	259689.31	4.92	273752.25	4.93	292001.85	5.04	315310.56	5.18	335854.81	5.23
	5	Bangunan dan Konstruksi	228275.59	4.33	260538.87	4.69	271095.83	4.67	286424.70	4.70	323533.11	5.04
	C.	**Sektor Tersier**	**3675586.60**	**69.69**	**3850383.27**	**69.38**	**4044093.31**	**69.74**	**4248539.61**	**69.73**	**4470008.29**	**69.57**
	6	Perdagangan Hotel dan Restoran	1558782.52	29.56	1590045.64	28.65	1651985.79	28.49	1711597.38	28.09	1808350.74	28.15
	7	Pengangkutan dan Komunikasi	973479.07	18.46	1062191.82	19.14	1126497.67	19.42	1208062.46	19.83	1276048.27	19.86
	8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	717971.33	13.61	763272.29	13.75	818568.66	14.12	862097.63	14.15	895558.59	13.94
	9	Jasa-jasa	425353.68	8.06	434873.52	7.84	447041.19	7.71	466782.14	7.66	490050.69	7.63
		PDRB	**5274101.21**	**100.00**	**5549453.20**	**100.00**	**5799222.07**	**100.00**	**6092413.41**	**100.00**	**6425041.46**	**100.00**

Sumber : Perhitungan Pendapatan Regional Kota Medan Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2005

d. Nilai PDRB Kota Medan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000 hingga 2004. Dari segi kontribusi sektoral, menurut PDRB atas dasar harga berlaku, sektor usaha perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kota Medan yaitu sebesar 35,42%, disusul oleh sektor usaha industri pengolahan sebesar 18,42%; pengangkutan dan komunikasi sebesar 15,04%; serta keuangan dan jasa perusahaan sebesar 9,51% (**lihat gambar 2.7**)

Gambar 2.7
Kontribusi Tiap Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Medan Tahun 2004

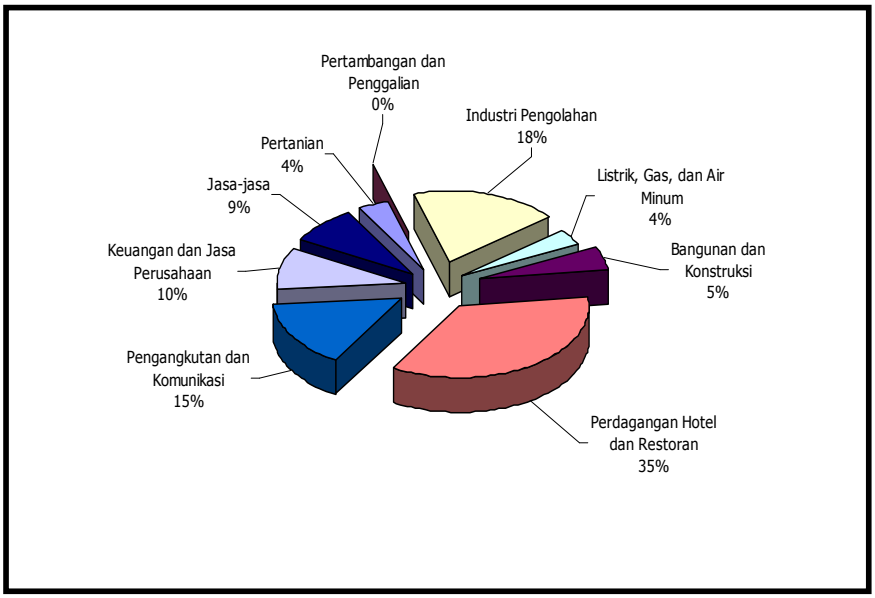

e. Sektor pertanian pada tahun 2004, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3,78%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,94%. Pada sektor pertanian ini, sub sektor perikanan memberikan sumbangan terbesar yaitu 2,35%, kemudian sektor peternakan 0,93%, dan terakhir sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 0,50%. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2004 tercatat sebesar 1,98%, turun jika dibandingkan dengan tahun 2003 yaitu sebesar 4,49%. Sektor pertanian di masa yang akan datang dihadapkan pada berbagai perubahan yaitu : (1) pembangunan pertanian dihadapkan kepada permasalahan permintaan produk pertanian terutama pangan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan penduduk, (2) kapasitas sumberdaya alam pertanian terutama lahan dan air yang terbatas dan bahkan semakin menurun sebagai akibat dari pembangunan kota yang mengarah pada sektor sekunder dan tertier, (3) berkembangnya sektor-sektor modern yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam orientasi pekerjaan dan modal, (4) adanya globalisasi yang mendorong semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan; (5) meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar *(market oriented policy)* dan (6) semakin berperannya selera konsumen *(demand driven)* sebagai akibat dari kemajuan ekonomi yang akhirnya akan menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan pertanian dapat disajikan sebagai berikut:

- Produksi padi per hektar yaitu produksi tanaman padi mencapai 4,57 ton/Ha dari luas areal tanaman padi yaitu sebesar 3811 Ha.
- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yaitu sebesar 2,85% terhadap total PDRB Kota Medan.

- Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk yaitu rata-rata jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg) mencapai 91.879/1000 orang dari jumlah penduduk di Kota Medan.

f. Kebijakan pembangunan kota yang sebelumnya kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan beberapa ekses negatif terhadap pembangunan kota, antara lain: menumpuknya kegiatan ekonomi di kawasan tertentu, terjadinya pertumbuhan kota yang tidak terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan; melebarnya kesenjangan pembangunan antara kawasan inti kota dengan kawasan lingkar luar, meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; masih banyaknya daerah-daerah miskin, relatif tingginya pengangguran, rendahnya produktivitas; kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kawasan dan antar sektor-sektor industri; dan tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian, yaitu dari 8.455 Ha tahun 2001, berkurang menjadi 6.116 Ha tahun 2003.

g. Situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif terutama pada saat krisis ekonomi juga telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Medan. Kurang bergairahnya iklim investasi juga disebabkan oleh keterbatasan daya saing produksi *(supply side)* dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur. Keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi yang pada gilirannya justru memperburuk daya saing produk-produknya. Investasi yang menurun tajam sejak tahun 1997 telah mulai menunjukkan perubahan yang menggembirakan pada tahun 1999. Selama periode tahun 2000-2004, investasi mengalami peningkatan dari Rp. 2,7 triliun menjadi Rp. 4,4 triliun. Dalam 20 tahun mendatang, pertumbuhan investasi akan terus didorong untuk menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang berkelanjutan. Prioritas investasi adalah investasi berdasarkan ekuitas (*equity based investment*), seperti penanaman modal asing dan investasi melalui pasar modal, dibanding investasi berlandaskan pinjaman. Selain itu prioritas investasi juga ditujukan bagi investasi-investasi pembangunan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, baik di sektor transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi, pemukiman dan sebagainya.

   Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal dapat disajikan sebagai berikut:
   - Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN yaitu realisai PMDN tahun 2007 dikurang realisasi PMDN 2006 mencapai 533,69 % dari Realisai PMDN 2006.
   - Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi yaitu jumlah aktif mencapai 49,27% dari jumlah seluruh koperasi yaitu sebanyak 1857 koperasi.

h. Selama periode 1993-1999, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 0,45%. Namun, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Medan atas dasar harga konstan 1992 pada periode yang sama cukup signifikan yaitu 16,27%. Dengan keunggulan komperatif yang dimiliki Kota Medan dan dukungan sumberdaya alam daerah hinterlandnya, industri yang ada di Medan dalam 20 tahun mendatang dikembangkan pada : (1) industri yang mengolah bahan baku menjadi produk yang berorientasi ekspor secara efisien dan rasional, (2) memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan (3) memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan industri dapat disajikan sebagai berikut:

- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB yaitu jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri mencapai 16,28% dari jumlah total PDRB Kota Medan
- Produktivitas sektor industri yaitu out put sektor industri mencapai Rp. 17,67 juta dari total tenaga kerja yaitu sebesar 729.892 tenaga kerja.
- Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor yaitu jumlah ekspor hasil industri mencapai 54,08 % dari jumlah total ekspor

i. Terintegrasinya pasar akan menimbulkan persaingan yang kuat diantara pelaku usaha. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara pelaku usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Tantangan ke depan UKMK untuk mampu bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal UKMK, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutama kewirausahaan (*entrepreneurship*), penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan Pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Pilihan strategi dan kebijakan untuk memberdayakan UKMK dalam memasuki era pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan UKMK sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan warga kota.

j. Sebagai pusat perdagangan, administrasi pemerintahan dan Kota wisata, Kota Medan terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen seperti Suku Melayu, Batak, Karo, Mandailing, Dairi, Nias, Simalungun, ditambah dengan suku-suku pendatang seperti China, Arab, Aceh, Jawa, Minang yang dapat hidup berdampingan secara damai. Adat istiadat berbagai suku bangsa dan berbagai corak etnis adalah merupakan adat dan budaya yang dapat dipromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 135.293 pengunjung tahun 2002 menjadi 97.738 pada tahun 2003 dan kembali meningkat menjadi 113.660 orang pada tahun 2004. Tantangan kepariwisataan Kota Medan dalam 20 tahun mendatang adalah (1) mempertahankan adat dan budaya lokal, (2) mempertahankan situs dan lokasi bersejarah, serta (3) mempertahankan ciri Kota Medan sebagai bagian dari lintasan sejarah bangsa, dan (4) menjadikan Medan sebagai pusat wisata belanja, dan MICE.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan perdagangan dapat disajikan sebagai berikut :

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan mencapai 25,44% (Rp. 14,1 Trilyun) dari jumlah total PDRB Kota Medan yaitu sebesar Rp. 55,4 Trilyun
- Ekspor bersih perdagangan yaitu nilai ekspor bersih mencapai US$ 4.130.489 dari nilai ekspor dikurang nilai impor.

Gambar 2.8
Perkembangan Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Medan Tahun 2002-2004

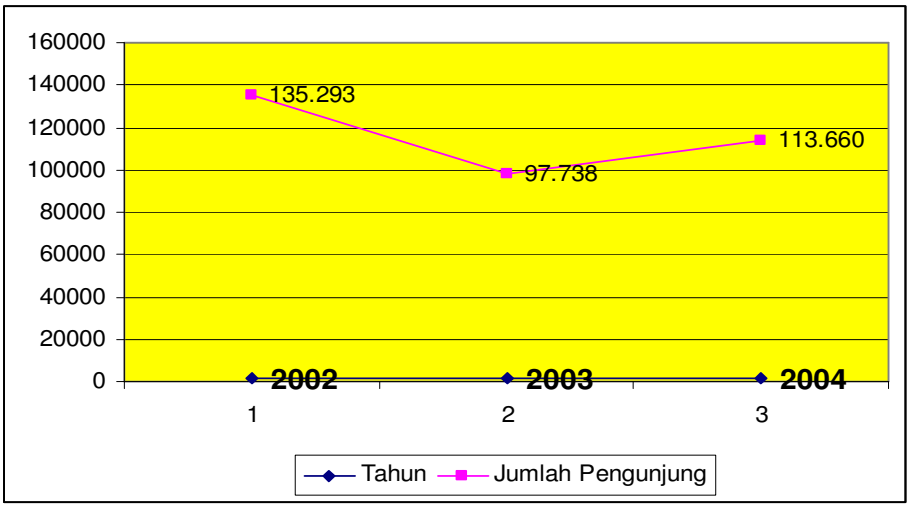

k. Pembangunan Kota Medan yang dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun menimbulkan dampak kesenjangan antar inti kota dengan wilayah lingkar luar. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses pembangunan fisik kota dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun Pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di pusat kota. Akibatnya, inti kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah lingkar luar (pinggiran) relatif tertinggal. Upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari lima tahun yang lalu, namun hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah lingkar luar.

II.1.5. Sosial Budaya dan Politik

a. Secara sosial, salah satu tantangan terberat dalam pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah terjadinya perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan budaya yang nampak pada kecenderungan sikap dan perilaku materialisme, individualisme, sekularisme, dan masalah-masalah sosial lainnya yang meningkat, sejalan dengan perkembangan Kota Medan yang maju dan arus globalisasi. Untuk itu perlu respon dan antisipasi sejak dini agar Medan berkembang **menjadi Kota Religius**.

   Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan sosial dan budaya dapat disajikan sebagai berikut:

   - Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya yaitu jumlah festival seni dan budaya sebanyak 17 kali, diantaranya dalam negeri sebanyak 11 kali dan luar negeri sebanyak 6 kali.
   - Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya yaitu jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 4 buah
   - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yaitu jumlah benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah mencapai 39,62% (42 buah) dari total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah (106 buah).
   - Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat di Kota Medan sebanyak 67 buah
   - Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu jumlah PMKS yang tertangani mencapai 23% dari jumlah PMKS yang ada

b. Di samping keberhasilannya, pembangunan kota yang dilakukan selama ini juga menimbulkan masalah sosial berupa tingginya pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama dalam kelompok masyarakat. Dari permasalahan di atas terlihat masih sangat minimnya indikator keberhasilan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu jumlah gelanggang/balai remaja di wilayah Kota per 1000 penduduk mencapai 0,0096% dari jumlah penduduk di Kota Medan.

c. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, iklim ketenagakerjaan mengalami goncangan yang sangat berat. Jumlah pengangguran cukup besar dari tahun ke tahun. Jumlah pengangguran terbuka walaupun menurun tetapi dalam jumlah yang kecil yaitu dari 13,44% di tahun 2003 menjadi 13,01% di tahun 2004. Di sisi lain, banyaknya pekerja yang bekerja di sektor formal yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Pekerja yang bekerja pada sektor yang kurang produktif dapat dilihat melalui banyaknya orang yang mencari kerja yaitu 173.500 orang pada tahun 2004. Sementara iklim ketenagakerjaan di masa depan dihadapkan pada tantangan menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Lapangan kerja yang akan diciptakan di masa yang akan datang diharapkan mempertimbangkan tingkat keterampilan pekerja yang tersedia kalaupun harus dilakukan upaya pelatihan tidaklah membutuhkan dana yang besar. Oleh karenanya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Medan dan dunia usaha, untuk terus mendorong kebijakan pasar kerja yang fleksibel. Berdasarkan data potensi kelurahan tahun 2003 diketahui jumlah pengangguran di Kota Medan mencapai 70.604 orang (Tabel II.5). Jumlah pengangguran ini merupakan penduduk yang telah memasuki usia produktif namun belum memperoleh kesempatan untuk bekerja pada sektor formal. Tingkat pengangguran terbesar terdapat di Kecamatan Tembung sebesar 23,86%.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan dapat disajikan sebagai berikut:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 58,62% dari jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun).
- Persentase pekerja yang ditempatkan yaitu jumlah pekerja yang ditempatkan mencapai 51,07% dari jumlah pekerja yang mendaftar.
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu pekerja perempuan di lembaga pemerintah mencapai 3,9% .
- Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 23,6%.
- Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 37,59%.

Tabel 2.8
Jumlah Pengangguran di Kota Medan

No.	Kecamatan	Banyaknya Pengangguran	Persentase
1	Medan Tuntungan	0	0
2	Medan Selayang	1019	1,44
3	Medan Johor	1278	1,81
4	Medan Amplas	4180	5,92
5	Medan Denai	754	1,07
6	Medan Tembung	16845	23,86
7	Medan Kota	4467	6,33
8	Medan Area	4371	6,19
9	Medan Baru	1887	2,67
10	Medan Polonia	243	0,34
11	Medan Maimun	1250	1,77
12	Medan Sunggal	1576	2,23
13	Medan Helvetia	9439	13,37
14	Medan Barat	0	0
15	Medan Petisah	1631	2,31
16	Medan Timur	4209	5,96
17	Medan Perjuangan	4409	6,24
18	Medan Deli	7543	10,68
19	Medan Labuhan	1116	1,58
20	Medan Marelan	4387	6,21
21	Medan Belawan	0	0
Jumlah		**70.604**	**100**

Sumber: Podes Kota Medan tahun 2006

d. Tingkat pemilikan pendidikan penduduk yang relatif masih rendah termasuk pada jenjang pendidikan tinggi, berpengaruh pula pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi, dan berdampak pada kurang berkembangnya teknologi, sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dinamika perubahan struktur penduduk berpengaruh pula pada pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan penurunan jumlah siswa SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa. Dengan demikian penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal yang didukung oleh pihak swasta terus dikembangkan, untuk dapat memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan pendidikan dapat disajikan sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak mencapai 22,28% dari jumlah anak usia 4-6 tahun.
- Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis mencapai 99,14% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yaitu sebesar 1.513.544 siswa.
- Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A yaitu jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD mencapai 114,80% dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yaitu sebesar 241.676 siswa.

- Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 100,87% dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 128.676 siswa.
- Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMA/SMK/MA/Paket C yaitu jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA mencapai 90,25% dari jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebesar 136.332 siswa.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI yaitu jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD mencapai 0,02% dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 277.604 siswa.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs yaitu jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP mencapai 0,05% dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 130.702 siswa.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA yaitu jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA mencapai 0,08% dari jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 127.366 siswa.
- Angka kelulusan (AL) SD/MI yaitu jumlah lulusan pada jenjang SD/MI mencapai 99,21% dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 85.405 siswa.
- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs yaitu jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs mencapai 96,63% dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 41.270 siswa.
- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA yaitu jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA mencapai 95,36% dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 41.143 siswa.
- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs yaitu jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs mencapai 107,01% dari jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 39.355 siswa.
- Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yaitu jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA mencapai 112,98% dari jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 39.935 siswa.
- Guru-guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yaitu jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV mencapai 75% dari jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang berjumlah 32.935 Guru.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan, baik dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, kualitas dan manajemen pendidikan sampai saat ini didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan baik yang berstatus negeri maupun swasta, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Prasarana Dan Sarana Pendidikan Di Kota Medan Tahun 2007

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	TK	290	21.299
2	SD	803	265.419
3	MI	44	12.185
4	SMP	345	117.455
5	MTs	67	13.247
6	SMA	197	80.739
7	SMK	134	41.796
8	MA	29	4.831

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan

Berdasarkan data prasarana sekolah tersebut di atas diketahui bahwa secara kuantitas, jumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar menengah secara relatif telah memadai namun bila diamati lebih jauh keberadaan sekolah-sekolah tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di berbagai kecamatan yang ada. Hal ini menyebabkan masih adanya anak usia sekolah di beberapa kecamatan yang masih sulit menjangkau pelayanan pendidikan yang tersedia. Di samping itu, akibat masih terbatasnya alokasi anggaran yang dapat disediakan dalam APBD Kota untuk urusan pendidikan maka masih banyak prasarana dan sarana sekolah yang kondisinya sudah rusak ringan/berat (SD/MI 34,94%, SMP/MTS 24,42%, SMA/MA/SMK 12,78%.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan juga masih dihadapkan kepada relatif rendahnya tingkat profesionalitas guru di berbagai jenjang pendidikan. Hal ini ditandai dengan masih adanya sebahagian guru yang kurang layak untuk mengajar di berbagai tingkat sekolah yang ditetapkan.

e. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar warga kota, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun kualitas kesehatan masyarakat Kota Medan telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi masih ada. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk terutama dari kelompok masyarakat miskin masih sering menjadi berita, begitu juga halnya dengan cakupan imunisasi pada golongan miskin adalah lebih rendah dari golongan kaya.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelenggaran urusan kesehatan dapat disajikan sebagai berikut:

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 23% (483 kasus) dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebesar (2.096 jiwa).
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yaitu jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 39.453 kasus (90,8%) dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (43.413 ibu bersalin).
- Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu jumlah Kelurahan UCI mencapai 96% dari jumlah seluruh Kelurahan di Kota Medan yang berjumlah 151 Kelurahan.
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan yaitu jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 8,7% dari jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama yang berjumlah 911 balita.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yaitu jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun mencapai 81,2% dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 3.178 penderita .
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yaitu jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun mencapai 100% dari jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama yaitu sebanyak 1917 kasus.
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yaitu jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 mencapai 46% dari jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Medan yang berjumlah 412.249 orang.
- Cakupan kunjungan bayi yaitu jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesesuaian standart di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 85,4% dari jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama yaitu sebanyak 41.346 bayi.
- Persentase jumlah Posyandu yaitu jumah Posyandu aktif mencapai 89,88% dari total posyandu yaitu sebanyak 1256 unit.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas dan manajemen kesehatan sampai saat ini didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan baik yang berstatus negeri maupun swasta, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Prasarana Dan Sarana Kesehatan Di Kota Medan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	1.256
2	Puskesmas Pembantu	41
3	Puskesmas	39
4	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
5	Rumah Sakit Umum Swasta	52
6	Rumah Bersalin Swasta	67
7	Praktek Dokter Umum	711
8	Praktek Dokter Spesialis	177
9	Praktek Dokter Gigi	245
10	Praktek Dokter Kelompok	16
11	Balai Pengobatan Swasta	276
12	Laboratorium	24
13	Apotik	438
14	Toko Obat Berizin	140

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan

Walaupun jumlah prasarana dan sarana pelayanan kesehatan saat ini sudah cukup memadai namun masih sering dirasakan kurang meratanya distribusi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut di masing – masing kecamatan yang ada, sehingga di beberapa kecamatan masyarakat masih mengalami kesulitan di dalam mengakses sarana pelayanan kesehatan yang ada secara mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Masalah dan tantangan peningkatan pelayanan kesehatan juga masih sangat dirasakan khususnya oleh keluarga kurang mampu terutama disebabkan masih terbatasnya pelayanan kesehatan rujukan tanpa bayar yang disediakan oleh pemerintah termasuk relatif masih mahalnya harga obat – obatan medis yang dibutuhkan.

Di samping itu, akibat masih rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat mampu terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia juga menyebabkan masih cukup besarnya masyarakat yang melakukan perawatan, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan keluar daerah bahkan keluar negeri seperti ke Malaysia, Singapore, Cina, dan lain-lain. Tantangan peningkatan derajad kesehatan masyarakat juga dihadapkan kepada masih banyaknya terjadi kejadian luar biasa di bidang kesehatan seperti DBD, HIV AIDS, Flu Burung, Diare dan beberapa penyakit menular lainnya.

f. Terpuruknya perekonomian akibat krisis moneter yang disusul dengan krisis politik yang berkepanjangan, yang tahap selanjutnya berdampak pada menurunnya kondisi tertib sosial telah mendorong terjadinya perubahan sikap mental dan prilaku warga masyarakat. Makna gerakan reformasi yang diperjuangkan pada beberapa hal, penafsiran dan aplikasinya cenderung menjadi kontra produktif. Bagi sementara pihak, reformasi diartikan bebas berbuat semaunya atau berperilaku seenaknya, tanpa mengindahkan lagi rambu-rambu hukum, tatanan nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku.

g. Pemilu tahun 2004 merupakan pesta demokrasi yang pertama kali secara langsung dilaksanakan, yang dikhawatirkan akan mengalami kerusuhan seperti prediksi pengamat politik baik dalam maupun luar negeri. Namun, berkat kerja keras KPU Kota Medan dan Aparat Pemerintah Kota Medan, mulai dari level Kepala Lingkungan sampai kepada jajaran yang lebih tinggi, disertai tingginya kesadaran warga Kota dalam pemilihan umum, seluruh prediksi tersebut tidak terbukti bahkan menunjukkan hasil yang diinginkan. Kondisi dan situasi pemilihan umum yang cukup kondusif tersebut tentunya harus diapresiasi dan berlanjut sampai ke pemilihan umum mendatang. Bahkan sudah selayaknya setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 dapat dievaluasi dan dicarikan solusinya, sehingga pelaksanaan pemilihan umum di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi. Terkait dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, Kota Medan telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan dilaksanakan pada tahun 2005, sukses memilih langsung Walikota dan Wakil Walikota Medan dengan situasi yang aman dan terkendali. Hal ini sebagai hasil dari komitmen warga Kota Medan terhadap Demokrasi Pancasila.

h. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dalam segala aspek dan bidang kehidupan, Pemerintah Kota Medan sebagai regulator, dan mediator dituntut untuk mengimplementasikan visi yang jelas dan terukur untuk membawa Medan sebagai kota yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Religius, khususnya di bidang pelayanan umum. Untuk itu, tantangan Pemerintah Kota Medan dalam 20 tahun ke depan adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik; peningkatan pelayanan umum; peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kerjasama regional serta internasional.

   Sebagai gambaran umum capaian kinerja penyelengaraan urusan bidang pelayanan umum dapat disajikan sebagai berikut:
   - Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai 80,69%.
   - Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk mencapai 15,84%.
   - Rasio jumlah pengunjung perpustakaan yaitu jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun mencapai 0,5% dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.
   - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 68,40%.
   - Rasio rumah ber IMB 45,99%.
   - Penerbitan formulir AK1 (Kartu kuning) bagi pencari kerja sebanyak 25.372 lembar.
   - Terlaksananya pelayanan medik peserta Askes sebanyak 7.608 pasien rawat inap dan 18.367 pasien rawat jalan.
   - Terlaksananya pelayanan medik pasien umum sebanyak 4.500 pasien rawat inap dan 96.699 pasien rawat jalan, dan
   - Sampah terangkut sebanyak 4588 m3

i. Tuntutan akan adanya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan peningkatan pelayanan publik merupakan sekumpulan permasalahan yang dihadapi pada masa-masa reformasi. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah sedikit dari sasaran pembangunan kota yang belum dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh: desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses desentralisasi masih memerlukan banyak perbaikan, untuk meredam dampak negatifnya akibat kurangnya pemahaman akan desentralisasi itu sendiri.

j. Demokratisasi sebagai buah dari reformasi dan desentralisasi juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat warga semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Namun demikian, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dan tanggung-jawab masyarakat pada masa yang lampau, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proses demokratisasi, utamanya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi

masyarakat menjadi tema sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tiadanya partisipasi masyarakat akan membuat aparatur pemerintahan tidak sepenuhnya mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan kota. Ketidaksiapan aparatur pemerintahan kota dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dapat mememenuhi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

k. Di sisi lain, arus globalisasi telah membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan kota. Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam bentuk *e-government, e-procurement,* dan *e-business* untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Medan dalam 20 tahun mendatang.

II.2. Modal Dasar

Dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang daerah, keseluruhan potensi pembangunan kota akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran Medan sebagai Kota Metropolitan yang maju, sejahtera, berkeadilan dan religius. Potensi pembangunan ini dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dipergunakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan pembangunan kota yang ada. Potensi pembangunan kota yang menjadi modal dasar pembangunan Kota Medan dalam 20 tahun mendatang meliputi:

a. Letak geografis yang sangat strategis. Secara geografis Kota Medan terletak pada koordinat 2^0 27'–2^0 47' Lintang Utara dan 98^0 35'–98^0 44' Bujur Timur. Kota Medan terletak di Pantai Timur Sumatera Utara dengan topografi cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan Kota Medan sebagai pintu gerbang Indonesia Bagian barat. Di samping sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Kota Medan memiliki posisi yang strategis sebagai gerbang (pintu masuk) yang mencakup kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun perdagangan luar negeri (ekspor - impor). Posisi geografis Kota Medan yang strategis ini diharapkan mendorong perkembangan kota dalam 3 (tiga) kutub pertumbuhan yaitu kawasan eks Bandara Polonia, Belawan, dan Kuala Namu, dalam 20 tahun ke depan.

   Di samping itu, letak geografis yang penting dan strategis Kota Medan dalam 20 tahun ke depan akan dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan sosial ekonomi, baik yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional. Hal ini sangat memungkinkan, sebab dengan dukungan SDA dari daerah hinterlandnya, melalui kebijakan industrialisasi yang tepat, Kota Medan dapat dikembangkan menjadi kota industri yang semi hight-tech/hight-tech. Selanjutnya, dengan tata letaknya yang strategis di antara kota – kota regional yang telah lebih dulu maju, Kota Medan dapat berkembang sebagai kota jasa perdagangan dan keuangan berskala regional dan internasional yang semakin pesat dalam 20 tahun ke depan.

Gambar 2.9
Peta Implikasi Globalisasi Dalam Pengembangan Wilayah di Asia Timur dan Asia Tenggara Terhadap Pengembangan Kota Medan dan Sumatera Utara

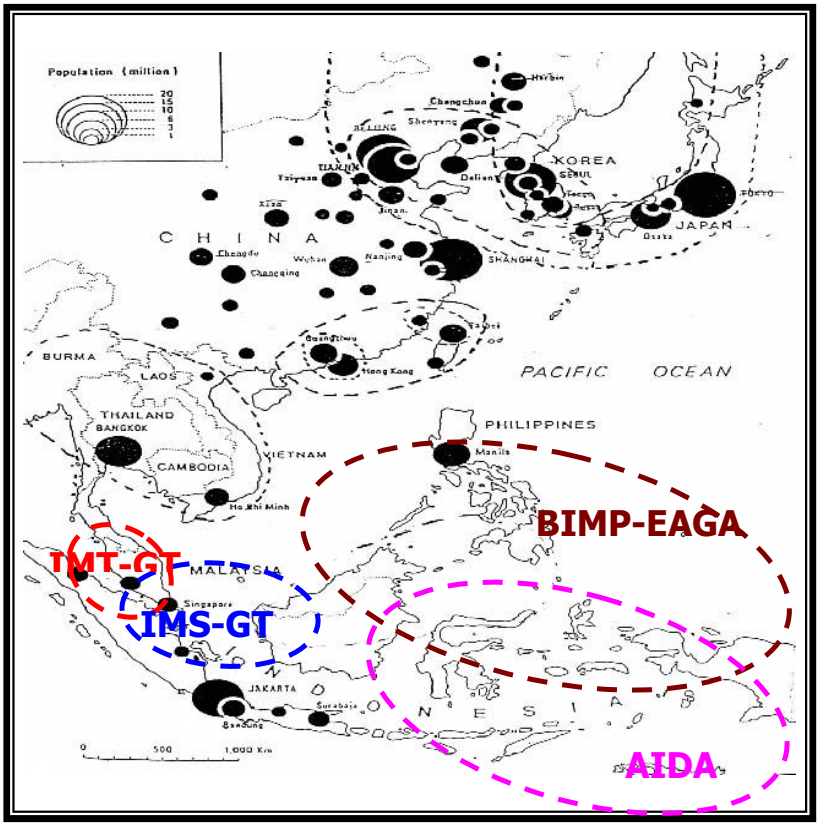

b. Sebagai bagian dari lintasan sejarah, Kota Medan sejak zaman Belanda dikenal sebagai *Paris Van Sumatera* yang menghasilkan devisa dari komoditi perkebunan unggulan yang dikenal oleh pasar internasional di Bremen sebagai tembakau Deli. Sejarah juga mencatat, Kota Medan merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan Timur Sumatera Utara, dan hingga kini Pemerintah menetapkan Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan modal dasar untuk mewujudkan Kota Medan sebagai pusat jasa perdagangan, keuangan, dan industri berskala regional dan internasional dalam 20 tahun yang akan datang.

Di samping itu, sebagai bagian dari lintasan sejarah, Kota Medan dapat dikembangkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di belahan barat Indonesia, terutama wisata alam sebagai transit, wisata kuliner, belanja, dan wisata sejarah dengan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang relatif masih cukup tersedia sampai saat ini, dengan pelestarian cagar budaya yang terus diupayakan secara bersama – sama dengan seluruh pelaku industri pariwisata. Potensi Kota Medan sebagai pusat jasa perdagangan, industri dan keuangan regional dan internasional sangat dimungkinkan, sebab di samping memiliki basis pengembangan industri – industri unggulan, juga Kota Medan sekaligus berfungsi sebagai pasar regional/internasional yang cukup menjanjikan pada masa yang akan datang, sekaligus memenuhi prasarat untuk menjadi surga berinvestasi baik itu PMDN maupun PMA.

c. Sejalan dengan pembangunan kota yang telah dilakukan selama ini, dan dengan jumlah penduduk yang mencapai 2 juta jiwa lebih serta adanya fasilitas perkotaan yang semakin lengkap seperti lembaga keuangan, jasa telekomunikasi, pendidikan, kawasan perdagangan dan perbelanjaan modern, lokasi industri, pelabuhan laut dan bandara yang bertaraf internasional, telah menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dengan status metropolitan. Hal ini merupakan modal dasar untuk meningkatkan iklim investasi dan lingkungan bisnis yang semakin kondusif, dalam rangka penanaman modal domestik maupun asing sebagai upaya mendorong perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.

d. Untuk menselaraskan pembangunan ekonomi Kota Medan dengan pembangunan wilayah sekitar, telah dirancang konsep pembangunan yang disebut dengan *Regional Economic Development Area* (REDA). Konsep REDA dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) kawasan pertumbuhan (segitiga pertumbuhan) yaitu kawasan Belawan, Polonia dan Kuala Namu. Pengembangan segitiga pertumbuhan ini tidak terlepas dari konsepsi pengembangan *Mebidang Metropolitan Area* (MMA) yang terdiri dari Medan, Binjai dan Deli Serdang. Hal ini akan menjadikan Kota Medan potensial berkembang dalam region ekonomi yang luas, sekaligus sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara/regional, dan sebagai pusat pertumbuhan bagi Wilayah Pembangunan Utama (WPU) A di Indonesia.

   Menjadikan Kota Medan sebagai pusat dan mesin pertumbuhan ekonomi dalam skala yang lebih luas sangat potensial melalui kerjasama sosial ekonomi antar daerah dan dengan kota –kota regional lainnya di berbagai negara sahabat, dengan pendekatan regionalisasi ekonomi yang berdaya saing, kompetitif dan unggul. Untuk itu, batas – batas administratif daerah dapat dikoordinasikan dengan semua pemerintah daerah yang ada, melalui fasilitasi pemerintah tingkat atasan sehingga tidak menjadi faktor penghalang pengintegrasian ekonomi secara regional sesuai dengan kaedah – kaedah ekonomi yang semakin terbuka dan menggelobal. Secara tradisional, Kota Medan sejak lama telah berfungsi sebagai salah satu kota pendidikan, dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, institut, akademi dan sekolah tinggi yang dikelola baik negeri maupun swasta. Melalui alokasi anggaran belanja pendidikan yang terus diupayakan semakin memadai pada masa datang, Kota Medan dapat menghasilkan tenaga kerja terampil dan unggul yang siap masuk ke pasar kerja.

e. Jumlah penduduk yang relatif besar. Penduduk Kota Medan terus berubah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Faktor lain yang tidak kalah peranannya dalan peningkatan laju pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya arus urbanisasi kaum pencari kerja ke Kota Medan sebagai implikasi ibukota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi regional. Adanya penduduk kommuter (ulang alik) yang diperkirakan mencapai 548.458 jiwa/hari, penduduk Kota Medan saat ini pada siang hari mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Dengan dukungan lembaga pendidikan yang memadai, memungkinkan Kota Medan di masa yang akan datang menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, sekaligus sebagai pusat pasar produk regional dan nasional.

f. Memiliki potensi dukungan sumber daya alam daerah hinterland dan kawasan yang sangat strategis. Wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, yaitu di sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya, langsung berhadapan dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut paling padat di dunia. Secara relatif, daerah hinterland merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Kondisi ini memungkinkan bagi Kota Medan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan terpilih yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, yang memiliki

keunggulan kompetitif serta akan menjadi pondasi utama dalam membangun ekonomi kota yang berdaya saing tinggi.

Produk – produk unggulan yang bernilai kompetitif akan semakin menjanjikan untuk dikembangkan dengan keragaman bahan baku (SDA) yang tersedia didaerah hinterland, terutama bahan baku yang dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan. Koordinasi dan sinergitas kebijakan industrialisasi antar daerah dan dukungan moda transportasi yang efisien, kepelabuhanan dan perkeretaapian akan dapat menjadikan kerjasama yang saling ketergantungan, membutuhkan, dan saling menguntungkan antar Kota Medan dengan daerah – daerah hinterlandnya.

Sesuai dengan kecenderungan demokratisasi, perlindungan HAM yang semakin menggelobal pada saat ini dan pada masa yang akan datang, maka kemajuan sistem politik dan pembangunan politik pada saat ini akan banyak membantu upaya menumbuhkan kepercayaan pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan, dengan kepastian hukum dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup bersaing pada masa yang akan datang.

g. Modal dasar pembangunan kota 20 tahun kedepan juga adalah capaian hasil - hasil pembangunan kota sebelumnya, atau paling tidak dalam 5 (lima) tahun terakhir (2000 - 2005) baik di bidang fisik/prasarana, ekonomi dan sosial budaya, yang telah mendorong perubahan dan perkembangan Kota Medan yang sangat pesat sampai saat ini. Tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan kota yang legitimate berdasarkan seleksi politik yang demokratis, sehingga secara langsung juga menciptakan situasi dan kondisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, yang berbasis multikulturisme.

h. Perencanaan kota yang komprehensif, terintegrasi, simultan dan proyektif juga akan menjadi modal dasar, sebab akan mendorong kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi yang lebih tinggi masyarakat/swasta dalam pembangunan kota, dalam konsep visi dan misi pembangunan kota yang sama – sama di sepakati.

   Kota Medan akan terus memperbaiki terus kualitas perencanaan bersama-sama stakeholders kota, baik itu perencanaan tata ruang maupun perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan. Keberadaan rencana pembangunan kota yang lengkap dan handal tersebut akan memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi para investor/sektor swasta/masyarakat untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis dan resiko yang dapat dikendalikan, prospektif untuk dikelola, dan memberikan tingkat keuntungan yang wajar bila dioperasikan sehingga memunculkan bisnis – bisnis yang sustainable.

i. Modal Sosial
   Salah satu modal dasar pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan adalah modal sosial yang dimiliki masyarakat. Secara alamiah Kota Medan merupakan pintu gerbang Indonesia Bagian Barat. Oleh karena itu masyarakat Kota Medan memiliki interaksi yang luas dengan masyarakat di luar warga Kota Medan, bahkan dengan masyarakat internasional yang berkunjung ke Kota Medan. Interaksi sosial ini umumnya mengkomunikasikan berbagai kepentingan masyarakat kedua belah pihak secara timbal balik untuk saling melengkapi dan saling memenuhi kebutuhan barang/jasa masing – masing. Kondisi ini akan menjadi daya dorong yang kuat membangun kerjasama antar daerah bahkan dengan daerah – daerah lainnya secara regional dan internasional seperti halnya saat ini dalam forum – forum kota bersaudara. Di samping itu, interaksi sosial ini juga akan lebih mempublikasikan dan mempromosikan Kota Medan pada pergaulan regional, nasional dan internasional, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian kota yang kompetitif, tangguh dan semakin dinamis pada 20 tahun ke depan.

Modal sosial lainnya yang dimiliki Kota Medan adalah adanya kemajemukan masyarakat secara sosial ekonomi, seperti keragaman suku bangsa, agama, budaya dan lain – lain sehingga secara kesejarahan telah mendorong sikap keterbukaan, kerjasama, kemitraan dan sinergitas satu dengan yang lainnya dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Lebih dari itu sejak lama telah tumbuh sikap – sikap membangun di tengah-tenagah masyarakat seperti toleransi, kebersamaan, gotong royong diantara sesama dalam berbagai kelompok sosial masyarakat atas dasar kebinekaan (berbeda – beda tetapi tetap satu).

Masalah dan tantangan pembangunan kota pada masa yang akan datang akan cenderung semakin berat dan kompleks, selaras dengan dinamika tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota. Namun dengan pengelompokkan sosial ekonomi yang ada, yang secara alamiah terbangun dalam masyarakat baik itu atas dasar interset group, ataupun presure group diyakini dapat membantu meringankan usaha – usaha mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah pembangunan kota tersebut secara bersinergi pada masa 20 tahun ke depan.

Pengelompokkan sosial yang ada secara sosiologis akan cenderung menjadi akumulasi modal sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan kota, sekaligus menjadi daya tarik kepariwisataan yang unik dan menarik pada masa datang dengan pengelolaan yang profesional. Pada masa yang akan datang khususnya dalam 20 tahun ke depan diperkirakan akan terus tumbuh dan berkembang pengelompokkan sosial atas dasar berbagai kesamaan tuntutan, kebutuhan dan kepentingan bersama. Pengelompokkan sosial baik yang bersifat intra, antar kelompok masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal, internal dan eksternal ini akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga proses pembangunan kota diyakini akan semakin demokratis dan merata diseluruh lapisan masyarakat, dengan tingkat toleransi yang tinggi diantara antar kelompok masyarakat.

Harus diakui tidak seluruh keragaman sosial yang ada menjadi faktor positip dalam pembangunan kota, namun berbagai faktor negatif yang berpotensi timbul seperti sikap ego sentris, primordialisme, diyakini dapat dikomunikasikan melalui forum-forum komunikasi yang dapat ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Untuk itu kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kota sebagai fasilitator, regulator dan mediator sangat perlu dikelola secara serasi, selaras dan seimbang diantara pengelompokkan sosial yang ada, sehingga semua pihak merasa diperlakukan sama tanpa diskriminasi oleh kebijakan publik yang dijalankan. Melalui harmonisasi dalam kehidupan sosial ini proses pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, dapat lebih dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Pada masa 20 tahun ke depan, masalah sosial ini juga dapat dijadikan dasar – dasar membangun dan mengembangkan terus ciri-ciri dan Icon Kota Medan yang religius dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi sehingga selaras dengan tujuan pembangunan kota yang tidak saja kemuliaan duniawi juga ketaqwaan terhadap Allah swt, Tuhan Yang Esa.

Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menumbuhkembangkan kapasitas modal sosial yang ada adalah menghindari kemajuan fisik/prasarana dan sosial ekonomi kota yang menjadikan semakin besar dan luasnya kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota harus dapat menjalankan fungsi – fungsinya dalam perekonomian daerah secara simbang antara fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, sehingga dapat menjamin seluruh warga kota memiliki akses dan kontribusi yang sama dalam pembangunan kota. Melalui pendekatan ini pula diharapkan proses pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan dapat memberikan hasil, manfaat dan dampak kepada kemajuan dan kemakmuran masyarakat secara demokratis, adil, dan beradab, dengan nilai – nilai luhur sebagai bagian masyarakat bangsa Indonesia yang religius.

Gambar 2.10
Rencana Konsep Struktur Ruang Metropolitan Mebidang

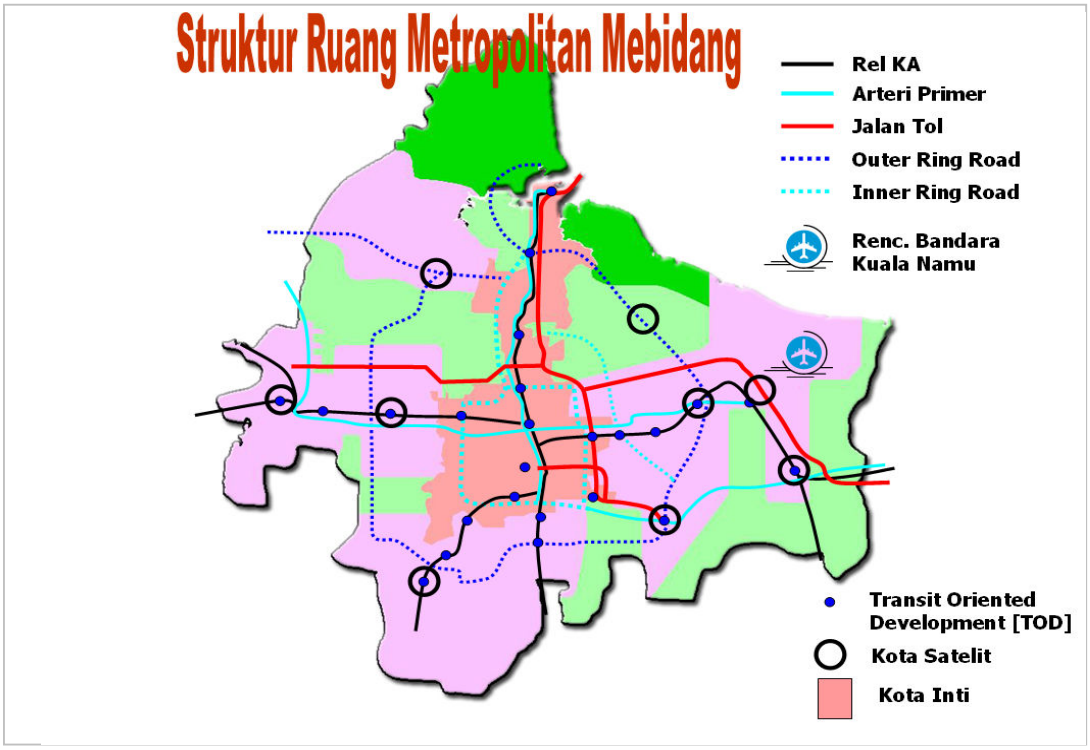

II.3. Prediksi Kondisi Umum

Berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan kota yang ditetapkan, maka prospek pembangunan Kota Medan tahun 2006-2025, dapat disajikan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Medan tumbuh rata- rata 6,23% selama tahun 2001-2006. Dengan memperhatikan stabilnya situasi politik dan keamanan, membaiknya iklim investasi, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana di bidang ekonomi, peningkatan akses pelaku ekonomi lokal, khususnya UKMK, pengembangan kemitraan melalui fasilitas, kemudahan, dan insentif berusaha bagi pelaku ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang profesional, serta pengembangan produk-produk unggulan, maka prospek pertumbuhan ekonomi dapat diharapkan mencapai berkisar 8,13% pada tahun 2010, dan meningkat menjadi rata-rata 9,88% di tahun 2025.

b. Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita

Berdasarkan Atas Harga Berlaku, PDRB Kota Medan tahun 2005 mencapai 42,79 triliun rupiah, diproyeksikan menjadi 63,01 triliun rupiah pada tahun 2010, dan pada tahun 2025 diharapkan meningkat menjadi 127,74 triliun rupiah.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Medan juga meningkatkan PDRB perkapita, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika pada tahun 2005 PDRB perkapita masih sebesar 20,91 juta rupiah, maka pada tahun 2010 diperkirakan naik menjadi 28,61 juta rupiah dan diharapkan meningkat menjadi 48,99 juta rupiah pada tahun 2025.

c. Inflasi

Pada tahun 2005, inflasi komulatif di Kota Medan sebesar 22,91 persen, dan sampai pada tahun 2010 diperkirakan rata-rata 5,56 persen. Tingkat inflasi ini diperkirakan akan menurun sampai tahun 2025 menjadi rata-rata 3,96 persen per tahun.

d. Investasi

Investasi di Kota Medan pada tahun 2005 mencapai 5,24 triliun rupiah dan diperkirakan dibutuhkan mencapai 9,35 triliun rupiah pada tahun 2010. Kebutuhan investasi diperkirakan akan terus meningkat menjadi 19,73 triliun rupiah pada tahun 2025.

e. Perdagangan Luar Negeri

Pada tahun 2010, surplus perdagangan Kota Medan diperkirakan akan mencapai US$ 3,16 milyar, dimana nilai ekspor mencapai US$ 4,72 milyar dan nilai impor sebesar US$ 1,56 milyar. Pada tahun 2025, nilai ekspor diperkirakan mencapai US$ 9,30 milyar dan nilai impor sebesar US$ 3,12 milyar, sehingga diperkirakan surplus perdagangan mencapai US$ 6,18 milyar.

f. APBD dan PAD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akibat adanya peningkatan pembangunan kota. Pada tahun 2010 APBD Kota Medan diperkirakan mencapai 2.152,64 milyar rupiah, dan pada tahun 2025, diharapkan dapat mencapai 3.951,87 milyar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 total PAD Kota Medan diperkirakan sebesar 477,99 milyar rupiah, dan meningkat menjadi 1.035,13 milyar rupiah pada tahun 2025.

g. Kebutuhan Pembiayaan

Untuk memenuhi tuntutan pembangunan kota di masa yang akan datang, kebutuhan investasi hingga tahun 2010 diperkirakan sebesar 9,35 triliun rupiah dan meningkat menjadi 19,73 triliun rupiah pada tahun 2025, baik yang berasal dari sektor Pemerintah, Swasta, maupun Rumah Tangga.

h. Kependudukan

Penduduk Kota Medan selama periode tahun 2005-2010 diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,29 persen atau mencapai 2.202.062 jiwa pada tahun 2010. Selama periode 2011 - 2025 pertumbuhan penduduk diperkirakan akan turun menjadi 0,94 persen atau dengan jumlah penduduk mencapai 2.607.670 jiwa pada tahun 2025.

Berdasarkan prospek perkembangan dan kemajuan Kota Medan di masa yang akan datang, penduduk miskin pada tahun 2010 diperkirakan hanya sebesar 6,49 persen dan akan mengalami penurunan menjadi 4,24 persen pada tahun 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 76,81 dan akan meningkat menjadi 81,44 pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, kesejahteraan penduduk meningkat secara bertahap dimana Gini Ratio 0,22; Usia Harapan Hidup menjadi 77,89; Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,8%; dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 65,60%.

Tabel 2.11
Angka Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2025

No	Uraian	Satuan	Perkiraan			
			2010	2015	2020	2025
A	**INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**					
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,202.06	2,337.26	2,472.47	2,607.67
2	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.29	1.11	1.03	0.94
3	Luas Wilayah	Km2	265.10	265.10	265.10	265.10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	8,306.51	8,816.53	9,326.54	9,836.56
5	APS					
	- 7 – 12	Persen	98.83	99.19	99.55	99.91
	- 13 – 15	Persen	95.52	96.74	97.95	99.17
	- 16 – 18	Persen	81.78	86.00	90.23	94.46
	- 19 – 24	Persen	38.72	44.00	49.29	54.56
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	72.92	74.58	76.23	77.89
7	Angka Kelahiran Kasar	rata2 kelahiran PUS	2.09	1.89	1.69	1.48
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 Pddk	2.17	1.62	1.06	0.51
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38	12.09	9.80	7.52
No	**Uraian**	**Satuan**	**Perkiraan**			
			2010	**2015**	**2020**	**2025**
10	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran hidup	103.10	94.38	85.67	76.95
11	Angka Kesakitan Umum	Persen	10.76	9.70	8.65	7.60
12	TPAK	Persen	56.91	58.14	61.87	65.60
13	Pengangguran Terbuka	Persen	9.80	8.80	7.80	6.80
14	IPM	-	76.81	78.36	79.90	81.44
15	Penduduk Miskin	Persen	6.49	5.74	4.99	4.24
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25	0.24	0.22
17	Rata - rata lama sekolah	Tahun	11.84	12.84	13.84	14.84
B	**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**					
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp trilyun	63.01	84.58	106.16	127.74
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8.13	8.72	9.30	9.88
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp jutaan	28.61	36.19	42.94	48.99
4	Inflasi	Persen	5.56	5.03	4.50	3.96
5	Export	Nilai FOB, 000 US $	4,723.147	6,248.697	7,774.247	9,299.797
6	Import	Nilai CIF, 000 US $	1,563.172	2,081.532	2,599.892	3,118.252
7	Perkiraan Investasi	Rp trilyun	9.35	12.81	16.27	19.73
8	APBD	milyar (rp)	2,152.64	2,752.39	3,352.13	3,951.87
9	PAD	milyar (rp)	477.99	663.71	849.42	1,035.13

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA

III.1. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun ke depan hanya dapat disusun apabila 'wujud' Kota Medan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai haruslah benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat Kota Medan sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Didasari potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan kota pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, **visi pembangunan kota tahun 2006 – 2025 ditetapkan sebagai berikut :**

III.2 Visi dan Misi

Visi

KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penjelasan :

1. Visi pembangunan kota tahun 2006 – 2025 yang disepakati mengarah dan selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025, yang diindikasikan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta religiusitas masyarakat yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kota, (berwawasan lingkungan). Visi ini juga merupakan kelanjutan dari visi pembangunan kota dalam jangka menengah (2006 - 2010) yaitu Medan sebagai Kota Metropolitan yang Modern, Madani dan Religius.

2. Kemajuan, kesejahteraan, masyarakat dan kota religius adalah hakekat pembangunan kota yang akan diwujudkan oleh seluruh pelaku pembangunan kota dalam 20 tahun yang akan datang. Visi pembangunan kota jangka panjang tersebut juga, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Kota Medan, untuk mewujudkan tujuan konstitusional bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

3. Sebagai proses, prosedur, dan struktur terukur, dalam pengelolaan pembangunan Kota Medan, maka kemajuan, kesejahteraan dan masyarakat religius yang berwawasan lingkungan untuk 20 tahun ke depan, merupakan upaya sistemik dan pragmatis, sehingga dapat dievaluasi berdasarkan kriteria dan ukuran-ukuran obyektif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

4. Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk

perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.

5. Kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang juga ditandai oleh struktur perekonomian kota yang modern, yang bekerja dengan baik, didominasi oleh sektor tertier dan sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan yang semakin berkualitas, dan berkembang dalam volume yang besar, dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota.

6. Kemajuan ekonomi Kota Medan pada masa yang akan datang, juga didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut dipicu oleh pengembangan ekonomi regional yang saling ketergantungan dan membutuhkan serta saling menguntungkan. Efisiensi, produktivitas yang tinggi serta pertumbuhan kawasan akan menjadikan Kota Medan memiliki fundamental dan stabilitas ekonomi yang kuat, kokoh dan dinamis, serta daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi.

7. Di samping kemajuan secara ekonomi, maka Kota Medan yang maju dalam 20 tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang, lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan moral pembangunan kota.

8. Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang adalah penduduk yang berkualitas, dan tumbuh seimbang, kualitas pelayanan umum yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol, produktivitas masyarakat yang tinggi, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya wilayah regional, serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.

9. Cermin Kota Medan yang maju, juga ditunjukkan oleh ketersediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan berkeadilan sosial, serta demokratis. Dengan demikian, Kota Medan yang maju memiliki makna modern dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya, ekonomi,

maupun fisik prasarana kota. Di samping itu, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kota menggambarkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik, jasmani - rohani, mental – spiritual, berdasarkan daya dukung lingkungan dan moral religius.

10. Kota Medan tahun 2025, yang diwujudkan tidak hanya maju, juga sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan hakiki dalam pembangunan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota juga diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya, dimana kemajuan fisik/prasarana dan ekonomi, merupakan infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan manusia warga kota.

11. Kesejahteraan yang ingin dicapai, diindikasikan adanya jaminan perlindungan dari setiap ancaman, gangguan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat. Oleh karena itu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, menjadi keadaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat kota.

12. Dimensi kesejahteraan yang juga sangat penting adalah adanya, jaminan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang cukup dan berkualitas, layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata, termasuk jaminan kehidupan yang terhormat dan bermartabat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis dan manusiawi.

13. Kemajuan, kesejahteraan yang diwujudkan juga tidak bersifat semu, tetapi riil dan mapan. Oleh karena itu, indikasi penting lainnya dalam pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan. Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan berkualitas.

14. Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah, adanya akses yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan kota, seperti permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi kota, tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi juga antar usaha kecil, menengah, dan besar, antar inti kota dengan lingkar luar, sehingga menumbuhkan sinergitas dan kemitraan yang kuat.

15. Untuk itu, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, akan menjadi pilihan kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi yang adil, akan ditunjukkan oleh keadaan non diskriminasi, tidak ada sentimen SARA, dan harmoni sosial sehari-hari.

16. Karakter kota yang dibangun juga tidak hanya maju, dan sejahtera, tetapi juga warga kota yang religius. Kota religius tidak berarti kota suci (sekuler), tetapi kota dimana nilai dan moral agama disepakati sebagai basis planologi, pengembangan dan sistem perkotaan serta basis pembangunan ekonomi, sosial budaya dan fisik serta prasarana kota. Sifat dan keadaan religius ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan lokal, sekaligus antisipatif terhadap perubahan-perubahan negatif yang mengikuti kemajuan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota sebagai pembangunan seluruh warga kota seutuhnya, juga merupakan upaya pembangunan warga kota yang taat,

beriman dan bertaqwa, beretika dan bermoral, memiliki solidaritas yang tinggi, berfungsi sebagai perekat kohesi sosial, berakhlak mulia, harmonis dalam kemajemukan, dengan jaminan perlindungan beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing – masing, serta dukungan prasarana dan sarana ibadah yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun di seluruh fasilitas kota.

17. Variabel dan indikator utama lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam perwujudan visi pembangunan kota 2025 adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kota yang maju, sejahtera dan masyarakat religius yang ingin diwujudkan adalah kota yang tumbuh dan berkembang secara terstruktur dan terencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

18. Kota yang berwawasan lingkungan dalam visi jangka panjang juga adalah kota yang merencanakan, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lingkungan yang paling utama yaitu tanah atau lahan, air dan udara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wawasan pembangunan kota yang berdimensi lingkungan harus merupakan perwujudan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku (budaya) masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak usia dini hingga dewasa dari seluruh warga masyarakat kota.

19. Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan bukan faktor penghalang untuk mendorong terjadinya akumulasi modal dan alokasi sumber daya yang paling efisien, efektif, dan ekonomis tetapi justru mendorong keseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok hidup warga kota, instrumen pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup serta prinsip-prinsip pokok mempertahankan pembangunan kota yang berkesinambungan.

20. Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan juga merupakan pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sumber daya lingkungan yang mendukungnya.

Misi

Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2006 - 2025, dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan.

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah :

1. **Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**, berarti meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat, serta kokoh; meningkatkan efisiensi perekonomian kota; meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional; mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional maupun nasional.

2. **Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**, berarti meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk; meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat; meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif,

dan produktif; meningkatkan kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling menguntungkan; serta meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan kota.

3. **Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan**, dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang berdaya guna, dan berhasil guna, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju berdasarkan teknologi dan standar teknis yang ramah lingkungan; membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman yang sehat dan terjangkau dengan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan; meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur kota dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; meningkatkan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif dengan tetap memelihara, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang dimiliki.

4. **Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**, berarti meningkatkan akses masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; menghilangkan diskriminasi antar individu, antar gender, dan antar wilayah inti kota dengan lingkar luar; meningkatkan jaminan dan perlindungan kebutuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat; meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat; meningkatkan distribusi pembangunan kota yang lebih merata; dan meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kehidupan yang demokratis, humanis dan religius.

III.3 Tujuan Pembangunan Kota

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka panjang, maka tujuan pembangunan kota jangka panjang tahun 2006 - 2025 yang ditetapkan adalah **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**
Sebagai keadaan umum yang dicapai dalam 20 tahun ke depan, berdasarkan indikasi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan maka pembangunan kota pada masa yang akan datang, diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran utama sebagai berikut:

A. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, diindikasikan oleh:

1) Meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka panjang selama tahun 2006 - 2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 8% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp 48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%.

2) Meningkatnya kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.

3) Terwujudnya perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

4) Tersedianya kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

5) Meningkatnya taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

6) Terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit, dengan konsumsi perkapita Rp 841,36 ribu tahun 2025.

7) Berkembangnya MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

8) Terwujudnya daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

9) Banyaknya pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

10) Meningkatnya peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

B. Terwujudnya masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, diindikasikan oleh :

1) Meningkatnya derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,61 tahun 2025, dengan rata - rata lama sekolah 17,00.

2) Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,61 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 78,00.

3) Tercapainya penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2025.

4) Terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.

5) Terwujudnya masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

6) Terbangunnya masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

7) Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

8) Meningkatnya investasi dalam pembangunan kota mencapai 36,2 trilyun tahun 2025.

9) Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

C. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan, diindikasikan oleh :

1) *Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan,* ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin *pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan* jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pemeliharaan, pemantauan, *pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas,* namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota.

2) Tersedianya prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan ramah lingkungan, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan ramah lingkungan, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

3) *Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya.*Terpenuhinya pasokan energi* tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. *Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara

efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

4) Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

5) Tersedianya infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

6) Tersedianya berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

7) Terciptanya ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi secara berkualitas.

8) Terwujudnya sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha.

9) Terjaganya fungsi dan daya dukung, daya tampung ruang/lingkungan kota dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi serta kualitas sumber daya alam secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan berwawasan lingkungan.

10) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup khususnya tanah/lahan, air, dan udara, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder) dalam pemeliharaan, pelestarian, pemantauan, evaluasi, audit, lingkungan hidup

D. Terwujudnya kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan, diindikasikan oleh:

1) Meratanya pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.

2) Meningkatnya kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

3) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

4) Menurunnya tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 4,24%.

5) Tercerminnya agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

6) Adanya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

7) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan kota.

8) Terwujudnya ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

9) Terwujudnya pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

BAB IV
ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA JANGKA PANJANG

IV.1. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Tangguh dan Dinamis

Perekonomian kota yang tangguh dan dinamis merupakan salah satu indikasi penting kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi dalam 20 tahun ke depan. Perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, selain meningkatkan produksi dan pendapatan, juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga meningkat kemampuan warga kota memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan kualitas yang baik, serta harga yang wajar.

Untuk mencapai perekonomian kota yang tumbuh dan berkembang sehingga tangguh dan dinamis, maka pembangunan kota dirancang dan diarahkan untuk; (1) mendorong peningkatan produksi, dan pendapatan masyarakat; (2) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri; (3) Meningkatkan efisiensi perekonomian kota; (4) Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal; (5) mendorong pengembangan ekonomi regional; dan (6) Meningkatkan daya saing lokal, regional dan nasional.

IV.1.1. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Tangguh Dan Dinamis

a. Mendorong Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Masyarakat :

1) Perekonomian kota dikembangkan guna meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Untuk itu, pembangunan ekonomi kota diarahkan agar dapat mendorong perubahan kualitas struktur ekonomi baik di sektor primer, sekunder, maupun tertier, sehingga menjadikan perekonomian kota mengarah kepada pengembangan kota jasa perdagangan dan keuangan, serta industri yang ditandai dengan meluasnya kegiatan ekonomi pabrikasi, pemrosesan, pelayanan perhotelan, restauran, pemeliharaan dan perbaikan, transportasi, persewaan, konsultasi, keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan sebagainya.

2) Meningkatkan peran ekonomi kota, dalam skala regional, nasional maupun internasional, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak secara kuantitatif dan lebih banyak jenisnya, penciptaan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi pengusaha dan profesional, penciptaan sistem dan pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintahan Kota yang akuntabel dan transparan, sehingga lebih bermitra secara akrab dengan para pengusaha dan profesional (*business friendly city*), guna mendorong lebih banyak manfaat bagi warga Kota dan investor, serta menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

3) Pengembangan industri dasar dan semi higtech untuk mendorong peningkatan kemampuan ekspor daerah, melalui pengembangan produk-produk unggulan daerah yang diekspor, di samping untuk kebutuhan pasar lokal. Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi sekaligus pendapatan dan kesempatan kerja baru. Untuk itu, dilakukan pengembangan sistem informasi industri, perencanaan pengembangan industri lokal, pendidikan dan latihan industri, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah pusat pertumbuhan, investasi dan kerjasama pengembangan kawasan industri baru.

4) Kemajuan ekonomi kota jangka panjang, bertumpu kepada peningkatan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan perekonomian kota diarahkan kepada penciptaan iklim investasi dan usaha yang baik dan kondusif, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan, fasilitas, dan insentif bagi dunia usaha dan investasi. Pertumbuhan ekonomi kota juga didorong oleh peningkatan kinerja dan

produktivitas dari sektor rill, sebagai sumber pertumbuhan utama, dengan menghilangkan berbagai distorsi yang bersifat non-ekonomi. Daya tarik, kreasi, dan daya tahan sektor rill, dimaksudkan untuk menciptakan perekonomian kota yang sehat, sehingga tangguh dan dinamis.

5) Peningkatan pendapatan perkapita diarahkan secara merata, sehingga mencerminkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas, yang ditandai peningkatan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan. Untuk itu, perekonomian kota diarahkan berkembang secara rasional, menciptakan keterlibatan dan kesempatan luas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, distribusi penguasaan dan kepemilikan faktor-faktor produksi, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil menengah dan koperasi.

6) Meminimalkan tingkat pengangguran, dengan mendorong peningkatan kesempatan kerja baru, melalui penumbuhan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang didukung perencanaan ketenagakerjaan daerah.

7) Menurunkan angka kemiskinan, dengan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan yang diterima pekerja, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan sektor-sektor industri serta antar wilayah lingkar dalam-tengah-lingkar luar.

8) Pembangunan ekonomi kota juga diarahkan untuk menumbuhkan jenis-jenis pekerjaan dan usaha ekonomi yang dapat menyerap angkatan kerja secara masif, mendorong pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif, dengan menjadikan iptek sebagai pembangkit ekonomi kota.

9) Pembangunan ekonomi kota digerakkan oleh lembaga-lembaga masyarakat, struktur ekonomi, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga keuangan, serta lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, berdasarkan hubungan-hubungan kelembagaan yang sinkron, sehingga masing-masing memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi kota, serta mendorong penciptaan kesempatan kerja baru.

10) Sebagai entrepreneur, Pemerintah Kota melaksanakan pengembangan BUMD, sehingga aset kota dapat dikelola secara lebih baik, efisien, efektif, ekonomis, dan menguntungkan. Sebagai stimulator, Pemerintah Kota menstimulan penciptaan dan pengembangan usaha, untuk mendorong perusahaan-perusahaan masuk ke Kota Medan, dan atau tetap berada di Kota Medan, melalui publikasi, promosi, pelaksanaan pameran, kerjasama pengembangan kawasan industri baru, pusat kawasan bisnis, dan sebagainya.

11) Pembangunan dan pengembangan fisik atau lokalitas yang diarahkan untuk kepentingan kerjasama pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru, dan bisnis dalam rangka menciptakan identitas kota, memperbaiki basis pesona dan kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik pusat kota, dan mendorong pengembangan dunia usaha. Untuk itu dalam jangka panjang, dilakukan pembuatan bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan kota, penataan kota secara terus menerus, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik, serta penyediaan infrastruktur.

12) Pengembangan dunia usaha, diarahkan untuk menciptakan perekonomian kota yang sehat, sehingga tangguh dan dinamis. Untuk itu, dilakukan peningkatan iklim usaha yang lebih baik bagi dunia usaha, pembangunan pusat informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, pembuatan sistem pemasaran bersama, pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan untuk pengembangan produk baru, teknologi baru, dan perluasan pasar-pasar baru.

13) Pengembangan ekonomi masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk menciptakan manfaat sosial yang besar melalui pelaksanaan proyek-proyek padat karya bagi tenaga kerja yang masih menganggur sampai mereka masuk ke pasar kerja yang permanen.

14) Pembangunan ekonomi kota juga diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka panjang secara merata. Untuk itu, perekonomian kota harus bertumpu pada kekuatan sendiri, mampu mendorong investasi baru dan merupakan usaha meningkatkan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, sebagai cerminan adanya perbaikan dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita diharapkan mencapai Rp 48,99 juta pada tahun 2025.

15) Pembangunan ekonomi kota juga diarahkan untuk mendorong perubahan struktur sosial, sikap mental ekonomi, pembentukan lembaga-lembaga ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi yang progresif, termasuk sebagai bagian dari usaha pengurangan kemiskinan, baik yang bersifat absolut maupun relatif, sehingga mewujudkan perekonomian kota yang modern, tangguh dan dinamis yang mendorong pemerataan pendapatan.

b. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Sektor Jasa Perdagangan, Keuangan dan Industri

1) Upaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor jasa perdagangan, keuangan serta industri diarahkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara progresif serta lapangan kerja yang lebih banyak, dan lebih baik. Untuk itu, Pemerintah Kota mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat untuk mempengaruhi keputusan lokasi dari investasi sektor swasta, melakukan penyederhanaan sistem regulasi daerah, sehingga mencerminkan keinginan mencapai pertumbuhan, serta mendorong keterbukaan masyarakat terhadap lingkungan bisnis.

2) Meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peranan perekonomian kota sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, serta industri yang didukung bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional. Untuk itu, pembangunan industri diarahkan kepada kegiatan industri tepat guna, modren dan semi higtech yang ikut mendorong berkembangnya kegiatan usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal. Mendorong kalangan pengusaha swasta membangun kawasan baru industri modern yang dapat menarik industri maju yang berbasis IPTEK; Mendorong pengembangan pusat jasa perdagangan dan keuangan modern yang bertaraf internasional, sehingga Kota Medan berkembang menjadi tujuan wisatawan nasional dan regional; Mendorong pembangunan pusat perkantoran/ pemerintahan modern yang baru dan terintegrasi serta pusat lembaga keuangan modern yang berbasis IPTEK; Mendorong pengembangan restoran dan pusat makanan yang menyediakan berbagai jenis hidangan lokal, nasional dan internasional; Mendorong pembangunan pusat pelayanan kesehatan modren dalam kegiatan diagnosis, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan; serta mendorong institusi pendidikan domestik dan asing agar tumbuh dan berkembang menjadi bagian kekuatan ekonomi kota.

3) Mengembangkan kegiatan bisnis di sektor jasa perdagangan, jasa restoran dan hiburan sebagai daya tarik wisatawan. Untuk itu, kebijakan ekonomi lokal diarahkan untuk mendorong usaha swasta meningkatkan mutu prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan akomodasi pariwisata bagi wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi kota yang bersifat massal, nyaman, dan modren, sehingga mendukung pengembangan perekonomian kota sebagai pusat pelayanan birokrasi, perkantoran bisnis, perdagangan, dan wisata. Mendorong kalangan swasta untuk membangun pusat perbelanjaan di perhotelan yang modren bertaraf internasional, mempromosikan daerah secara berkesinambungan serta senantiasa meningkatkan iklim yang kondusif bagi kegiatan wisata konvensi dan bisnis pameran (expo) berskala nasional dan internasional.

4) Mengembangkan sektor sekunder (industri dan konstruksi) sehingga kontribusinya mencapai lebih dari 30% terhadap PDRB, dalam rangka menjadikan ekonomi kota yang industrialis, berdasarkan penerapan Iptek. Untuk itu, dilakukan peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi terapan, dalam rangka menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif, serta peningkatan ekspor hasil industri yang ikut mendorong pengembangan industri kecil, menegah dan koperasi dengan lokasi kawasan kerjasama industri MEBIDANG.

5) Pengembangan industri strategis yang mampu menghasilkan *nilai tambah* sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta peningkatan terhadap imbalan jasa yang diterima oleh para pekerja. Untuk itu, dilakukan pengembangan sistem informasi industri, perencanaan kerjasama pengembangan industri lokal, pendidikan dan latihan industri, penyempurnaan prasarana dan sarana wilayah pusat pertumbuhan investasi, dan pengembangan kawasan industri baru dalam kawasan MEBIDANG.

6) Pengembangan industri strategis yang berpotensi mendorong *alih* teknologi bagi sektor ekonomi lainnya, melalui pengembangan sumber daya manusia yang skilled dan semi skilled labor, fasilitas modal, pengembangan infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Di samping itu, pengembangan infrastruktur tidak hanya pada infrastruktur ekonomi, tapi juga non ekonomi seperti fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

7) Pengembangan industri strategis yang menggeser keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif, berdasarkan kepada peta potensi industri unggulan yang dimiliki, dengan melakukan identifikasi dan pengelompokan terhadap jenis industri unggulan yang potensial.

8) Mendorong pengembangan sektor tersier (jasa perdagangan dan jasa keuangan-perbankan), sehingga tercipta kota perdagangan dan keuangan yang berskala regional, nasional maupun internasional.

9) Pembangunan kota dan proses industrialisasi diutamakan kepada kegiatan ekonomi kota yang lebih banyak memanfaatkan sumber daya tenaga kerja terampil dan semi terampil.

10) Pembangunan ekonomi kota yang didasarkan kepada basis produksi yang kokoh dan berkesinambungan, dengan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya lokal secara optimal, sehingga tidak menciptakan kesenjangan ekonomi wilayah.

c. Meningkatkan Efisiensi Perekonomian Kota

1) Peningkatan daya saing perekonomian kota diarahkan untuk meningkatkan dan memanfaatkan peluang pasar, baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional. Untuk itu, efisiensi dalam produksi didorong secara terus menerus,

melalui deregulasi dan debirokratisasi yang bersifat lokal, menghilangkan distorsi dan hal-hal yang menghambat jalannya perekonomian kota secara normal, penyesuaian peraturan-peraturan daerah yang diperlukan, kepastian hukum dan menghilangkan diskriminasi bisnis.

2) Meningkatkan produktivitas per kapita di berbagai sektor ekonomi, sehingga terwujud kota yang industrialis, kota jasa perdagangan, dan keuangan, melalui tata pengelolaan perusahaan yang baik. Untuk itu, perekonomian kota diarahkan untuk mendorong perubahan, peningkatan kualitas struktur ekonomi, struktur produksi, teknik produksi, serta perilaku masyarakat kota dalam perekonomian kota.

3) Mendorong pembaharuan dalam perekonomian kota, melalui peningkatan penataan manajemen, perubahan orientasi, dan penyederhanaan aturan serta menerbitkan peraturan daerah yang kondusif. Untuk itu, dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya ekonomi, mendorong alokasi sumber daya ekonomi yang semakin efisien, distribusi pendapatan yang mencerminkan keadilan ekonomi, sekaligus menciptakan perilaku masyarakat kota untuk selalu bertindak ekonomi.

4) Pembangunan kota dikelola dengan manajemen kota yang lebih baik dan terarah. Menyusun perencanaan kota yang efisien, efektif, terkoordinasi, rasional dan handal. Untuk itu, dilakukan rasionalitas cara berfikir, bersikap, bertindak, berproduksi, dalam metode yang lebih modern, sehingga membawa percepatan pembangunan ekonomi kota, mendorong persamaan sosial ekonomi, dan mendorong perubahan sikap-sikap lembaga ekonomi yang ada.

5) Pembangunan kota yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat, melalui pendekatan *community planning* (perencanaan masyarakat) dan *parcipatory planning* (perencanaan partisipatif), *integrated urban development* (pembangunan perkotaan terpadu), *agricultural urban intensification* (intensifikasi pertanian perkotaan), *intermediate technology* (pengembangan teknologi madya), *appropiate education* (pendidikan yang layak), *labor force expansion* (ekspansi tenaga kerja), *small industries and export promotion* (promosi industri kecil dan eksport), *employment creation* (penciptaan lapangan kerja), *nutricion and health development*, (perbaikan gizi dan kesehatan), *social and human resources development* (pengembangan sumber daya manusia dan sosial), *income distribution* (distribusi pendapatan), dan *institusional change* (perubahan institusional).

6) Meningkatkan integrasi ekonomi kota secara regional, dan nasional untuk mendorong efisiensi dan kemajuan ekonomi yang progresif. Untuk itu, dilakukan peningkatan kerjasama, keterkaitan sektor-sektor ekonomi antar wilayah, sehingga merangsang peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah.

7) Pembangunan ekonomi kota diarahkan kepada peningkatan output nyata, dengan tingkat produktivitas yang secara terus menerus meningkat, pemanfaatan tenaga kerja yang tinggi, dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup, sehingga menurunkan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat terendah.

d. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal

1) Membina dan menumbuhkembangkan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju, sehingga mampu berintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren. Untuk itu, berbagai kebijakan ekonomi kota diarahkan untuk mendorong relokasi pedagang informal dari kawasan-kawasan terlarang ke kawasan-kawasan yang telah diperuntukkan, disertai pembinaan kemampuan mengelola usaha; Mendorong dunia usaha mengembangkan lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan usaha kecil menengah dan mikro;

Mendorong terbentuknya lembaga independen yang bergerak dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil menjadi usahawan modren dan menengah; Mendorong dan memfasilitasi usaha kecil menengah dan besar melakukan pertemuan bisnis (*business gathering*), agar dapat saling bersinergi dalam mengembangkan usaha masing-masing.

2) Memberikan skala prioritas untuk tumbuh dan berkembangnya penanaman modal termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia serta pengembangan prasarana dasar, sehingga mampu berfungsi sebagai pilar pembangunan kota.

3) Penciptaan lapangan kerja produktif bagi angkatan kerja, melalui program-program khusus yang bersifat padat karya, bagi tenaga kerja yang belum tertampung di pasar kerja, sampai mereka dapat ditampung di pasar kerja secara permanen.

4) Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota, masyarakat dan swasta, untuk lebih menjamin ketahanan pangan kota melalui penguatan kelembagaan ketahanan pangan, dan jaminan ketersediaan pangan secara terus menerus dan berkesinambungan.

5) Meningkatkan efisiensi produksi melalui berbagai stimulan bagi pelaku pertanian kota, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi prasarana pendukung, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

6) Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan, melalui pemantauan ketersediaan pangan, dan monitoring harga bahan pangan, penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan bahan pangan, serta jaminan keamanannya secara berkala, periodik dan berkesinambungan, termasuk penguatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan distribusi pangan.

7) Secara khusus, ketahanan ekonomi regional diarahkan untuk lebih menjamin ketersediaan jumlah cadangan bahan pangan pokok perkapita, pengeluaran riil perkapita, stabilitas harga bahan pokok dan sekunder/tertier, serta menjamin terhindarnya seluruh warga kota dari kemungkinan terjadinya kasus kekurangan pangan. Untuk itu juga dikembangkan sistem diteksi dini kerawanan pangan.

8) Menciptakan kondisi makro ekonomi kota yang lebih stabil, dan lingkungan bisnis yang kompetitif, serta pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas yang merupakan *necessary condition*.

9) Menggeser kedudukan, fungsi dan peran Pemerintah Kota lebih dominan dari aktor dan regulator menjadi mitra dan supervisor, namun pada bidang tertentu keberadaan Pemerintah Kota tetap bersifat mutlak.

10) Meningkatkan kedudukan, fungsi, peran dan kontribusi usaha kecil menengah serta koperasi dalam pasar lokal, regional, nasional, bahkan eksport. Untuk itu, pembinaan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi diarahkan kepada usaha meningkatkan efisiensi usaha kecil menengah dan koperasi, pengembangan produk dan kualitas, informasi pasar, bantuan keuangan, serta bantuan rekayasa teknologi.

11) Pengembangan produk, peningkatan keterkaitan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar, sehingga dapat bersaing di pasar lokal, regional, nasional dan global sekaligus mendorong ekspor, dan ketahanan ekonomi lokal.

12) Memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global, dan regional, untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan yang dihasilkan, melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, khususnya oleh sektor usaha kecil menengah dan koperasi, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.

13) Menjadikan perdagangan regional, nasional, dan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kota melalui perluasan pasar, dan dukungan kelengkapan struktur pasar yang modern.

e. Mendorong Perkembangan Ekonomi Regional

1) Pengembangan ekonomi kota yang didasarkan kepada potensi ekonomi yang tersedia, sehingga mendorong terjadinya spesialisasi dan keuntungan aglomerasi atau lokasi dalam proses pembangunan ekonomi kota, dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah dan potensi wilayah sekitarnya (*hinterland*).

2) Mengadakan peningkatan investasi terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan pendukung yang menunjang kegiatan perekonomian kota, dan regional, melalui sumber pembiayaan regional/ nasional dan swasta.

3) Bekerjasama mengembangkan komoditas-komoditas unggulan daerah yang potensial berdasarkan konsistensi daya saing yang dimiliki, dan keunggulan kompetitif per komoditas, serta *market share* (pangsa pasar).

4) Mendorong penerapan iptek, dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa yang berdaya saing ekspor, khususnya produksi yang dihasilkan usaha kecil menengah dan koperasi yang unggul.

5) Mengintensifkan kerjasama regional (antar daerah/kota dan propinsi) melalui peningkatan kerjasama antar wilayah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kota yang lebih terintegrasi dan menguntungkan.

6) Mendorong ketersediaan kebutuhan sumber daya energi listrik, gas, air, telekomunikasi, dan infrastruktur pokok dan penunjang lainnya sebagai daya dukung pengembangan industri dan aktivitas ekonomi secara regional.

7) Mengembangkan keterkaitan antar industri, mendorong peningkatan produksi yang berorientasi kepada barang-barang konsumsi lokal, serta ekspor termasuk pengembangan investasi dan skema pembiayaannya .

f. Meningkatkan Daya Saing Lokal, Regional dan Nasional

1) Mewujudkan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota melalui peningkatan fasilitas dasar dan penunjang kegiatan ekonomi yang memadai; peningkatan mutu pasar tradisional yang telah ada, membangun pasar modren di kawasan lingkar luar, dengan penataan lingkungan pasar yang bersih, rapi, indah dengan fasilitas pendukung yang baik, penyediaan infrastruktur publik yang modren di kawasan lingkar luar kota, membangun sistem transportasi massal kota yang terjangkau, modren dan terintegrasi antara lingkar luar dan lingkar dalam kota, serta secara regional dan nasional.

2) Mendorong industrialisasi yang menggerakkan kegiatan di berbagai sektor ekonomi kota khususnya sektor jasa, melalui ketersediaan prasarana dan sarana yang semakin meningkat kualitas serta skalanya. Sebagai Kota Metropolitan yang cenderung mengalami proses industrialisasi yang cukup menonjol, proses transformasi ekonomi kota dalam jangka panjang harus diikuti proses perubahan spatial yang semakin meluas dan menjangkau banyak wilayah. Oleh karena, Kota Medan diperkirakan akan berkembang sebagai *growth center* yang lebih kuat,

dibandingkan dengan wilayah lainnya, karena manfaat dari mesin ekonomi dan *growth triangle* hasil IMT-GT, maka kecenderungan tersebut dimanfaatkan dengan maksimal untuk memenangkan persaingan di kawasan regional.

3) Meningkatkan daya saing lokal, regional dan nasional, dengan kemitraan yang tidak saling mematikan, tetapi saling ketergantungan, membutuhkan dan saling menguntungkan.

4) Mengutamakan pembangunan sektor industri dan sektor jasa yang menghasilkan produk unggulan terspesialisasi, dengan mengacu kepada prinsip *keunggulan kompetitif* dan *keunggulan skala ekonomi* yang dimiliki.

5) Industrialisasi dan komersialisasi perekonomian kota diarahkan untuk mendorong proses pengembangan wilayah secara bersama-sama, untuk mengantisipasi konfigurasi SWOT *(Strength, Weakness, Opportunities, Threats)* yang berubah cepat dari waktu ke waktu. Kebijakan tersebut diarahkan, baik untuk produk barang maupun jasa pada perekonomian kota. Hal ini akan mendorong persaingan yang sehat diantara perusahaan-perusahaan asing dan domestik yang berinvestasi di Kota Medan.

6) Penyelenggaraan pemerintahan kota dalam rangka mewujudkan Kota Medan yang maju, sejahtera, berkeadilan dan religius, diarahkan kepada penerapan prinsi-prinsip tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif. Untuk itu, dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan budaya kerja aparatur, penerapan disiplin melalui penghargaan dan hukuman yang objektif, transparan dan adil, mengefektifkan pengawasan internal dan pengawasan masyarakat, peningkatan kesejahteraan aparatur, penerapan sistem karier berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja.

7) Mengembangkan birokrasi kota yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif melalui penataan fungsi kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas, kreativitas, inovasi dan responsivitas pada semua lini, tingkat dari satuan kerja perangkat daerah, serta penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8) Mengembangkan mutu pelayanan umum yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha, melalui penataan sistem pelayanan publik, penerapan budaya baru pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan umum dengan prioritas pelayanan dasar dan pelayanan perizinan penanaman modal.

IV.2. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berilmu Pengetahuan, Menguasai Teknologi, Beriman dan Bertaqwa Serta Mandiri

Kemampuan, keberhasilan, dan manfaat pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan dapat dicapai, bila seluruh komponen pembangunan kota bekerja keras, bahkan lebih dari yang telah dikerjakan sebelumnya. Hal tersebut juga harus didukung kemampuan merebut dan menciptakan persaingan, bekerjasama dengan berbagai pihak secara harmonis, serta tetap menjaga kepribadian dan jati diri sebagai warga Kota Medan yang sangat majemuk. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia Kota Medan yang benar-benar handal, menguasai iptek, imtaq, dan mandiri.

Untuk mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, maka pembangunan kota dalam jangka panjang 20 tahun ke depan diarahkan untuk ; (1) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (3) Meningkatkan kualitas penduduk; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan umum; (5) Meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat; (6) Meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif dan produktif; (7) Meningkatkan kerjasama regional dan internasional yang saling ketergantungan,

membutuhkan dan menguntungkan; serta (8) Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan kota.

a. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

1) Pembangunan pendidikan ditujukan untuk membentuk karakter anak didik yang bermoral, beretika, madani dan berbudaya sekaligus menghasilkan sumber daya manusia cerdas dan mandiri, yang mampu menciptakan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa sesuai kebutuhan masyarakat global. Untuk itu, pembangunan pendidikan diarahkan untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan daerah termasuk kurikulum, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, berwawasan lingkungan, dan menyeluruh agar berdaya saing global, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek, penentuan standard baku pencapaian keberhasilan pembelajaran, pembinaan minat kewirausahaan. termasuk teknologi lokal, termasuk memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Menyelenggarakan pembelajaran modren berbasis teknologi dan jaringan, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, berdaya tarik, dan humanis. Untuk itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga pendidik, meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga mampu berfungsi secara optimal, pencapaian standard kompetensi guru, meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, serta meningkatkan keterampilan pegawai dalam pelayanan administrasi sekolah secara komputerisasi. Di samping itu penerapan teknologi haruslah yang ramah lingkungan, sehingga mampu menciptakan kualitas SDM seutuhnya.

3) Menyelenggarakan sistem manajemen pendidikan daerah yang adaptif, efektif dan efisien. Untuk itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk dapat mengembangkan sistem manajemen pendidikan demokratis, terapan dan akuntabel, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, untuk menjamin kualitas hasil belajar yang baik, pengembangan pengajaran berbasis komputer dan jaringan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran, inovasi pembelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam praktik pembelajaran berbasis teori belajar dan pembelajaran, meningkatkan penguasaan tenaga pendidik terhadap kurikulum dan materi ajar, konsep dan prinsip-prinsip didaktik-metodik, meningkatkan layanan pendidikan yang bermakna, peningkatan minat motivasi belajar peserta didik, pengembangan lingkungan sekolah menuju komunitas belajar, pencapaian standard nasional pendidikan, penataan ulang sistem manajemen sekolah, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kelas, laboratorium, pencapaian standarisasi tenaga pendidik, sertifikasi tenaga pendidik, modernisasi sistem pengajaran, pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan lokal, berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, perbaikan secara berkesinambungan sistem manajemen pendidik sesuai perkembangan dan kebutuhan pelanggan lembaga pendidikan, meningkatkan sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi sekolah secara komputerisasi serta penerapan manajemen berbasis sekolah.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar baku yang ditetapkan. Untuk itu, pembangunan pendidikan diarahkan juga untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi gedung sekolah, modernisasi peralatan laboratorium, penataan perpustakaan dan keberadaan buku yang mutakhir, mendorong pendidikan sekolah standar nasional dan internasional, penggalangan partisipasi masyarakat, pengembangan mekanisme pengelolaan mutu pendidik berbasis masyarakat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tinggi, bebas biaya dan atau biaya rendah serta mengupayakan keadilan dalam sistem dan mekanisme pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Semua upaya ini bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas dan bermoral tinggi.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan komprehensif yang bermutu. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan primer, kedaruratan, jangka panjang dan rehabilitasi.

2) Meningkatkan mutu, kemampuan dan hasil guna dari program pendidikan kesehatan *(health education)* dan kesehatan berbasis masyarakat *(community based)* dalam rangka pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan. Untuk itu pembangunan kesehatan kota diarahkan juga untuk dapat mengefektifkan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat pada tatanan sekolah, tempat kerja, institusi kesehatan masyarakat, dan kelompok tertentu.

3) Mewujudkan kesehatan untuk semua *(health for all)* melalui penciptaan lingkungan sehat. Untuk itu pembangunan kesehatan kota diarahkan juga untuk dapat meningkatkan kualitas udara, air, pencegahan dan penanggulangan keracunan, peningkatan rumah sehat *(healthy homes)* dan masyarakat sehat *(healthy community)*, peningkatan pengelolaan limbah dan peningkatan surveilans lingkungan kota.

4) Mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota diarahkan juga untuk peningkatan pencegahan penyakit melalui imunisasi, pemberantasan TBC, peningkatan cakupan imunisasi melalui *Universal Child Immunization*, pencegahan terjadinya resistensi terhadap antimikroba serta peningkatan pengamanan vaksin.

5) Memperbaiki dan meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prenatal, penurunan angka kesakitan dan kematian ibu melahirkan, janin, bayi dan balita melalui pemanfaatan air susu ibu.

6) Menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat merokok dan terpapar asap rokok *(secondhand smoke)*. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota juga diarahkan untuk pengendalian konsumsi rokok pada kelompok masyarakat, penghentian merokok dan pengobatan, pencegahan keterpaparan terhadap rokok, serta perubahan lingkungan dan sosial dalam pengendalian rokok.

7) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, kebugaran fisik. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, melalui pencegahan dan penanggulangan dini, peningkatan kebugaran fisik pada anak, remaja dan dewasa.

8) Menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seksual *(sexually transmitted diseases)* termasuk HIV/AIDS. Untuk itu, pembangunan kesehatan kota diarahkan juga untuk meningkatkan perilaku seksual yang bertanggung jawab, peningkatan ketahanan rumah tangga, peningkatan akses masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual dan komplikasinya, pencegahan penularan HIV serta penyakit yang berhubungan dengan HIV dan kematian akibat HIV.

9) Pembangunan kesehatan dalam 20 tahun ke depan juga mencakup gerakan keluarga berencana, pengamanan makanan dan penanggulangan kegemukan. Untuk itu, kebijakan kesehatan kota juga diarahkan bagi peningkatan upaya keluarga berencana, penundaan dan penjarangan kelahiran, pencegahan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, penurunan kesakitan akibat makanan, penurunan frekuensi kegemukan pada anak dan dewasa serta pencegahan terhadap faktor resiko menuju kepada peningkatan usia harapan hidup (*life expectation*).

c. Meningkatkan Kualitas Penduduk

1) Kebijakan jangka panjang peningkatan kualitas penduduk diarahkan untuk menjadikan penduduk tidak hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan kota yang utama. Untuk itu, pembangunan kependudukan dilaksanakan secara sistemik, terpadu dalam rangka pengendalian jumlah, laju pertumbuhan, peningkatan kualitas serta mobilitasnya, sehingga berperan aktif dalam pembangunan kota.

2) Kebijakan kependudukan juga diarahkan untuk dapat mewujudkan administrasi kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi secara nasional, guna mendukung perlindungan hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, kapastian hukum, kemudahan akses pelayanan sosial, dan menghilangkan penyalahgunaan identitas dan dokumen kependudukan yang dapat merugikan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3) Peningkatan kualitas penduduk juga diarahkan untuk dapat mengendalikan kuantitas penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang, yang ditempuh melalui pelembagaan Norma Keluarga Kecil, Berkualitas dan Sejahtera. Untuk itu, ditingkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, dan bermutu, sehingga secara langsung juga akan mendorong adanya pengaturan kelahiran, penurunan angka kematian ibu, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

4) Kebijakan kependudukan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan peningkatan status perempuan, perlindungan terhadap anak dan remaja, serta pemberian pembinaan terhadap lansia. Sedangkan mobilitas penduduk diharapkan selaras dengan upaya-upaya pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, ketahanan lokal, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pengendalian tingkat kepadatan penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, sekaligus mendorong asimilasi pembauran kultural dan azas pembangunan kota yang berkelanjutan.

5) Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan juga diarahkan untuk memfasilitasi perencanaan serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan kependudukan, sekaligus membangun sistem administrasi kependudukan berdasarkan komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan kota, sehingga secara nyata dapat mendorong terwujudnya hak, kewajiban dan sanksi hukum dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

6) Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dan daya guna hasil pendataan kependudukan, untuk kepentingan umum melalui komputerisasi, dan pemanfaatan teknologi lainnya, guna ikut mendukung terbangunnya *data base* kependudukan nasional.

d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum

1) Kualitas pelayanan umum yang ditingkatkan tidak terbatas hanya pada jasa pelayanan umum oleh Pemerintah Kota kepada warga kota, tetapi juga yang diselenggarakan pihak swasta, dengan atau tanpa pembayaran, guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

2) Pemberian pelayanan umum prima, yang diwujudkan melalui penyederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu terhadap prosedur/tata cara pelayanan umum.

3) Menata manajemen pelayanan umum, dengan cara mendorongnya dalam iklim kompetisi, berorientasi kepada kebutuhan pelayanan masyarakat, akuntabilitas pelayanan, memposisikan pelayanan umum sebagai hak dan kewajiban warga kota, tidak diskriminatif dan demokratis.

4) Mendorong perekonomian kota menjadi ekonomi jasa, yang ditandai oleh besarnya jumlah orang bekerja di sektor jasa, baik yang bermotif ekonomi, sosial dan politik.

5) Pemberian pelayanan umum secara cuma-cuma dalam jumlah dan kualitas yang semakin baik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.

6) Peningkatan kualitas pelayanan umum bertujuan menjadikan Kota Medan sebagai sentra kesehatan publik bagi penduduk Indonesia dan mancanegara.

e. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Masyarakat

1) Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat, baik yang bersifat sosial, ekonomi, latar belakang adat, agama, profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang termasuk interes group maupun presure group, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan kota. Untuk itu, pembinaan dan keterlibatan Pemerintah Kota lebih ditujukan kepada upaya membangun kedewasaan warga kota, sekaligus mendorong munculnya kelas menengah yang kuat, diberbagai bidang pembangunan kota.

2) Kualitas kelembagaan masyarakat juga ditingkatkan melalui peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang efektif, antara Pemerintah-Masyarakat-Dunia Usaha, secara interaktif untuk mendorong akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, sekaligus meniadakan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, atau salah pengertian diantara komponen-komponen pembangunan kota.

3) Pembinaan kelembagaan masyarakat juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai demokratis melalui peningkatan kesadaran budaya, penghormatan HAM, pembentukan cara berfikir, bersikap dan berperilaku toleran, anti kekerasan, persaudaraan, kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta bekerjasama untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

4) Penguatan kelembagaan masyarkat juga diarahkan untuk dapat memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan perempuan, kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, agar dapat secara efektif memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan serta anak.

5) Peningkatan kelembagaan mayarakat juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan kota, sekaligus dapat menghasilkan prestasi, terutama di bidang olah raga, budaya dan kesenian, serta iptek, untuk menjamin estafet kepemimpinan dan keberlanjutan pembangunan kota.

6) Penataan kelembagaan masyarakat juga diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, sehingga warga kota memiliki pemahaman dan ketaatan hukum yang baik menyangkut hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, guna meningkatkan keterlibatannya dalam proses pembangunan kota.

7) Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat sebagai prakarsa dan inisiatif masyarakat diarahkan sebagai mitra Pemerintah Kota, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan kota, yang selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang pembangunan kota, termasuk mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam penggalian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan kota yang tersedia.

8) Perkuatan kelembagaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, menyiapkan media-media efektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota, sekaligus mendorong daya kreatif dan inovatif masyarakat untuk dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

9) Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan upaya masyarakat bersama-sama Pemerintah Kota dalam penyediaan dan pelayanan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui penyediaan prasarana dan sarana pelayanan sosial yang lebih berkualitas.

10) Kelembagaan masyarakat yang berkualitas juga diarahkan untuk membangun kesadaran beragama, menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

f. Meningkatkan Perilaku Masyarakat yang Kreatif, Inovatif dan Produktif

1) Perilaku kreatif, inovatif dan produktif warga kota, diarahkan untuk mendorong masyarakat dapat secara baik mengurus kepentingan sendiri, sehingga secara individu, atau kolektif dapat lebih mandiri.

2) Perilaku kreatif, inovatif dan produktif warga kota, dibangun dengan cara menjadikan masyarakat lebih berperan sebagai subyek pembangunan kota. Untuk itu, perlindungan kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan gagasan-gagasan, inisiatif yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraannya, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan umum, akses pembiayaan, dan yang lainnya, termasuk membangun karakter yang mendorong terbentuknya kemandirian.

3) Kreativitas, semangat bersaing, inovasi, dan produktivitas masyarakat, juga diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang maju, berkesejahteraan, berkeadilan dan religius. Untuk itu, hubungan-hubungan yang bersifat hirarkhis antara Pemerintah dengan masyarakat, dan atau antar masyarakat harus diminimalkan, dan digantikan dengan hubungan-hubungan yang bersifat kesetaraan, kesejajaran, serta yang bersifat interaktif.

4) Pengembangan kreativitas, semangat bersaing, inovasi dan produktifitas masyarakat juga dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Kota, bantuan biaya, bantuan Tenaga penyuluh, pembinaan tata nilai, adat kebiasaan, sikap mental masyarakat, sehingga selaras dengan kebutuhan pembangunan kota.

5) Pembentukan sifat kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif masyarakat juga diarahkan untuk mendorong peningkatan disiplin bersama, sekaligus menghargai kualitas. Untuk itu, dilakukan transformasi semangat kewirausahaan, baik melalui penyuluhan, keteladanan, pemberian kesempatan, pembelajaran melalui program pendamping, sehingga masyarakat dapat melihat potensi dirinya dan peluang dari setiap perubahan yang ada dari lingkungan stratejiknya.

6) Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan berdasar sudut pandang masyarakat sendiri, sehingga berbagai perubahan yang dilakukan masyarakat sebagai ciri penting perilaku kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif masyarakat, merupakan bagian terintegrasi dengan upaya membangun karakter kota dan bangsa secara nasional.

7) Kreativitas, semangat bersaing, inovasi dan produktivitas masyarakat tidak semata-mata bertumpu kepada faktor-faktor modal, tanah, teknologi, tetapi juga lebih didasarkan kepada cara bekerja cerdas, berdasarkan ilmu pengetahuan, (modal intelektual).

8) Modal intelektual masyarakat dibangun secara sistematis, berkelanjutan, dan komprehensif, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, pengembangan tradisi ilmiah dengan dukungan kuat Pemerintah Kota. Untuk itu, masyarakat kreatif, inovatif, dan produktif dibentuk dengan pembelajaran, dan membiasakan masyarakat berfikir sistematik untuk mewujudkan tujuan bersama, memiliki kematangan pribadi, model, mental, serta membangun visi bersama.

9) Kreativitas, semangat bersaing, inovasi dan produktivitas masyarakat diarahkan untuk mewujudkan visi serta misi pembangunan kota jangka panjang, sesuai dengan sumber daya pembangunan kota yang dimiliki, yang secara langsung akan mendorong munculnya produk-produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing.

10) Produktivitas masyarakat ditingkatkan melalui perbaikan efisiensi kelembagaan, peran kepemimpinan, peningkatan motivasi, perbaikan manajemen sumber daya manusia, perbaikan budaya kerja dengan selalu responsif terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan stratejik, baik yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

g. Meningkatkan Kerjasama Regional dan Internasional yang Saling Ketergantungan, Membutuhkan dan Menguntungkan

1) Kerjasama antar daerah, regional dan internasional diharapkan mendorong Kota Medan memiliki kekhususan produk unggulan daerah, sehingga dapat dihasilkan secara efisien serta berdaya saing, di pasar lokal, regional, dan ekspor.

2) Pembangunan ekonomi kota yang kompetitif tidak dimaksudkan untuk mendorong adanya persaingan (kompetisi) antara Kota Medan dengan Kabupaten/Kota yang lain, sehingga perkembangan Kota Medan tidak dianggap akan menghalangi perkembangan daerah yang lain. Kerjasama antar daerah diarahkan guna mendorong pertumbuhan bersama dengan daerah lain melalui bentuk-bentuk kerjasama industri, perdagangan, keuangan, SDM, permodalan, dan infratruktur secara kewilayahan.

3) Peningkatan kerjasama antar daerah, dilakukan dengan menghilangkan ego daerah, untuk mendayagunakan keunggulan komperatif dan kompetitif masing-masing daerah, sehingga memajukan daerah secara regional, sekaligus memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan pembangunan nasional.

4) Membangun sistem jaringan antar daerah secara regional, baik untuk meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan antar daerah, maupun kerjasama lintas batas dan regional, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber-sumber ekonomi yang dimiliki di masing-masing daerah.

5) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antar Kota Medan dengan Kabupaten/Kota yang menjadi hinterland, yang dikemas dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan baru pusat perdagangan eks Bandar Polonia-Belawan dan Kuala Namu.

6) Kerjasama antar daerah, regional, dan internasional ditingkatkan, sehingga perekonomian kota menjadi bersifat regional, dan internasional, sedangkan kerjasama antar pengusaha didorong untuk membentuk koperasi yang manfaatnya dirasakan bersama. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu produk, menekan biaya produksi, bekerja efisien, sehingga harga-harga produk akan semakin bersaing (kompetitif).

h. Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Kota

1) Pembiayaan pembangunan kota, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota baik yang menjadi kewenangan daerah maupun di luar kewenangan kota, meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Propinsi, dan Pusat, maupun sumber pembiayaan sektor swasta dan masyarakat.

2) Pembiayaan pembangunan kota diarahkan untuk memenuhi upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan progresif, melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya penanaman modal asing dan domestik, sebagai pilar untuk menciptakan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.

3) Meningkatkan kemampuan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk dengan mengembangkan analisis, instrumen, dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi tambahan dalam produksi daerah, atau memunculkan ekonomi biaya tinggi dan penurunan daya beli masyarakat.

4) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan kota dengan sumber-sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Propinsi, baik yang bersifat bantuan kepada daerah maupun melalui azas dekonsentrasi.

5) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan kota dengan sumber-sumber pembiayaan sektor swasta, dan masyarakat termasuk dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui peningkatan iklim penanaman modal yang semakin kondusif, untuk menjadikannya mesin penggerak pembangunan kota.

6) Dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan, sekaligus untuk mendorong ekselerasi pembangunan kota, maka selisih negatif, pendapatan dan belanja daerah, dimungkinkan ditutupi dengan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, termasuk kemungkinan menerbitkan obligasi daerah, dalam jangka panjang, dalam rangka menunjang ketersediaan prasarana dan sarana kota sebagai bagian dari kemandirian daerah.

7) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik disisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sehingga cukup efisien melalui pelaksanaan administrasi keuangan daerah yang semakin baik serta handal, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabilitas.

8) Kemampuan pembiayaan pembangunan kota juga ditingkatkan, melalui peningkatan kontribusi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, dalam berbagai proyek investasi yang relevan, termasuk mendorong berkembangnya lembaga keuangan nasional dan mikro, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kota.

9) Pembiayaan Pemerintah Kota dititikberatkan kepada upaya meningkatkan kemampuan penyediaan pelayanan umum, seperti penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana sosial ekonomi yang berfungsi sebagai stimulan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah.

IV.3 Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kota Yang Modern, Handal dan Berwawasan Lingkungan

Sebagai Kota Metropolitan, keadaan Kota Medan masa depan yang ingin diwujudkan adalah Kota dengan fisiknya yang modern, didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang lengkap dan handal, sekaligus memiliki lingkungan kota yang nyaman, asri dan berwawasan lingkungan. Kemauan menjadikan Medan sebagai Kota Metropolitan yang modern, asri, dan ramah lingkungan tersebut, menuntut adanya penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang handal. Oleh karena itu, pengembangan Kota Medan 20 tahun ke depan terkait erat dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai. Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) merupakan stimulus bagi pengembangan kegiatan investasi pemanfaatan ruang kota.

Pencapaian prasarana dan sarana kota yang modern, handal, asri dan berwawasan lingkungan dilakukan dalam 5 (lima) pilar utama arah pembangunan prasarana dan sarana kota 20 tahun ke depan, yang terdiri dari :

1. **Pembangunan Pusat Kota dan *Central Bussiness District* (CBD) sebagai *landmark* Kota, dengan fungsi pusat pelayanan jasa perdagangan dan keuangan skala regional dan internasional,** yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang modern, pusat pertemuan dan distribusi (stasiun utama) *mass rapid transportation,* disertai dengan penyediaan ruang publik yang memadai, antara lain hutan kota dan pusat pemerintahan baru serta menara telekomunikasi (Medan Tower) di area eks bandara polonia, yang ditunjang dengan manajemen lalu lintas dalam pusat kota yang kompak. Akan dibangun jalan yang menghubungkan CBD Polonia dengan Outer

Ringroad yang lebarnya tidak kurang dari lebar Outer Ringroad saat ini (± 30 meter dengan dua jalur). Jalur dari CBD ke arah lainnya juga akan dibuat lebar.

2. **Pengembangan sub pusat-sub pusat kota dairahkan pada 4 (empat) sisi Kota Medan yaitu di Utara : Belawan, di Timur/Tengara : Simpang Amplas, di Barat : Kampung Lalng dan di Selatan : Simpang Kuala atau Setia Budi. Gedung bertingkat tinggi disarankan menyebar di pusat kota dan sub pusat kota.** Selain adanya sub-pusat kota maka juga akan terus didorong tumbuhnya kota satelit seperti Sunggal, Marelan, Hamparan Perak, Percut, Tembung, Deli Tua, Tanjung Morawa, Kuala Namu, Belawan, dll), yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa skala wilayah sampai regional, dengan mengedepankan **kerjasama *Regionalisasi Mebidang***. Tiap sub wilayah, terdiri atas satuan-satuan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana skala lingkungan.

3. **Mengembangkan jaringan jalan penghubung radial konsentris yang menghubungkan pusat kota dan kota-kota satelit maupun bagian wilayah kota dengan jaringan jalan lingkar luar yang telah menyatu, dan pembangunan jalan lingkar paling luar (*Outer Outer Ring Road*), Angkutan massal kereta api (baik monorail, fly over ataupun subway)** dengan menghidupkan kembali jalur rel yang telah ada, maupun jalur melingkar baru, jembatan-jembatan penghubung baru, serta prasarana pendukung lainnya secara marata, berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota.

4. **Mengedepankan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pembiayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dengan konsep partisipasi dan kemitraan** dalam bentuk pemberian dana stimulan bagi pembangunan kota secara swadaya, fasilitasi penyaluran dana bantuan, swastanisasi pengelolaan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya yang saling menguntungkan.

5. **Menjaga keseimbangan lingkungan dan mempertahankan tingkat daya dukung lahan dengan relokasi beberapa fungsi** (industri padat karya, pendidikan tinggi, permukiman) ke wilayah hinterland, **pengendalian intensitas pembangunan kawasan lindung dan rawa, pembangunan hutan kota 20% dari areal Eks Bandara Polonia, gerakan penanaman pohon di setiap halaman dan atap bangunan ruko dan bangunan tinggi, serta pembangunan folder sumur resapan baru di setiap Kecamatan atau bagian wilayah kota** (bagian bawah folder, bagian atas berupa taman/lapangan/kolam/ lahan pertanian, dll), dengan rencana tata ruang yang lengkap, yang dilaksanakan dan dievaluasi secara konsisten.

Dalam skala nasional, pembangunan prasarana dan sarana telah dilakukan dalam konsep keterpaduan berdimensi jangka menengah 5 (lima tahunan) yakni melalui program P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu atau *Urban Infrastructure Development Programme*). Program yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia termasuk Kota Medan tersebut, memiliki banyak nilai positif di samping terdapat pula berbagai kelemahan. Penyempurnaan program P3KT digunakan sebagai prinsip dan pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota Medan tahun 2006-2025, khususnya bidang prasarana dan sarana kota.

Prasarana dan sarana (infrastruktur) diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota yang secara umum terdiri dari 7 kelompok besar (Jalan Kota, Air Bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Pengendalian Banjir, Peningkatan Sarana Perkotaan, dan Pembangunan Perumahan/ Permukiman). Prasarana adalah peralatan-peralatan dan instalasi-instalasi pelayanan publik yang dibangun untuk mendukung berfungsinya satu sistem tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sedangkan Sarana adalah fasilitas dasar untuk umum yang digunakan mendukung kegiatan sosial dan ekonomi penduduk. Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan

optimal atau agar ruang-ruang dapat berfungsi sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

Bidang penataan sarana kota termasuk dalam penataan ruang kota yang meliputi alokasi ruang, pembangunan dan pengaturan fasilitas publik, baik yang dikelola Pemerintah maupun yang dikelola swasta/lembaga kemasyarakatan. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana olah raga/rekreasi, sarana sosial lainnya (panti asuhan, rumah jompo, kuburan), sarana perekonomian masyarakat (pasar, perbankan, lingkungan industri/pemasaran, dll), dan sarana ruang terbuka hijau. Sedangkan bidang pembangunan perumahan/pemukiman terdiri dari pengadaan perumahan, perbaikan kampung (termasuk penataan kawasan kumuh), perbaikan prasarana kawasan pasar, pengadaan rumah sewa, peremajaan kota, serta pembangunan Kota Baru.

Kondisi yang kerap terjadi pada kawasan perkotaan di Indonesia adalah sering tidak beriringnya antara perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana, penataan dan pengendalian ruang/tanah, dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi. Ketiga komponen tersebut kerap terbentuk dan berjalan sesuai mekanisme pasar tanpa terencana, sehingga sering menimbulkan kekurangan pelayanan (*lack of services*) maupun kesemrawutan penggunaan ruang kota. Dengan kondisi ini, suatu kota seperti Kota Medan akan sulit mencapai kenyamanan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, tanpa didukung penatalaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang baik pula.

Permasalahan utama pembangunan Kota pada saat ini adalah kebutuhan terhadap peningkatan prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan, khususnya di bidang transportasi dan pemukiman untuk mendukung pertumbuhan kota yang sangat pesat, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Di sisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana kota sangat terbatas, dibanding pertumbuhan permintaan akibat perkembangan dinamika kota, maupun akibat urbanisasi yang terjadi. Keterbatasan kemampuan pembiayaan tersebut juga semakin besar, jika dikaitkan dengan beban peran dan fungsi yang diemban Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi dan salah satu Pusat Kegiatan Nasional. Penyediaan pelayanan di wilayah perbatasan juga menjadi permasalahan yang potensial muncul, bila kerjasama pembangunan dengan Kabupaten/Kota tetangga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Regulasi-regulasi dilakukan untuk mewujudkan struktural ruang sesuai dengan yang direncanakan, karena melibatkan berbagai sektor terkait di dalamnya. Penyediaan PSD perkotaan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) saja, tetapi juga untuk terselenggaranya fungsi kota dalam konteks sistem perkotaan (*development approach*).

Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana kota, dilakukan antara lain dengan peningkatan manajemen pembangunan kota berupa sinkronisasi regulasi pembangunan antara sektor terkait. Kemampuan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana dilakukan dengan peningkatan kontribusi Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pengembangan prasarana dan sarana di Kota Medan, kerjasama pembangunan dengan Kabupaten/Kota sekitar, maupun kerjasama pembangunan dengan pihak swasta.

Melalui upaya-upaya tersebut, prasarana dan sarana perkotaan selain berperan sebagai stimulus perkembangan sosial ekonomi kota, juga berperan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Prasarana dan sarana sosial ekonomi merupakan urat nadi bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kota pada masa yang akan datang, sekaligus salah satu faktor penentu untuk mewujudkan Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Religius.

Oleh karena itu, pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota dalam 20 tahun ke depan, merupakan bagian integral dari pembangunan kota. Penyediaan prasarana dan

sarana sosial ekonomi akan sangat menentukan upaya meningkatkan produktivitas pembangunan kota, sekaligus mewujudkan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan warga kota yang semakin baik.

a. Pengelolaan tata ruang yang berdaya guna, dan berhasil guna serta berkelanjutan

1) **Penyusunan rencana tata ruang kota yang berkualitas** diarahkan agar rencana tata ruang dapat berdaya guna dalam perwujudan ruang kota yang modren dan berkeadilan. Rencana Tata Ruang Kota Medan yang berkualitas dicapai melalui penyusunan rencana yang lengkap secara materi, lengkap keseluruhan wilayah dan lengkap ke dalaman (rencana makro, detail, rinci/teknis, maupun rencana tata bangunan dan lingkungan), *up to date* serta mampu mengarahkan Kota Medan menjadi Kota maju yang berwawasan lingkungan; kebijaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan dapat diketahui oleh semua pihak yang memerlukannya; proses perencanaan kota dan penataan bangunan dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan sampai tahap monitoring/pengawasan dan evaluasi; sinergi dengan rencana tata ruang yang lebih tinggi (propinsi dan nasional) dan akomodatif terhadap kemungkinan perubahan dinamika kota dengan meminimalisir potensi dan dampak negatif bagi kerusakan dan pelestarian lingkungan.

2) **Pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan transparan** sehingga menjamin kesinambungan hasil guna rencana dan berkaitan antar sektor, antar kawasan, serta antar waktu. Pengelolaan pemanfaatan ruang kota dilakukan melalui penekanan, setiap kebijaksanaan disusun agar saling berkaitan, dapat selaras dan mencakup kesinambungan berbagai sektor pembangunan; penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan menengah berpedoman pada rencana tata ruang dan rencana tahapan pembangunan kota yang telah ditetapkan; evaluasi dan revisi rencana tata ruang secara komprehensif dilakukan secara terus menerus, berkala dan konsisten sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dan untuk evaluasi secara rutin serta revisi partial ruang kota; pengembangan sistem informasi geografis tata ruang dan prasarana kota (*Medan Urban Geography Information System*) untuk alat perencanaan, transparansi dan monitoring pembangunan ruang kota; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kota melalui upaya perbaikan mekanisme pengawasan, pemanfaatan teknologi serta penegakan hukum sehingga menjamin pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, terutama lahan, air dan udara.

3) **Mendorong percepatan relokasi Bandara Polonia ke bandara Kuala Namu** yang memiliki standar pelayanan internasional, dan diarahkan untuk memberikan daya saing dalam pelayanan pelabuhan udara serta peningkatan intensitas pemanfaatan lahan, dengan pembangunan bangunan tinggi (*high building*) yang dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah atasan.

4) **Pembangunan Central Bussiness District (CBD) Polonia dan Belawan sebagai landmark Kota Medan** dengan fungsi pusat pelayanan jasa perdagangan, dan keuangan skala regional dan internasional yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang modern. CBD Belawan diarahkan sebagai wilayah pengembangan waterfront city dengan dukungan pelabuhan dan industri semi hightech, sedangkan CBD Polonia merupakan pusat jasa komersil yang dilengkapi dengan pusat pertemuan, hotel dan apartemen serta distribusi (stasiun utama) mass rapid transportation disertai dengan penyediaan ruang publik yang memadai, antara lain hutan kota, alun-alun (lapangan) sebagai nodes baru kota dan Building pusat pemerintahan Kota Medan baru yang terpadu serta menara telekomunikasi (Medan

Tower) di area eks bandara polonia yang ditunjang dengan manajemen lalu lintas dalam pusat kota yang kompak.

5) **Pengembangan sub pusat-sub pusat berupa pusat-pusat Kecamatan maupun bagian wilayah kota serta mendorong pertumbuhan kota-kota satelit baru yang mandiri di hinterland Kota Medan** (seperti Sunggal, Marelan, Hamparan Perak, Percut, Tembung, Deli Tua, Tanjung Morawa, Kuala Namu, Belawan, dll), yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa skala wilayah sampai regional **dengan mengedepankan kerjasama Regionalisasi Mebidang**. Tiap sub wilayah, terdiri atas satuan-satuan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana skala lingkungan.

6) **Merencanakan jaringan jalan penghubung radial konsentris dan jaringan kereta api Mebidang** yang diarahkan untuk menghubungkan pusat kota dan kota-kota satelit maupun bagian wilayah kota sehingga tercipta sistem pergerakan yang efisien/berhasil guna, dengan melanjutkan pembangunan jaringan jalan lingkar luar maupun lingkar dalam yang telah menyatu; pentahapan pembangunan jalan lingkar paling luar (*Outer Outer Ring Road*); pembangunan sistem angkutan massal kereta api (baik monorail maupun subway) dengan menghidupkan kembali jalur rel yang telah ada dan pembuatan stasiun pusat yang baru di CBD Polonia, maupun jalur melingkar baru; jembatan-jembatan penghubung baru pada jalur-jalur yang telah atau akan padat; serta prasarana pendukung lainnya secara marata, sebagaimana digariskan dalam Rencana Tata Ruang Kota. Dalam tahap awal diupayakan penataan hirarki kelas jalan, penataan ulang jalur trayek angkutan umum dan pembangunan jembatan layang fungsi jalan dan jembatan layang fungsi kereta api. Pembangunan jalan layang diprioritaskan pada Simpang Amplas, Kampung Lalang dan Simpang Kuala.

7) **Pembangunan pertamanan dan ruang terbuka hijau**, diarahkan untuk menciptakan kawasan kota yang maju, nyaman, asri dan menjamin pemenuhan udara yang bersih, serta penyediaan kebutuhan dasar melalui pengadaan lahan, penataan taman yang telah ada; penetapan koefisien dasar bangunan sedang, pada kawasan utara dan kawasan CBD serta kawasan selatan; **pembangunan hutan kota pada sebagian kawasan (minimal 20%) lahan eks Bandara Polonia setelah relokasi**; pengadaan lahan kuburan; mendorong pembangunan ruang terbuka hijau di perumahan, kawasan perdagangan, rekreasi dan industri melalui pengendalian dalam perizinan mendirikan bangunan; serta kampanye dan menganjurkan penanaman tumbuhan dalam wadah pot di atas setiap atap cor bangunan ruko, kantor maupun bangunan tinggi; gerakan bersih lingkungan; pembangunan sarana estetika pertamanan seperti tugu monumental, air mancur, dan bentuk lainnya. Kawasan Wisata Kota yanga da terus dikelola dan ditingkatkan serta ditambah lokasi wisata yang baru yaitu wisata pantai dan wisata bahari di daerah Belawan dan sekitarnya. Pembangunan dermaga khusus guna mendukung wisata bahari dan theme park juga perlu dilakukan.

8) **Pengadaan lahan untuk fasilitas perkotaan dan aset Pemerintah Kota *(Land Banking)*,** terutama di kawasan pinggiran yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan pembebasan lahan/pengadaan lahan, untuk pembangunan prasarana dan sarana kota yang dilakukan melalui ganti rugi tanah untuk pembangunan kota; konsolidasi lahan perkotaan; pengalihan hak dari developer sebagai kewajiban penyediaan fasilitas; pertukaran aset dan bentuk partisipasi swasta/masyarakat lainnya.

9) **Penataan sarana penunjang perkotaan lainnya** terdiri dari reklame, pedagang kaki lima atau sektor informal lainnya, lampu penerangan jalan umum, sarana dan prasarana khusus seperti fasilitas pemadam kebakaran, fungsi pertahanan dan keamanan, musium, balai-balai pertemuan, bangunan pengendali banjir, dsb.

10) **Menjaga dan memanfaatkan secara optimal kawasan lindung serta mengendalikan secara terstruktur alih fungsi lahan** yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, yang diarahkan untuk menjamin keseimbangan ruang kota dan mencegah permasalahan perkotaan yang dapat timbul, melalui keterpaduan seluruh proses perizinan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan; pembebasan lahan pada kawasan lindung; penataan kawasan sempadan sungai dengan pembangunan jalan inspeksi dan taman, sehingga terhindar bangunan yang membelakangi sungai; penggunaan teknologi ramah lingkungan khususnya pada kawasan rawa dan sebagainya.

11) Dalam rangka menjamin pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, strategi yang ditempuh adalah penggunaan teknologi bersih, menggunakan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam menghasilkan barang dan jasa unggul dan berkualitas tinggi serta ramah lingkungan tanpa menimbulkan pencemaran tanah dan limbah, melalui pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan kota.

b. Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju

1) **Sinkronisasi pembangunan prasarana dan sarana** yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan kota, percepatan pembangunan kawasan yang diarahkan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dibatasi, melalui komunikasi dan koordinasi pembangunan antar pelaku pembangunan prasarana dan sarana agar terjadi keselarasan; penyusunan master plan tahapan pembangunan prasarana dan sarana kota; pelaksanaan pembebasan lahan yang terintegrasi; pembentukan badan kerjasama regionalisasi prasarana Mebidang; dan pembangunan sistem informasi tata ruang serta prasarana perkotaan.

2) **Pendistribusian pembangunan prasarana dan sarana ke kawasan lingkar luar** untuk pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata, serta mempercepat pertumbuhan kawasan lingkar luar yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan; pembangunan dilakukan dengan perencanaan tata ruang yang komprehensif, lengkap dan operasional; penyusunan rencana tahapan pembangunan yang terintegrasi antar sektor; peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana kota; serta mengkoordinasikan dana-dana bantuan dan dana-dana community development perusahaan-perusahaan besar termasuk BUMN untuk pembangunan sarana dan prasarana wilayah lingkar luar, sebagai pendamping alokasi dana pembangunan kapasitas dan perekonomian masyarakat.

3) **Penataan manajemen pengelolaan prasarana dan sarana,** diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan dan perawatan serta pendayagunaan ekonomis prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh Pemerintah, melalui peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur baik teknis maupun manajerial; penyusunan studi kelayakan pembangunan pada setiap pembangunan skala besar; pelibatan sebagian kegiatan operasional dan pemeliharaan pada swasta maupun kelompok masyarakat dengan sistem kemitraan; serta pendidikan dan pelatihan kelompok masyarakat untuk penyusunan usulan pembangunan maupun dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan.

4) **Pembangunan sistem transportasi kota** diarahkan untuk (a) meningkatkan aksesibilitas dalam pergerakan barang dan orang dari dan ke Kota Medan, (b) Meningkatkan kemudahan pengangkutan barang-barang bahan baku dan hasil produksi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota, (c) menciptakan pemerataan aksesibilitas antar kawasan bagian wilayah kota khususnya pada kawasan lingkar luar dan kota-kota satelit di Kabupaten Deli Serdang, (d) meningkatkan kenyamanan, keamanan, kecepatan pelayanan transportasi, (e) memberikan daya saing pelayanan bongkar muat barang pelabuhan dan bandara skala international. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penataan hirarki kelas jalan Kota Medan; meneruskan dan memelihara jaringan jalan kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP); Pembangunan Jalan Lingkar Luar sisi Timur dan Jalan Lingkar Paling Luar dengan pola kemitraan dengan Kabupaten Deli Serdang; Mengupayakan pelebaran Jalan ke Kota-Kota Satelit seperti Hamparan Perak, Sunggal, Tembung, Namo Rambe, Deli Tua dan kota-kota baru yang akan terbentuk melalui kerjasama pembangunan; pembangunan angkutan umum massal Mebidang dengan sistem Bus, Kereta Api Listrik baik sistem monorail ataupun sub way; mendorong pengalihan rel kereta api yang melintasi pusat kota menjadi di atas jembatan layang rel ataupun di bawah tanah untuk mengurangi persimpangan dan kemacetan; Pengembangan jalur Binjai - Lubuk Pakam dan penyempurnaan jalur-jalur dan lin – lin sub urban, serta Pengembangan Depot dan Gerbong Kereta Api Listrik; pengembangan jalur-jalur penerbangan internasional dan nasional; mendorong peningkatan kecepatan bongkat muat pelabuhan dengan perbaikan manajemen, pengembangan gudang penyimpanan dan terminal peti kemas, serta modernisasi alat bongkar muat; pembangunan jalan dan pelebaran jalan-jalan kolektor kota sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; peremajaan angkutan kota dan pengalihan dari angkutan berkapasitas mikrolet 12 orang menjadi kapasitas 35 orang (minibus); pengembangan jalan tol ke Binjai, Tebing Tinggi, dan ke Kuala Namu; pembangunan jembatan-jembatan penghubung di kawasan perbatasan sisi barat dan timur; pembangunan jembatan-jembatan penghubung dan jalan alternatif untuk menghubungkan kawasan-kawasan yang dipisahkan oleh Sungai Deli dan Sungai Babura serta sungai-sungai lainnya; integrasi antar moda angkutan melalui penataan jalur, route dan pembangunan terminal/stasiun penghubung di pusat-pusat permukiman, dan pusat-pusat ekonomi; peningkatan manajemen rekayasa lalulintas; serta peningkatan kemampuan perawatan sarana dan prasarana transportasi dengan pola-pola kemitraan dan perbaikan pengelolaan. Mendorong terwujudnya jalan penghubung diantara kota satelit guna menghindari kepadatan arus lalu lintas yang melalui pusat kota.

5) **Penataan sistem jaringan jalan dan sistem pergerakan lalulintas angkutan umum untuk mendukung Pelayananan Sistem Angkutan Umum Transportasi Perkotaan Terpadu (SAUTPT)**, yang ditekankan pada upaya keterpaduan sistem pelayanan angkutan umum; aksesibilitas pertukaran (*interchange*) moda yang tinggi, seperti: moda angkutan jalan raya dengan moda kereta api (stasiun), dan atau dengan moda kapal laut (pelabuhan) dan atau moda pesawat udara (bandara); Peningkatan keamanan dan ketertiban lalulintas dan Angkutan Umum; Penataan Angkutan Umum seperti **p**enataan/penertiban pangkalan-pangkalan bayangan dan jumlah armada operasi angkutan umum non trayek dan Penataan jaringan trayek, rute dan jumlah armada angkutan umum bus; Pengaturan pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan pemeriksaan laik jalan kendaraan.

6) **Pengembangan pelayanan penyediaan air bersih** diarahkan untuk mendorong upaya pihak swasta dalam peningkatan kapasitas produksi, perluasan wilayah pelayanan, kualitas air bersih dan peningkatan kepuasan konsumen, serta minimalisasi kehilangan air (*unaccounted for water*) yang dilakukan melalui dukungan dan fasilitasi upaya-upaya pengembangan sumber-sumber air baku baru; pemeliharaan dan perlindungan kawasan sekitar sumber mata air; meneruskan

pembangunan perpipaan primer MMUDP; pembangunan jaringan perpipaan baru dan penempatan reservoir; pemeliharaan dan pengembangan hidran air untuk kebakaran di pusat-pusat permukiman dan pusat-usat kegiatan lainnya; pengawasan secara ketat pemakaian sumur bor air tanah oleh industri, dan kegiatan komersil skala besar; pemeliharaan Bangunan Pengolah Air dan penampungan (*storage*); modernisasi sistem pengolahan (*treatment*) serta peningkatan mutu pelayanan dan konsistensi pengenaan tarif pemakaian.

7) **Pengembangan kelistrikan, gas dan sumberdaya energi lainnya** yang maju, diarahkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan akan sumberdaya energi masyarakat Kota Medan, untuk kebutuhan sehari-hari baik sosial atau rumah tangga, maupun untuk menunjang kegiatan komersial, jasa perdagangan dan industri, dengan pencapaian pemenuhan 100% pada tahun 2025. Tahapan pencapaian pemenuhan kebutuhan berbanding kemampuan penyediaan dalam jaringan gas perpipaan adalah pencapaian 90% pada tahun 2015 serta 81,88% pada tahun 2010. Pengembangan sumberdaya energi diarahkan pada: (a) Pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif, dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan seperti energi dari pembakaran sampah; (b) Mendorong kebijakan desentralisasi tarif sehingga mampu memberikan margin yang menarik bagi investor bidang kelistrikan dan gas perpipaan; (c) mendorong peningkatan infrastruktur yang efektif dan efisien melaui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan. Mendorong pengembangan energi dan pelayanan jaringan dilakukan dengan peningkatan kemampuan pelayanan, antara lain melalui pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan; rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada; serta pembangunan pembangkit baru dengan memberikan kesempatan partisipasi yang semakin luas kepada investasi pihak swasta, terutama swasta nasional atau koperasi atau Pemerintah Kota; peningkatan suplai gas menjadi 364,4 mmscfd dan peningkatan jaringan; Peningkatan kemampuan investasi dari sumber pendanaan lain (investor) melalui kegiatan promosi, kerjasama dan peningkatan tarif yang lebih reliabel; Studi kebutuhan dan peluang pasar pengembangan jaringan gas perpipaan; mendorong peningkatan pasokan dan kapasitas pelayanan; mendukung peningkatan jaringan perpipaan terutama ke rumah tangga sesuai hasil studi yang dilakukan terlebih dahulu; peningkatan kapasitas pelayanan dan pengembangan teknologi.

8) **Pembangunan jaringan drainase** diarahkan pada meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembanguan fisik jalan, jembatan dan saluran drainase; meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan perencanaan sistem saluran drainase; meningkatnya keterpaduan dan pembiayaan pembangunan drainase dengan Pemerintah atasan, Pemerintah daerah tetangga dan donatur pembiayaan lainnya; dan meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase. Kebijakan tersebut ditekankan pada pengembangan Perencanaan, Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase; Pemeliharaan Jaringan Drainase; Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Banjir; dan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana operasional dan Prasarana, peningkatan kemampuan aparatur kota dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan pemeliharaan saluran; serta pencegahan/pengendalian penyempitan saluran akibat pembangunan permukiman.

9) **Program pengendalian banjir** sebagai salah satu permasalahan yang rill dan potensial dalam 20 tahun ke depan diarahkan untuk mengeliminir penyebab banjir yang disebabkan oleh manusia dan melakukan rekayasa penanggulangan penyebab alam, yang dilakukan dengan 4 (empat) strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yaitu meliputi (a) modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona

atau pengaturan tata guna lahan); (b) pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan dan sumur resapan (baik individual maupun komunal); (c) modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi seperti asuransi dan penghindaran banjir (*flood proofing*); serta (d) modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (waduk) atau normalisasi sungai. Program lain dapat dilakukan melalui pengendalian tata guna lahan; pencegahan pembuangan sampah ke saluran dan sungai, pengelolaan DAS, Law *Enforcement,* pengendalian erosi di DAS, Pembangunan Bendungan (DAM), pembuatan kolam retensi; pembangunan check dam (penangkap sedimen); pembuatan polder air di setiap Kecamatan di kawasan lingkar luar, yang diawali dengan pembebasan lahan; pembangunan *floodway* dan sudetan (by pass), tanggul banjir, dan upaya rekayasa teknologi lainnya.

10) **Pembangunan sistem pengelolaan persampahan**, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal pengangkutan sampah yang tepat waktu dan termaksimalisasinya rotasi pengangkutan timbunan sampah. Terwujudnya manajemen pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan yang kondusif dan peningkatan kuantitas pelayanan dalam hal Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan kebersihan dan pengangkutan timbunan sampah hingga 100% pada tahun 2015 melalui (a) Pengembangan manajemen dan operasional kebersihan; (b) Pengembangan dan peningkatan kemitraan peran serta masyarakat; (c) Pengembangan dan peningkatan pelayanan kebersihan; Peningkatan kualitas dan kuantitas kebersihan Kota; (d) Peningkatan PAD dari sektor retribusi pelayanan kebersihan; (e) pemanfaatan teknologi yang berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sampah dan limbah tinja; (e) perbaikan sistem pengelolaan yang dapat meminimalisir produksi sampah dengan sistem daur ulang; dan (f) pengembangan kerjasama dengan mitra swasta dalam menciptakan kebersihan.

11) **Peningkatan pelayanan sistem jaringan sanitasi (*sewerage*)** air limbah domestik, diarahkan untuk pengembangan kesadaran masyarakat dan developer untuk menggunakan teknologi sederhana pembuangan dan pengolahan air limbah setempat (*on site*) di beberapa kawasan yang memungkinkan; pengembangan jaringan pembuangan terpusat (off site) yang telah dibangun oleh proyek MMUDP (SG/12) khususnya pengembangan di kawasan pusat kota dan permukiman padat maupun pusat-pusat permukiman dan jasa komersil yang baru atau akan tumbuh.

12) **Peningkatan kualitas, kuantitas dan keragaman sarana perkotaan** diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan sarana ekonomi, pelayanan umum dan sosial agar memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas Kota Metropolitan yang maju dan handal, melalui pembangunan dan penyebaran sarana lingkungan, pembangunan sarana rekreasi, perdagangan, dan sarana telekomunikasi bertaraf internasional, seperti gedung teater/opera, gedung bursa saham, pusat rekreasi keluarga, komplek/kawasan olahraga terpadu dan sebagainya. Sarana-sarana tersebut dapat ditempatkan di hinterland kota atau di kota-kota satelit yang terletak di Mebidang, dengan sistem pembangunan dan pengelolaan kemitraan, mengingat adanya keterbatasan lahan di dalam Kota Medan.

13) **Pengembangan sarana perekonomian**, diarahkan untuk meningkatkan daya saing Kota Medan sebagai pusat jasa perdagangan dan keuangan nasional, regional serta mendorong tumbuhnya iklim usaha dengan pembangunan fasilitas yang modern, lengkap dan asri, melalui **pembangunan pasar modern dan tradisional dalam skala pelayanan yang terstruktur secara merata di tiap sub pusat kota, dan tiap Kecamatan**; perencanaan alokasi ruang pengembangan kawasan jasa perdagangan dan keuangan serta industri dalam Rencana Tata Ruang Kota berdasarkan analisis yang komprehensif; rehabilitasi dan perbaikan manajemen pengelolaan pasar

tradisional; penataan prasarana penunjang seperti parkir, saluran, sampah dan kamar mandi dalam lingkungan pasar; **pembangunan Central Bussiness District Polonia**; pengembangan pusat-pusat jajan; pembangunan pusat promosi (expo) produk unggulan dan kontak dagang ekspor impor; pembangunan pasar induk sayur/buah, pusat grosir, dan pasar induk kebutuhan pokok; mendorong pembangunan kantor-kantor pelayanan perbankan, lingkungan industri/pemasaran, dan sarana perekonomian lainnya.

14) **Pembangunan sarana sosial lainnya yang tidak memiliki nilai cost recovery** terdiri dari panti asuhan, rumah jompo, kuburan diarahkan untuk mewujudkan kehandalan pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sosial yang bertumpu pada kontribusi partisipasi masyarakat secara langsung. Program yang dilakukan antara lain : pelaksanaan studi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebutuhan fasilitas umum dan sosial bagi penduduk Mebidang dan perencanaan alokasi ruang penyebaran sarana; upaya penyediaan lahan bagi fasilitas sosial kota; mengkoordinasikan dana zakat dan dana amal lainnya, untuk pelaksanaan pembangunan sarana sosial dengan kekuatan swadaya masyarakat; memberikan dana bantuan pemeliharaan sarana sosial baik langsung maupun tidak langsung.

15) **Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi**, diarahkan untuk dapat mendorong dan mendukung upaya peningkatan kemampuan pelayanan telekomunikasi secara terus menerus, hingga dapat mencakup kebutuhan seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat di Kota Medan, sesuai tingkat kemajuan telekomunikasi dan komunikasi yang berkembang pada jamannya; mendorong terbentuknya iklim usaha telekomunikasi yang kondusif dengan pola sistem kerjasama dan kesepakatan bersama; yang pada dasarnya mampu memberikan nilai daya saing keunggulan telekomunikasi yang maju di tingkat internasional, dalam mendukung pergerakan dan pertumbuhan perekonomian kota. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi dilakukan melalui fasilitasi : (a) peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan, antara lain melalui peningkatan kemudahan investasi, peningkatan kerjasama penyelenggaraan, dan perluasan jaringan; (b) Peningkatan kemudahan akses bagi tiap individu di Kota Medan untuk mendapat pelayanan telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi kota; (c) Pembuatan dan pengaplikasian rencana induk penataan frekuensi, dan sistem jaringan kabel; (d) Penataan lokasi menara telekomunikasi serta fasilitasi kerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi secara bersama, pembangunan menara induk komunikasi bersama yang dimiliki Pemerintah Kota dan dapat digunakan oleh berbagai pihak dengan sistem sewa pakai yang diarahkan di CBD Polonia berupa Menara Medan baik dalam bentuk tugu induk maupun gedung; (e) Meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan pembiayaan community development tiap perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan; (f) **Pengembangan jaringan internet kota yang murah dalam rangka perwujudan *cyber city*;** (g) Pengembangan sistem data dan kearsipan yang terintegrasi dalam sistem informasi perkotaan; (h) Mendorong pembangunan dan perluasan jaringan dan jenis jasa layanan telekomunikasi; serta (i) Pengembangan televisi lokal.

c. Membangun dan Mengembangkan Perumahan dan Pemukiman yang Sehat dan Terjangkau

1) **Pembangunan perumahan**, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perumahan skala besar, sedang dan kecil yang sehat sekaligus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui (a) mendorong pembangunan perumahan real estate, apartemen maupun yang dilengkapi fasilitas lingkungan yang memenuhi standar kota modren dan maju; (b) pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah dengan sistem, kasiba/lisiba, rumah susun,

rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baik oleh Pemerintah maupun swasta; (c) pembangunan rumah untuk pegawai negeri dan buruh; (d) fasilitasi kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pegawai Negeri/TNI, dan guru; serta (e) mendorong pembangunan apartemen-apartemen dan fasilitas pendukungnya khususnya di sekitar CBD yang direncanakan, sehingga mampu mengurangi pergerakan lalu lintas di sekitar CBD. Pembangunan perumahan diarahkan pada wilayah kepadatan tinggi di arah Utara (terutama untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang bekerja di KIM, Pelabuhan Belawan dan *Export Processing Zone*/EPZ), kepadatan sedang di arah Timur dan Barat serta kepadatan rendah di arah Selatan.

2) **Penataan pemukiman yang sehat, layak huni dan nyaman huni,** diarahkan untuk terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat, dan asri, sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius. Penataan permukiman dilakukan melalui (a) pembangunan dan perawatan prasarana pemukiman yang sehat dan asri secara berkesinambungan; (b) pembangunan jalan setapak (gang dan saluran drainasenya; (c) penataan kawasan pemukiman nelayan; (d) perawatan bangunan milik Pemerintah baik rumah, kantor, fasilitas umum maupun fasilitas sosial; (e) pembangunan taman-taman di kawasan pemukiman yang didahului oleh pengadaan lahan; (f) peningkatan koordinasi penyediaan prasarana pendukung seperti air bersih dan sumber energi lainnya, serta persampahan di kantong-kantong pemukiman padat dan rencana pengembangan.

3) **Penataan kawasan kumuh dan program rumah sehat** yang terus diupayakan peningkatannya, untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan pemukiman yang layak huni, melalui pembangunan fisik lingkungan kawasan kumuh, maupun penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh; serta (c) upaya pembebasan lahan seperti normalisasi sungai dan penertiban pemukiman liar di sepanjang sungai, rel kereta api maupun tanah garapan lainnya.

4) **Pembangunan lingkungan pemukiman perkotaan yang asri**, diarahkan untuk memberikan kenyamanan tinggal dan membuat Kota yang Layak Huni dan Nyaman Huni, melalui pembangunan pertamanan di setiap unit lingkungan, lampu penerangan jalan; Kewajiban menanam pohon dan melakukan penghijauan di perkarangan rumah, pada atap cor bangunan dan di lahan parkir sebagai bagian dari paru-patu kota untuk meminimalisasi pemanasan global, pengadaan lahan serta pembangunan folder atau sumur resapan wilayah, dll.

5) **Pengendalian dan monitoring kewajiban developer dalam penyediaan sarana dan prasarana lingkungan** di perumahan/fungsi lainnya yang akan terus ditingkatkan, dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat sekitar perumahan, untuk mendapat hak terlayani prasarana dan sarana yang memadai, melalui perencanaan secara ketat kewajiban menyediakan ruang publik dan prasarana sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dalam setiap Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan, kewajiban membangun fasilitas dan kewajiban penyerahan kepada Pemerintah Kota atau masyarakat setelah masa waktu tertentu; monitoring pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas umum/fasilitas sosial dan prasarana; dan pengenaan *development impact fee.*

d. Meningkatkan Kemitraan Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur Kota

1) **Pemetaan para pihak (stakeholder) yang terkait dalam pembangunan kota**, sekaligus berpotensi dalam pengembangan kemitraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, ditekankan untuk penyusunan rencana kerja kemitraan, sesuai skala prioritas mengingat sangat beragamnya potensi kemitraan baik lembaga

donatur dunia, Pemerintah atasan, swasta lokal, swasta nasional, masyarakat maupun Pemerintah daerah sekitar dan kota kembar. Pemetaan ini dilakukan dengan penggalian informasi sedalam-dalamnya dan penyusunan analisis kelayakan kemitraan, yang dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi dan pelaksanaan kemitraan dan publikasi atau marketing program kemitraan yang saling menguntungkan.

2) **Pengembangan kerjasama pemerintah-swasta (*public private partnership*)** akan terus ditingkatkan dalam sektor prasarana dan sarana kota dan diarahkan untuk menggali sumber-sumber dana alternatif guna mengatasi keterbatasan dana pembangunan Pemerintah Kota, melalui bentuk-bentuk kerjasama pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat *cost recovery* seperti jalan tol, kawasan CBD, pasar tradisional maupun modern, sekolah/lembaga pendidikan, telekomunikasi, air bersih, rumah sakit, dsb); serta pada bidang yang memiliki nilai promosi seperti taman, air mancur, halte, revitalisasi kawasan, jembatan penyeberangan atau sarana penyeberangan multiguna, wadah pembuangan sampah sementara, dan berbagai media lainnya; serta kemudahan perizinan.

3) **Menghilangkan faktor-faktor penghambat peningkatan peran swasta** yang ditekankan pada tiga hal yaitu perumusan regulasi yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif, yang dapat mendorong kerjasama dengan swasta secara saling menguntungkan; perumusan penetapan standar baku perjanjian kerjasama yang memiliki jaminan kepastian hukum bagi investasi swasta, yang dikeluarkan untuk partisipasi pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, sekaligus dapat menjamin terselenggaranya kepentingan publik; dan fasilitasi kerjasama permodalan pembangunan kota.

4) **Pengarahan dan koordinasi program *community development*** yang dilakukan perusahaan nasional dan multinasional, ditekankan untuk menjamin dana-dana yang diberikan oleh mitra Pemerintah Kota Medan yang berasal dari perusahaan swasta dapat terserap langsung oleh masyarakat dengan tepat sasaran, melalui penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, penyiapan data base masyarakat dan kawasan yang membutuhkan bantuan partisipasi pembangunan fisik dan sumberdaya manusia, menghimpun perusahaan-perusahaan tersebut dalam tim profesional pemberdayaan masyarakat, serta pemberian penghargaan tahunan terhadap kemitraan program community development yang paling berhasil. Hal ini penting mengingat banyaknya perusahaan yang memiliki program sejenis tetapi tidak terorganisir pelaksanaannya.

5) **Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana kota, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengendalian/pengawasan/perawatan**, yang diarahkan untuk mengefisienkan anggaran pembangunan kota yang terbatas, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak kegiatan yang berdampak langsung. Kebijakan yang akan dilakukan dalam pencapaian arahan tersebut melalui (a) Program pemberian stimulan dana pendamping dalam pembangunan swadaya masyarakat dimana Pemerintah Kota akan memberikan sejumlah paket bantuan dana pendamping pembangunan (nilai sama) prasarana dan sarana kota yang terpilih sebagai proposal terbaik dan realisasi tercepat, yang diajukan/dilakukan oleh kelompok masyarakat (satuan lingkungan) setiap tahunnya; (b) Membuka pelayanan SMS khusus untuk pengaduan (partisipasi tugas pengawasan) dan usulan pembangunan kota baik oleh Pemerintah Kota maupun melalui media masa; (c) Mendorong pembentukan forum masyarakat dalam kaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana seperti forum masyarakat sungai, forum pedagang pasar, atau juga forum kota.

6) **Regionalisasi Mebidang yang diperluas** sampai ke tanah Karo, Langkat dan Simalungun, diarahkan untuk meningkatkan kerjasama pembangunan dan pembagian peran dalam pembangunan regional melalui (a) Perintisan komunikasi pembangunan dengan Pemerintah daerah-Pemerintah daerah yang berdekatan; (b) Pembentukan "regional manajemen (RM)" yang terdiri dari regional production, regional marketing, serta bentuk regionalisasi lainnya, untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan aglomerasi serta penghematan dana pembangunan dengan sharing pendanaan. Pengembangan komunikasi, dilanjutkan dengan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan mutlak diperlukan dalam bentuk badan otoritas regionalisasi pada sektor-sektor yang dipilih. Melalui kerjasama regional ini diharapkan seluruh konflik pembangunan akan dapat dieliminir, dan Kota Medan dapat memperoleh keuntungan aliran sumberdaya alam dari wilayah sekitarnya.

7) **Mewujudkan keterpaduan pembangunan kota dengan wilayah Mebidang**, diarahkan untuk menciptakan keterpaduan ruang metropolitan yang menyatu sebagai suatu sistem melalui pengembangan kerjasama pembangunan dengan wilayah sekitar, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Propinsi Sumatera selaku Pemerintah atasan, dalam bentuk kerjasama pembangunan jembatan-jembatan penghubung, jalan lingkar luar (*outer ring road*) barat dan timur serta jalan lingkar paling luar (*Outer Outer Ring Road*), saluran drainase primer maupun perkotaan, pengolahan persampahan, penyediaan prasarana listrik, air bersih, telekomunikasi, dan komitmen sharing pendanaan dan hasil usaha.

8) **Peningkatan kerjasama pembangunan dan perekonomian dalam bentuk sister city**, diarahkan untuk peningkatan volume perdagangan dalam menunjang peningkatan perekonomian kota, mempererat hubungan, sekaligus menggali potensi penerimaan dari kerjasama investasi pembangunan prasarana dan sarana, serta mendapatkan pembelajaran strategi pembangunan melalui sharing pengalaman masing-masing.

9) **Peningkatan kerjasama pembiayaan pembangunan** dengan donatur dalam dan luar negeri, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdana pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana di Kota Medan melalui fasilitasi Pemerintah Pusat.

10) **Mendorong Pembangunan Kota Baru sebagai Kota Satelit** di dalam wilayah Kota Medan maupun di wilayah Kabupaten Deli Serdang, diarahkan untuk mengurangi kejenuhan jumlah penduduk dan aktivitas kota agar terjaminnya kualitas lingkungan yang Nyaman dan Handal serta Asri. Dorongan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan promosi bersama kepada developer lokal, nasional dan internasional, agar menanamkan investasi pembangunan kota baru dengan kemudahan dari Pemerintah Kota Medan berupa akses terhadap prasarana dan sarana Kota Medan dan bantuan perijinan serta pembebasan lahan oleh Kabupaten Deli Serdang.

11) **Pengikutsertaan kelompok usaha dan kelompok masyarakat informal** dalam upaya pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana perkotaan, dengan pertimbangan bahwa sektor informal sering dituding sebagai penyebab permasalahan yang ada pada sektor sarana dan prasarana, padahal kontribusi sektor informal cukup besar dalam perekonomian kota. Potensi tersebut disinergikan dalam bentuk kerjasama perawatan prasarana dan sarana seperti saluran drainase, trotoar, lampu jalan, taman, pasar, dan sebagainya, sehingga perawatan/pemeliharaan prasarana dan sarana menjadi lebih mudah dan murah, karena dilakukan dan diawasi langsung oleh pemanfaat prasarana dan sarana tersebut. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan komunikasi/konsolidasi dalam tahap perencanaan ataupun penataan.

12) **Melanjutkan program konsolidasi tanah/lahan perkotaan**, sebagai wujud nyata pembangunan partisipatif, yang meletakkan Pemerintah Kota sebagai fasilitator (dalam sosialisasi/pendidikan, musyawarah dan penerbitan sertifikat) dan sebagai katalisator (penyedia prasarana dan sarana penunjang lingkungan). Arahan tersebut dimaksudkan untuk penataan ruang dan kepemilikan lahan serta guna menjaga terjaminnya ketersediaan fasilitas dan utilitas secara baik, sesuai kebutuhan masyarakat dan dilakukan sendiri oleh masyarakat.

13) **Pengembangan kemampuan masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana**, diarahkan guna meningkatkan efisiensi pamanfaatan dana pembangunan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sekaligus untuk memobilisasi potensi pendanaan pembangunan dari masyarakat, yang dilakukan melalui kebijakan dan program penyuluhan dan pendidikan; pemberdayaan Kelurahan dan lingkungan; program pemberdayaan masyarakat maupun dalam pembuatan bahan baku perawatan infrastruktur seperti di paving block untuk jalan di kawasan kumuh dan rawan banjir atau pot bunga untuk pertamanan atau dalam bentuk lain, umbul-umbul maupun benda yang dapat diproduksi secara padat karya oleh penduduk yang belum memiliki penghasilan tetap.

14) **Menumbuhkembangkan kelompok kerja masyarakat** dalam pengembangan pembangunan yang berbasis swadaya masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggali potensi kerjasama pembangunan dari sumber-sumber dana alternatif, baik dari swasta maupun dari Donatur Luar negeri, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang menarik, bersifat sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan maupun prasarana lingkungan. Peran Pemerintah Kota adalah pada penyediaan informasi dan fasilitasi program inisiatif masyarakat tersebut, misalkan dalam pembangunan rumah panti asuhan, taman bermain anak-anak, dll.

15) **Pengembangan sistem informasi dan komunikasi**, untuk mendukung pembangunan sarana prasarana perkotaan diarahkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan memberikan akses komunikasi langsung seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pengawasan pembangunan kota melalui pengembangan *hardware,* media informasi baik halaman komunikasi koran lokal, dan media lainnya; pembangunan *software*, berupa data base dan sistem informasi yang komunikatif, baik dalam jaringan internet maupun call service telepon serta layanan Short Message Service (SMS); dan *Humanware*, berupa revitalisasi fungsi Kepala Lingkungan, sebagai perantara langsung masyarakat kepada pemerintahan dan juga hubungan sebaliknya.

16) **Penegakan hukum terhadap penyimpangan pemanfaatan prasarana dan sarana kota**, yang diarahkan untuk menanamkan kesadaran dan disiplin komponen masyarakat untuk menjaga kondisi prasarana dan sara yang telah dibangun, serta agar prasarana dan sarana tersebut dapat terpelihara manfaatnya sebesar perencanaan pembangunan yang telah dilakukan, melalui penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan sebagai bagian dari pendidikan budaya seperti tindakan membuang sampah sembarangan, berjualan di trotoar dan badan jalan, pembangunan titi masuk persil tanah yang menghambat saluran drainase, penyediaan lahan parkir, penggunaan sempadan bangunan, sempadan sungai dan sebagainya.

e. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal dan Bisnis yang Kondusif

1) **Mendorong pengembangan kapasitas dan jaringan** kelistrikan, jalan kota, gas perpipaan, dan air bersih yang dilakukan oleh swasta maupun BUMN/BUMD, yang diarahkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan listrik, jalan, telekomunikasi dan aksesibilitas yang memadai ke kawasan-kawasan pusat bisnis dan pusat produksi, untuk meningkatkan keunggulan komperatif Kota Medan dengan kawasan regional lainnya. Kebijakan tersebut dilakukan melalui analisis kebutuhan secara menyeluruh; koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar instansi; secara bersama-sama melakukan promosi investasi bidang prasarana kepada lembaga pendanaan nasional, maupun international; mengupayakan regionalisasi tarif pelayanan sehingga memberikan jaminan investasi bidang prasarana; membantu pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan jaringan infrastruktur.

2) **Perintisan dan perwujudan *Good Governance***, diarahkan untuk mewujudkan lingkungan kota yang maju dan asri, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial ekonominya, melalui upaya sungguh-sungguh dan sistematis dalam menerapkan dimensi konseptual dan praktis pelaksanaan *Sustainable Urban Economy, Sustainable Urban Society, Sustainable Urban Shelter, Sustainable Urban Environmental, Sustainable Urban Access, Sustainable Urban Life, and Sustainable Urban Democracy*.

3) **Peningkatan kemampuan Pemerintah Kota dalam operasi dan pemeliharaan kota**, diarahkan untuk menjamin kestabilan pelayanan infrastruktur kota dalam mendukung kegiatan bisnis melalui pengembangan swastanisasi pelaksanaan pembangunan maupun perawatan prasarana; pengembangan aksesibilitas jaringan jalan dan angkutan massal lainnya dari sentra bahan baku ke pusat-pusat produksi dan atau ke pusat-pusat pemasaran dan pelabuhan; pengembangan standar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dan swasta, serta pengembangan jaminan investasi prasarana dan sarana kota.

4) **Pelaksanaan analisis ekonomi pembangunan infrastruktur**, diarahkan untuk memberikan gambaran kepada swasta secara transparan dan lengkap kebutuhan investasi bidang prasarana dan sarana perkotaan dan lingkungan, sehingga dapat menggambarkan potensi usaha bidang prasarana dan sarana kota melalui proses penganggaran yang akuntabel, pengelolaan finansial, perhitungan manfaat-biaya pada tiap jenis pembangunan, pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana serta ruang perkotaan.

5) **Pengorganisasian masyarakat dalam meminimalisir potensi konflik sosial**, diarahkan untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang mendukung iklim usaha melalui pembangunan prasarana maupun fasilitas sosial bagi masyarakat di sekitar pusat bisnis/produksi dengan sistem kemitraan; pembangunan perumahan maupun rumah susun sewa bagi pekerja industri di sekitar kawasan industri maupun di dalam Kawasan CBD yang akan dibangun; dan pengkoordinasian penyaluran dana community development sektor industri, untuk pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta prasarana di sekitar kawasan industri.

6) **Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial dalam penggalian sumber-sumber dan berbagai bentuk investasi dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan**, ditekankan pada pengembangan investasi prasarana dan sarana dan transparansi, sekaligus jaminan pembangunan prasarana dan sarana yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan bisnis di Kota Medan, melalui perencanaan menyeluruh skala prioritas pembangunan prasarana dan sarana, penyusunan dan penetapan rencana tahapan pembangunan prasarana dan sarana

pertahun, untuk mengetahui arah pengembangan kota, gambaran lokasi dan nilai investasi yang dibutuhkan, sekaligus feasibility/kelayakan pembangunannya.

f. Memelihara, Melestarikan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1) **Pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup kota** baik lingkungan fisik, biologi, sosial budaya, stabilitas pertahanan dan keamanan, perekonomian, dan tansportasi melalui penerapan kewajiban penyusunan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL bagi kegiatan yang diwajibkan; sosialisasi dan pengawasan kewajiban pemeriksaan berkala limbah, pengembangan upaya-upaya pencegahan/minimalisir polusi usara, air dan tanah; memperkuat infrastruktur lingkungan dengan menyusun data base dan sistem informasi yang lengkap dan modern dalam memenuhi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup.

2) **Pemantauan dan pengendalian kualitas air, tanah dan udara Kota Medan**, dengan perangkat hukum dan teknologi modern sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan yang berkualitas dan asri serta layak/nyaman untuk dihuni. Arah kebijakan ini dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala kadar emisi gas buang kendaraan; pengawasan batas ambang baku kondisi air, udara, dan tanah lingkungan kota maupun secara khusus pada lokasi industri dan perdagangan; pengawasan dan pengendalian secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan RKL/RPK, UKL/UPL maupun dokumen lingkungan lainnya, yang telah dimiliki oleh tiap aktivitas yang memiliki dampak penting; maupun pembatasan usia kendaraan khususnya kendaraan umum dan kendaraan berat.

3) **Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang**, diarahkan pada pembatasan kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya dan mempertahankan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, melalui penegakan hukum yang konsisten dan proaktif, pengendalian perizinan seperti secara selektif memberikan izin perpanjangan usaha bagi industri yang berada di luar kawasan industri yang telah ditetapkan, pelaksanaan skenario pengendalian melalui pembatasan/disinsentif maupun insentif sarana dan prasarana dalam membentuk wujud fisik tata ruang.

4) **Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara konsisten,** diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan pelestarian lingkungan dan prasarana yang telah dilakukan sebelumnya sampai selesainya seluruh tahapan dan untuk menjamin pembangunan yang dilakukan, tidak mengganggu perikehidupan dan kelangsungan pembangunan dimasa depan. Pelaksanaannya dengan melanjutkan program dalam proyek Metropolitan Medan Urban Management Project (MMUDP) yaitu sektor air bersih (WS 3/1.1, 2.1, dan 2.2), drainase (DR-001), pengendalian banjir (FC/104), pemeliharaan program persampahan dan air limbah/sanitasi, jalan kota (TR 09, 15B, 16M, 17).

5) **Penataan dan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan strategis** diarahkan untuk menjaga agar terpeliharanya lingkungan yang asri dan menjadi simbol (landmark) Kota Medan melalui pembatasan pembangunan secara selektif di Kawasan Polonia, pembangunan kawasan yang dapat menunjukkan sejarah awal perkembangan Kota Medan Putri dan kawasan Labuhan, pengendalian bangunan di sepanjang lahan yang dipersiapkan sebagai jalur transportasi massal kota dimasa depan.

6) **Pengendalian sumberdaya air dan upaya konservasi air,** diarahkan untuk mencegah infiltrasi air laut, penyediaan air tanah dan air permukaan yang memadai sebagai sumber air bersih maupun sumber air baku melalui pengelolaan aliran air tanah, pengendalian sumur pompa air tanah secara ketat, disertai penegakan hukum,

pembebasan lahan dan penguasaan atau pengendalian lahan sumber air bersih seperti danau, mata air, sungai, dsb.

7) **Pengendalian banjir dan pengelolaan kekeringan,** diarahkan pada pengendalian erosi dan sedimentasi, menjamin berlangsungnya penyerapan air hujan ke dalam tanah dan melalui penerapan serta pengawasan pembangunan sumur resapan individu, sumur resapan komunal dan sumur resapan kota (folder) secara terintegrasi; pembebasan lahan untuk penyediaan sumur resapan (folder kota) dan ruang terbuka hijau untuk memperkaya daerah tangkapan air hujan; penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan jalur hijau sempadan sungai dan sempadan pantai; pembatasan pembangunan di areal rawa dan paluh di bagian Utara untuk menjamin ketersediaan lahan resapan; serta peningkatan kesadaran sungai/kali bersih, disertai upaya penyediaan pelayanan sampah di permukiman padat sepanjang sungai/saluran utama kota.

8) **Melestarikan Kawasan Lindung yang terus dilakukan** dalam bentuk perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kota yang mampu menjembatani kebutuhan ruang aktivitas perkotaan, dengan penyediaan ruang yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara seimbang, diarahkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan perekonomian kota, menjamin pemerataan pembangunan sekaligus pemerataan penggunaan sumberdaya, dan pelestarian aset-aset yang bernilai dalam menunjang perkembangan kota melalui penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

9) **Pelestarian fungsi sungai, pantai dan rawa** yang diarahkan untuk (a) meminimalisir kerusakan dan pencemaran sungai yang dilakukan melalui normalisasi sungai, penataan jalur hijau sungai untuk pembangunan jalan inspeksi dan taman agar orientasi bangunan tidak membelakangi sungai, dan penyediaan pembuangan sampah di sekitar sungai; (b) meminimalisir abrasi pantai dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, yang dilakukan melalui pelestarian hutan bakau, koordinasi dengan Kabupaten sekitar, pemantauan buangan limbah kapal, pembangunan dan penataan kawasan pantai sebagai *waterfront city*; (c) menjaga tersedianya resapan air pada kawasan rawa yang dilakukan dengan penggunaan teknologi konstruksi bangunan, pembuatan poled maupun danau-danau buatan, dan pengendalian alih fungsi lahan secara ketat.

10) **Pelestarian dan konservasi bangunan/kawasan bersejarah,** memiliki tujuan agar kawasan bersejarah yang ada di Kota Medan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan sistem kota, terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya, dan dapat meningkatkan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan vitalitas dan stabilitas ekonomi kawasan, meningkatkan nilai properti kawasan, menciptakan konservasi asset warisan budaya dan arsitektural yang bernilai sejarah lokal maupun nasional, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan kawasan agar lebih nyaman sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kebijakan yang ditempuh melalui (a) Peningkatan regulasi dalam pelestarian bangunan bersejarah melalui pengembangan Peraturan daerah, dan penyusunan rencana teknis tata ruang kawasan bersejarah; (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian melalui pembentukan forum kerjasama, pemberian insentif dan disinsentif; (c) Pengendalian perubahan bangunan dan kawasan bersejarah melalui perijinan dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai stakeholder serta penegakan hukum; (d) Peningkatan kualitas bangunan dan kawasan melalui upaya-upaya peremajaan, penataan bangunan, pengaturan pakir dan kebersihan serta pengembangan wisata; (e) Perencanaan dan pelaksanaan Revitalisasi Kawasan melalui Inventarisasi Kelayakan Bangunan/ Kawasan Bersejarah, Pengembangan sistem informasi kawasan dan bangunan bersejarah, Pelaksanaan

Preservasi/Konservasi/Restorasi/Konsolidasi/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Renovasi/Penggunaan Aditif/Rekonstitusi/dan atau Replikasi seluruh bangunan dan kawasan bersejarah, Penggalian bangunan dan kawasan bersejarah lainnya.

IV.4. Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Dan Religius Melalui Pembangunan Kota Yang Berkeadilan

Kota Medan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan suasana religius akan dicapai melalui pembangunan kota yang berkeadilan. Situasi dan kondisi aman, nyaman, dan berkeadilan menjadi prasyarat pembangunan kota bidang lainnya, sekaligus sebagai dasar moral pembangunan kota yang dibutuhkan, sehingga mendukung tercapainya Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Religius.

Untuk itu, pembangunan kota dalam 20 tahun yang akan datang, diarahkan untuk : (1) Meningkatkan akses masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; (2) Menghilangkan diskriminasi antar individu, antar gender, dan antar wilayah inti kota dengan lingkar luar; (3) Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat; (4) Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat; (5) Meningkatkan distribusi pembangunan kota yang lebih merata; (6) Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, dan (7) Meningkatkan kehidupan yang demokratis, humanis dan religius.

a. Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

1) Pembangunan Kota dilaksanakan berdasarkan azas kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, berkelanjutan, kemitraan, dan keterpaduan strategi serta kebijakan yang ditetapkan. Di samping itu, pembangunan kota diarahkan agar masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan kota, baik pada formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta program pembangunan kota.

2) Pemenuhan hak masyarakat atas berbagai layanan sosial ekonomi, melalui peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial ekonomi, peningkatan mutu fasilitas sosial ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang merata dan berkeadilan, seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan sehat dan layak huni, sanitasi, pengelolaan faktor-faktor produksi, dan pelayanan dasar lainnya.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam perumusan dan penetapan kebijakan serta program pembangunan kota, mewujudkan keberdayaan masyarakat, mendorong penciptaan ruang berusaha, kesempatan kerja, transparansi, pengelolaan sumber daya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota, pengembangan dan penyediaan fasilitas layanan sosial ekonomi, tanpa diskriminasi.

4) Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kota, yang dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan kota.

5) Pemberian peluang yang luas kepada seluruh warga kota untuk berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan ekonomi kota yang modern (*modern urban economic development*) yang ramah lingkungan seperti industri, jasa perdagangan, keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain.

6) Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien baik sebagai fasilitator, regulator, maupun sebagai katalisator pembangunan kota, guna mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dengan tetap menjaga keberlangsungan mekanisme pasar.

7) Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik dan merata, dengan menerapkan sistem informasi manajemen pembangunan kota, melalui infrastruktur teknologi dan informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

8) Mengembangkan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat, sesuai dinamika masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, perlindungan konsumen; serta meningkatkan daya saing ekonomi warga kota yang produktif, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

b. Menghilangkan Diskriminasi Antara Individu, Antar Gender, dan Antar Wilayah Inti Kota Dengan Lingkar Luar

1) Salah satu upaya pemerataan pembangunan kota, dilakukan dengan mewujudkan keadilan sosial ekonomi, rasa aman dan nyaman masyarakat, melalui pencegahan munculnya diskriminasi antar individu, antar gender, dan antar wilayah inti kota dengan lingkar luar. Untuk itu, kebijakan pembangunan kota juga diarahkan untuk mendorong pengarusutamaan gender, kesamaan hak setiap warga kota, pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, percepatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang dasar, serta pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar wilayah lingkar luar, sehingga mengalami kemajuan yang seimbang dengan wilayah inti kota.

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat, serta mengembangkan partisipasi, transparansi dalam proses pembangunan kota tanpa diskriminasi, pelayanan publik yang berkeadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat baik di sektor publik maupun privat.

3) Mendorong pengembangan ekonomi wilayah lingkar luar, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, melalui pembagian peran di antara kelompok - kelompok pembangunan kota, termasuk dukungan kelembagaan, permodalan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kota.

4) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan kota, menghilangkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

5) Meningkatkan keberpihakan Pemerintah Kota untuk mengembangkan wilayah-wilayah lingkar luar, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat sekaligus dapat mengejar ketertinggalan kemajuan pembangunannya dengan wilayah inti kota. Pendekatan pembangunan kota yang dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung, juga melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk peningkatan jaminan pelayanan publik, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

6) Melakukan percepatan pembangunan kota dengan mengembangkan wilayah lingkar luar dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, dan lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses distribusi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat, dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di wilayah lingkar luar.

c. Meningkatkan Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Berbagai Pelayanan Dasar Masyarakat

1) Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat, merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kota, keadilan sosial ekonomi, rasa aman dan nyaman masyarakat. Untuk itu, pembangunan kota juga diarahkan untuk memperluas pelayanan publik bagi masyarakat kelompok tertinggal, miskin dan daerah perbatasan.

2) Mempercepat pembangunan prasarana dan sarana serta penunjang pengembangan seluruh kawasan kota secara merata, tanpa diskriminasi secara berkualitas, khususnya di wilayah lingkar luar, kelompok miskin, dan kawasan perbatasan.

3) Mengembangkan kualitas birokrasi pelayanan umum yang semakin efektif dan efisien, dengan aparatur Pemerintah Kota yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang semakin konsisten dan transparan.

d. Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat

1) Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat, merupakan bagian penting mewujudkan pemerataan pembangunan kota, keadilan sosial ekonomi. Untuk itu, pembangunan kota juga diarahkan untuk memenuhi hak setiap warga kota atas rasa aman dan nyaman dari gangguan keamanan, dan tindak kekerasan, serta ancaman ketakutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota.

2) Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini, memperkuat modal sosial, meningkatkan perlindungan bagi setiap warga kota dari tindak kekerasan, khususnya perdagangan perempuan dan anak, untuk menciptakan harmonisasi dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui mekanisme peningkatan keswadayaan masyarakat. Keswadayaan masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum, dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

4) Mendorong peningkatan profesionalisme aparat keamanan beserta Institusi yang terkait dengan masalah keamanan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5) Menciptakan lingkungan kota yang aman dan tertib serta antisipatif, terhadap potensi munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

e. Meningkatkan Distribusi Pembangunan Kota Yang Merata

1) Pemerataan pembangunan kota, keadilan sosial ekonomi juga dicapai dengan meningkatkan distribusi pembangunan kota yang merata. Untuk itu, dilakukan peningkatan keberdayaan masyarakat di kawasan lingkar luar, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di kawasan lingkar luar, dan wilayah perbatasan, mendorong pengembangan ekonomi lokal di kawasan lingkar luar, dengan menstimulasinya melalui percepatan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta penunjang pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar wilayah lingkar luar dan perbatasan.

2) Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan koridor transportasi, sehingga menstimulan bangkitnya ekonomi wilayah lingkar luar, dan perbatasan, guna merangsang masuknya investasi, sekaligus membuka akses yang luas masyarakat ke seluruh wilayah.

3) Mengembangkan pertumbuhan wilayah inti kota, tengah, dan lingkar luar secara efisien dan efektif, terutama melalui peningkatan peran dan fungsi wilayah lingkar luar sebagai wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, sekaligus menahan laju perpindahan dan pengendalian penduduk.

4) Membangun sinergi dan keterkaitan yang saling melengkapi antara kawasan inti kota dengan lingkar luar, dengan fokus peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat lingkar luar, melalui peningkatan keterkaitan kegiatan pembangunan inti kota, tengah, dan lingkar luar, penataan kawasan-kawasan di lingkar luar menjadi kawasan layak huni, peningkatan kemampuan masyarakat lingkar luar untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya di pusat-pusat perdagangan di inti kota, serta pemantapan struktur kegiatan perekonomian di kawasan lingkar luar, sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dioptimalkan, dukungan penataan kelembagaan, dan penguatan organisasi ekonomi serta kemasyarakatan di wilayah lingkar luar, agar masyarakatnya lebih mampu merencanakan, mengarahkan, memanfaatkan sumber dana dan daya secara efisien serta efektif, dengan mendorong percepatan pembangunan prasarana dan sarana perekonomian wilayah lingkar luar, termasuk pengembangan koperasi dan lembaga keuangan yang tepat, serta perlindungan hak-hak lokal, atas inovasi dan kreativitas yang diciptakan.

5) Merevitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*) yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi masal yang terintegrasi antar moda.

f. Meningkatkan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan

1) Pembangunan Kota dalam jangka panjang untuk 20 tahun ke depan, merupakan satu kesatuan dan bagian yang terintegrasi dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan kota juga diarahkan kepada upaya - upaya bersama antara Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat dan komponen pembangunan kota lainnya, sebagai gerakan penanggulangan kemiskinan.

2) Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengatasi kemiskinan perkotaan, maka pembangunan kota juga diarahkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan progresif, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah lingkar dalam-tengah-luar.

3) Penanggulangan kemiskinan perkotaan dalam rangka pembangunan kota juga diarahkan untuk mendorong perluasan kesempatan yang seluas - luasnya bagi masyarakat miskin kota, untuk memperoleh hak-hak dasar serta peningkatan taraf hidup kelompok miskin secara berkelanjutan. Di samping itu, strategi penanggulangan kemiskinan kota juga diarahkan kepada pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas perlindungan sosial, dan penataan kemitraan seluruh komponen pembangunan kota, dalam upaya penanggulangan kemiskinan kota.

4) Kebijakan pemenuhan hak dasar kelompok masyarakat miskin kota diarahkan pada pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, air bersih, rasa aman serta sanitasi yang layak, hak atas faktor produksi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota.

5) Kebijakan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam penanggulangan kemiskinan kota diarahkan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, dan menjamin kesamaan hak perempuan untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan umum pembangunan kota, memperoleh pelayanan umum, dan mencapai kesejahteraan sosial.

6) Kebijakan pembangunan wilayah lingkar luar dalam penanggulangan kemiskinan kota diarahkan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di wilayah lingkar luar, kawasan pesisir, inti kota dan wilayah perbatasan dengan Kota/Kabupaten lainnya.

7) Mengarahkan upaya penanggulangan kemiskinan kepada pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, seperti hak atas layanan pangan, hak atas layanan pendidikan, hak atas layanan kesehatan, hak atas layanan pekerjaan dan berusaha, serta hak atas perumahan.

8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui: peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat miskin; peningkatan kesempatan serta kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang meningkatkan produksi, pendapatan, dan kemakmuran untuk mengatasi kemiskinan.

g. Meningkatkan Kehidupan Yang Demokratis, Humanis dan Religius

1) Kehidupan, dan suasana Kota Religius merupakan ciri dan karakter Kota Medan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan religius tahun 2025. Untuk itu, pembangunan sosial budaya dalam jangka panjang juga diarahkan kepada pembangunan mental-spiritual yang menjadi bagian integral (senapas) dengan dan dari keseluruhan pembangunan kota yang dilaksanakan. Di samping itu, keberagamaan, dan agama menjadi motivator serta kontrol dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat kota, sekaligus sebagai landasan serta kekuatan pendorong dalam pembangunan kota.

2) Menjadikan agama sebagai landasan moral dan etik pelaku pembangunan kota, serta nilai-nilai dasar kehidupan seluruh warga kota. Untuk itu, pembangunan kota juga diukur dari sudut nilai guna bagi peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kota, sekaligus diarahkan sebagai pembentuk sikap dan perilaku masyarakat yang religius, untuk mewujudkan manusia taqwa yang memiliki moral, etika, serta akhlak mulia dalam semua sendi kehidupan.

3) Mengembangkan fungsi dan peranan agama dalam pembangunan kota sebagai perekat kohesi sosial, harmonitas kehidupan masyarakat yang plural. Untuk itu, pembangunan kota juga diarahkan guna meningkatkan keberagamaan yang baik, kuat dan terbuka, sehingga menciptakan situasi yang kondusif, dimana setiap warga kota menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup umat beragama.

4) Membina warga kota yang taat, beriman dan bertaqwa, serta mewujudkan jaminan sosial, keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga. Mengembangkan dan meningkatkan sarana serta fasilitas yang memberdayakan sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan, dalam bingkai nilai-nilai religiusitas kota. Untuk itu, pembangunan kota juga diarahkan untuk membina suasana tentram, sentosa, rukun dan damai, melalui peningkatan jaringan komunikasi beretika (berakhlak mulia) dan memiliki solidaritas yang tinggi, perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan umum, serta pengembangan perekonomian maju dan manusiawi.

5) Pembangunan kota juga diarahkan untuk meningkatkan dan memberdayakan pendidikan agama serta keagamaan, kualitas umat beragama dan *sosial safety net.* Untuk itu, sangat ditekankan nuansa dan keberadaan suasana religius dalam berbagai aspek pembangunan kota, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kelembagaan masyarakat.

6) Meningkatkan perwujudan masyarakat kota yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, dengan lebih memberikan akses yang luas terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan kota, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga kota, membentuk perilaku warga kota yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Oleh karena itu, peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan mendorong penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

7) Mengembangkan dan mengupayakan budaya politik lokal dengan titik berat pada proses penanaman nilai-nilai demokratis, melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama terhadap penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; serta perwujudan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

8) Di sisi ekonomi, perekonomian Kota Medan dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional, sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian kota memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, dinamika regional, dan kepentingan strategis untuk meningkatkan kemandirian perekonomian kota.

9) Pembangunan kota diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan, sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan kota dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dan humanis.

10) Pembangunan kota di bidang agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan kota.

11) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat kota yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme, dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa, humanis dan harmonis, serta religius.

IV.5 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Jangka Panjang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok pembangunan kota jangka panjang daerah sebagaimana telah diuraikan di muka maka pembangunan jangka panjang yang berjangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap yang masing-masing tahap berjangka waktu 5 tahun. Masing-masing tahap akan diformulasikan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJM-D) setiap lima tahun. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Medan seluruhnya terdiri dari 4 RPJM-D dan masing-masing RPJM-D memiliki fokus dan skala prioritas yang sifatnya simultan dan berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana digambarkan oleh visi dan misi yang telah ditetapkan dan disepakati.

4.5.1 RPJM-D ke-1 (2006-2010)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah pertama (2006-2010) secara makro yang ditetapkan, baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial diproyeksikan sebagai berikut :

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2006 – 2010

No	Uraian	Satuan	Perkiraan 2010
A	**INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**		
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,202.06
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1.29
3	Luas Wilayah	km2	265.10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	8,306.51
5	APS		
	- 7 – 12	persen	98.83
	- 13 – 15	persen	95.52
	- 16 – 18	persen	81.78
	- 19 – 24	persen	38.72
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72.92
7	Angka Kelahiran Kasar	rata2 kelahiran PUS	2.09
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 Pddk	2.17

9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103.10
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76
12	TPAK	persen	56.91
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.80
14	IPM	-	76.81
15	Penduduk Miskin	persen	6.49
16	Gini Ratio	-	0.26
17	Rata - rata lama sekolah	tahun	11.84
B	**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**		
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp trilyun	63.01
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8.13
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp jutaan	28.61
4	Inflasi	persen	5.56
5	Export	Nilai FOB, 000 US $	4,723.147
6	Import	Nilai CIF, 000 US $	1,563.172
7	Perkiraan Investasi	Rp trilyun	9.35
8	APBD	milyar (rp)	2,152.64
9	PAD	milyar (rp)	477.99

Berdasarkan kondisi eksternal dan internal Kota Medan, provinsi Sumatera Utara serta situasi nasional dengan berbagai kecenderungan yang terlihat baik yang bersifat positif maupun negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan kemasyarakatan maka dalam pembangunan kota jangka menengah periode pertama fokus pembangunan perlu diprioritaskan pada usaha **mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**.

Perekonomian Kota Medan yang tangguh dan dinamis yang merupakan fokus dan prioritas utama pembangunan RPJM-D ke-1 diharapkan dapat membawa Kota Medan menjadi *World Class City* yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang modern. Kota Medan akan bersaing dengan kota-kota lainnya yang ada di Asia utamanya dalam bidang ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat perdagangan dan keuangan yang terintegrasi, modern dan berskala internasional serta didukung oleh kenakearagaman fasilitas hiburan, olahraga, pusat kesenian dan budaya.

Dalam tahap ini semua hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan pada masa sebelumnya dimantapkan dan diperkokoh untuk menghindarkan terjadinya arus balik apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tak terduga dan tak diharapkan. Kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran-ukuran nyata seperti tersedianya lapangan kerja yang berkualitas, meningkatnya derajad konsumsi akibat peningkatan pekerjaan dan pendapatan, meningkatnya derajad pendidikan akibat tersedianya sarana pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas didukung oleh *e-educatian system* yang semakin luas, tercukupinya pasokan listrik, air, bahan pangan bermutu dan bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain.

Struktur perekonomian yang tangguh dan dinamis ditandai dengan daya saing perekonomian kota yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara sektor perdagangan, industri dan jasa. Prasarana perekonomian juga telah tertata dengan baik. Kondisi ini juga didukung oleh sumberdaya manusia dan kemampuan iptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha-usaha lokal yang dapat bersaing dengan usaha-usaha berskala

internasional. Daya saing yang tinggi dari dunia usaha akan melahirkan pertumbuhan ekonomi kota yang semakin berkualitas hingga pendapatan perkapita terus meningkat serta menurunnya secara signifikan tingkat pengangguran dan kemiskinan kota.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah pertama ditekankan kepada misi mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD pertama ini (2006-2010) diarahkan kepada :

1). Misi pertama "**mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2006 - 2010, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 8,13% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2010 mencapai Rp 63,01 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2010 mencapai Rp 28,61 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 9,8%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 6,49%.

b. Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.

c. Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

e. Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

f. Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit.

g. Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

h. Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

i. Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

j. Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

2). Misi kedua "**mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 76,81 tahun 2010, dengan rata - rata lama sekolah 11,84.

b. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 76,81 tahun 2010, dengan angka harapan hidup 72,92.

c. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,2 juta jiwa pada tahun 2010.

d. Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.

e. Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

f. Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

g. Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

h. Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 9,35 trilyun tahun 2010.

i. Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

3) Misi ke tiga "**mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan**" akan dicapai melalui :

a. *Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan,* ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin *pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan* jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya *pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas,* namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.

b. Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal, asri, dan berwawasan lingkungan khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

c. *Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya.*Terpenuhinya pasokan energi* tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. *Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

d. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

e. Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

f. Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

g. Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

h. Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha.

i. Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.

j. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder).

4). Misi ke empat "**mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**", akan dicapai melalui :

a. Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,26.

b. Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

d. Penurunan tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 6,49%.

e. Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

f. Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

g. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.

h. Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

i. Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

4.5.2 RPJM-D ke-2 (2011-2015)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah ke dua (2011-2015) secara makro yang ditetapkan baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial diproyeksikan sebagai berikut :

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Satuan	Perkiraan	
			2010	2015
A	**INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**			
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,202.06	2,337.26
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1.29	1.11
3	Luas Wilayah	km2	265.10	265.10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	8,306.51	8,816.53
5	APS			
	- 7 – 12	persen	98.83	99.19
	- 13 – 15	persen	95.52	96.74
	- 16 – 18	persen	81.78	86.00
	- 19 – 24	persen	38.72	44.00
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72.92	74.58
7	Angka Kelahiran Kasar	rata2 kelahiran PUS	2.09	1.89
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 Pddk	2.17	1.62
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38	12.09
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103.10	94.38
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76	9.70
12	TPAK	persen	56.91	58.14
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.80	8.80
14	IPM	-	76.81	78.36
15	Penduduk Miskin	persen	6.49	5.74
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25
17	Rata - rata lama sekolah	tahun	11.84	12.84
B	**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**			
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp trilyun	63.01	84.58
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8.13	8.72
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp jutaan	28.61	36.19
4	Inflasi	persen	5.56	5.03
5	Export	Nilai FOB, 000 US $	4,723.147	6,248.697
6	Import	Nilai CIF, 000 US $	1,563.172	2,081.532
7	Perkiraan Investasi	Rp trilyun	9.35	12.81
8	APBD	milyar (rp)	2,152.64	2,752.39
9	PAD	milyar (rp)	477.99	663.71

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke -1, maka RPJM-D ke-2 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai tenologi, beriman, bertaqwa serta mandiri.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke-2 pada dasarnya tidak semata-mata diukur dari jumlah lulusan pendidkan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak reperesentatif terhadap peningkatan kesejahateraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajad penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan.

Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Upaya ini ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan menjadi > 78, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 581% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan kepemerintahan.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah ke dua ditekankan kepada misi mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus dimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD ke dua. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD ke dua ini diarahkan kepada :

1). Misi pertama "**mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2011 - 2015, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 8,72% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2015 mencapai Rp 84,58 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2015 mencapai Rp 39,19 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 8,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5,74%.

b. Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.

c. Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

e. Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

f. Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit.

g. Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

h. Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

i. Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

j. Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

2). Misi kedua "**mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 78,36 tahun 2015, dengan rata - rata lama sekolah 12,84.

b. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 78,36 tahun 2015, dengan angka harapan hidup 74,58.

c. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,33 juta jiwa pada tahun 2015.

d. Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.

e. Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

f. Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

g. Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

h. Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 12,81 trilyun tahun 2015.

i. Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

3) Misi ke tiga "**mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan**" akan dicapai melalui :

a. *Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan,* ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin *pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan* jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya *pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas,* namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.

b. Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

c. *Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya.*Terpenuhinya pasokan energi* tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. *Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

d. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

e. Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

f. Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

g. Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

h. Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha.

i. Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.

j. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder).

4). Misi ke empat "**mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**", akan dicapai melalui :

a. Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,25.

b. Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

d. Pemenuhan tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 5,74%.

e. Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

f. Penyelenggaraan jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

g. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.

h. Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

i. Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

4.5.3 RPJM-D ke-3 (2016-2020)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2025, maka secara makro, tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah ke tiga (2016-2020) yang ditetapkan baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial diproyeksikan sebagai berikut :

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2020

No	Uraian	Satuan	Perkiraan		
			2010	2015	2020
A	**INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**				
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,202.06	2,337.26	2,472.47
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1.29	1.11	1.03
3	Luas Wilayah	km2	265.10	265.10	265.10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	8,306.51	8,816.53	9,326.54
5	APS				
	- 7 – 12	persen	98.83	99.19	99.55
	- 13 – 15	persen	95.52	96.74	97.95
	- 16 – 18	persen	81.78	86.00	90.23
	- 19 – 24	persen	38.72	44.00	49.29
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72.92	74.58	76.23
7	Angka Kelahiran Kasar	rata2 kelahiran PUS	2.09	1.89	1.69
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 Pddk	2.17	1.62	1.06
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38	12.09	9.80
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103.10	94.38	85.67
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76	9.70	8.65
12	TPAK	persen	56.91	58.14	61.87
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.80	8.80	7.80
14	IPM	-	76.81	78.36	79.90
15	Penduduk Miskin	persen	6.49	5.74	4.99
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25	0.24
17	Rata - rata lama sekolah	tahun	11.84	12.84	13.84
B	**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**				
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp trilyun	63.01	84.58	106.16

2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8.13	8.72	9.30
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp jutaan	28.61	36.19	42.94
4	Inflasi	persen	5.56	5.03	4.50
5	Export	Nilai FOB, 000 US $	4,723.147	6,248.697	7,774.247
6	Import	Nilai CIF, 000 US $	1,563.172	2,081.532	2,599.892
7	Perkiraan Investasi	Rp trilyun	9.35	12.81	16.27
8	APBD	milyar (rp)	2,152.64	2,752.39	3,352.13
9	PAD	milyar (rp)	477.99	663.71	849.42

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 dan ke-2 maka RPJM-D ke-3 **difokuskan pada perwujudan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan asri** dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sekor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM-D ke-1 dan ke-2.

Hasil pembangunan yang dicapai pada RPJM-D ke-1 dan ke-2 sangat perlu didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi.

Pengembangan sarana dan prasarana akan mendukung terjadinya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional serta pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Di sisi lain, prasarana yang modern juga akan mendorong tumbuh kembangnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan kawasan sosial lainnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan tata ruang ditandai dengan berkembangnya jaringan dan moda transportasi kota, terpenuhinya pasokan energi listrik yang dapat menjadi insentif bagi dunia usaha dan penyediaan air minum sesuai dengan standar kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan akan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar pendukung terus meningkat yang akhirnya mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah ke tiga ditekankan kepada misi perwujudan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan asri, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus dimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD ke tiga. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD ke tiga ini diarahkan kepada :

1). Misi pertama "**mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2016 - 2020, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 9,30% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2020 mencapai Rp 106,16 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2020 mencapai Rp 42,94 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 7,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,99%.

b. Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.

c. Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

e. Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

f. Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit.

g. Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

h. Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

i. Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

j. Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

2). Misi kedua "**mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 79,90 tahun 2020, dengan rata - rata lama sekolah 13,84.

b. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 79,90 tahun 2020, dengan angka harapan hidup 76,23.

c. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,47 juta jiwa pada tahun 2020.

d. Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.

e. Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

f. Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

g. Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

h. Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 16,27 trilyun tahun 2020.

i. Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

3) Misi ke tiga "**mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan**" akan dicapai melalui :

a. *Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan,* ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin *pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan* jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya *pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas,* namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.

b. Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

c. *Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal

adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya.*Terpenuhinya pasokan energi* tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. *Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

d. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

e. Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

f. Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

g. Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

h. Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha.

i. Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.

j. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder).

4). Misi ke empat "**mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**", akan dicapai melalui :

a. Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,24.

b. Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

c. Peningkatan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

d. Penurunan tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 4,99%.

e. Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

f. Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

g. Peningakatan peran perempuan dalam pembangunan kota.

h. Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

i. Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

4.5.1 RPJM-D ke-4 (2021-2025)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2025, maka secara makro, tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah ke empat (2021-2025) yang ditetapkan baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial diproyeksikan sebagai berikut :

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2025

No	Uraian	Satuan	Perkiraan			
			2010	2015	2020	2025
A	**INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**					
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,202.06	2,337.26	2,472.47	2,607.67
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1.29	1.11	1.03	0.94
3	Luas Wilayah	km2	265.10	265.10	265.10	265.10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	8,306.51	8,816.53	9,326.54	9,836.56
5	APS					
	- 7 – 12	persen	98.83	99.19	99.55	99.91
	- 13 – 15	persen	95.52	96.74	97.95	99.17
	- 16 – 18	persen	81.78	86.00	90.23	94.46
	- 19 – 24	persen	38.72	44.00	49.29	54.56
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72.92	74.58	76.23	77.89
7	Angka Kelahiran Kasar	rata2 kelahiran PUS	2.09	1.89	1.69	1.48
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 Pddk	2.17	1.62	1.06	0.51
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38	12.09	9.80	7.52

10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103.10	94.38	85.67	76.95
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76	9.70	8.65	7.60
12	TPAK	persen	56.91	58.14	61.87	65.60
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.80	8.80	7.80	6.80
14	IPM	-	76.81	78.36	79.90	81.44
15	Penduduk Miskin	persen	6.49	5.74	4.99	4.24
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25	0.24	0.22
17	Rata - rata lama sekolah	tahun	11.84	12.84	13.84	14.84
B	**INDIKATOR MAKRO EKONOMI**					
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp trilyun	63.01	84.58	106.16	127.74
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8.13	8.72	9.30	9.88
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp jutaan	28.61	36.19	42.94	48.99
4	Inflasi	persen	5.56	5.03	4.50	3.96
5	Export	Nilai FOB, 000 US $	4,723.147	6,248.697	7,774.247	9,299.797
6	Import	Nilai CIF, 000 US $	1,563.172	2,081.532	2,599.892	3,118.252
7	Perkiraan Investasi	Rp trilyun	9.35	12.81	16.27	19.73
8	APBD	milyar (rp)	2,152.64	2,752.39	3,352.13	3,951.87
9	PAD	milyar (rp)	477.99	663.71	849.42	1,035.13

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada **perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius**. Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang yang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJP-D ke-1, 2 dan 3.

Pada RPJMD ke-4 ini diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan kehidupan beragama di masyarakat dengan tetap saling menghargai diantara pada penganutnya, terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat kota. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya kriminalisme dan berbagai gangguan sosial lainnya yang telah demikian meresahkan masyarakat, tidak terlepas dari faktor pengangguran yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menanggur tetapi juga meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang merasakannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kota yang dilandasi oleh religiusitas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkar luar, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga kota.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah ke empat ditekankan kepada misi perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya

produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD ke empat. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD ke empat ini diarahkan kepada :

1). Misi pertama "**mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis**" akan dicapai melalui :

a. Peningkastan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2021 - 2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 9,88% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp 48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%.

b. Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.

c. Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

d. Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

e. Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

f. Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tertier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit.

g. Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia-Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

h. Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, di samping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

i. Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

j. Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.

2). Misi kedua "**mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**" akan dicapai melalui :

a. Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan rata - rata lama sekolah 14,84.

b. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 77,89.

c. Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,60 juta jiwa pada tahun 2025.

d. Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.

e. Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.

f. Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.

g. Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.

h. Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 19,73 trilyun tahun 2025.

i. Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

3) Misi ke tiga "**mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan**" akan dicapai melalui :

a. *Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan,* ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin *pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan* jangka pendek, jangka menengah, dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya *pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas,* namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.

b. Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya di sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

c. *Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi* di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya.*Terpenuhinya pasokan energi* tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. *Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan* sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

d. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan data base dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.

e. Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.

f. Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.

g. Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

h. Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah - DPRD - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Press - Dunia Usaha.

i. Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.

j. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota, (stakeholder).

4). Misi ke empat "**mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**", akan dicapai melalui :

a. Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.

b. Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.

c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.

d. Penurunan tingkat kemiskinan relatif dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif kurang dari 4,24%.

e. Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.

f. Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

g. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.

h. Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.

i. Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor modren.

BAB V
P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan tahun 2006 - 2025 diharapkan dapat memberikan nuansa, perekaan, rekayasa, dan arsitektur pembangunan Kota Medan sampai tahun 2025. Sebagai perencanaan yang lebih menekankan sifat-sifat stratejik manajemen pembangunan kota, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan ini, lebih difokuskan pada visi, misi dan arah pembangunan kota tahun 2006 - 2025.

Sebagai perencanaan yang bersifat agregat, maka RPJP Kota Medan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan kota, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJP Kota Medan ini juga menjadi tuntunan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006 - 2010, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan (RKPD) setiap tahunnya.

RPJP Kota Medan disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kota Medan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan religius. Untuk keberhasilan implementasinya, prasyarat pokoknya adalah ; (1) Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan kota, khususnya Pemerintah Kota - DPRD - Swasta - Masyarakat, dan Press; (2) Konsistensi implementasi perencanaan dan pelaksanaan; (3) Mengacu kepada kepentingan masyarakat dan masa depan; (4) Dukungan dan partisipasi aktif dunia usaha dan seluruh warga Kota Medan, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara; (5) Tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan kota yang dapat digunakan, dan memadai; (6) Menjadikan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; dan (7) Lingkungan bisnis yang senantiasa kondusif.

W A L I K O T A M E D A N,
P E N J A B A T

dto

Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, MSi